

Populasi

Volume 25 Nomor 2

Desember 2017

Artikel

- MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA
Muhadjir Darwin, Henny Ekawati, dan Fadlan Habib 1
- ILLEGAL JOURNEY: THE INDONESIAN UNDOCUMENTED MIGRANT WORKERS TO MALAYSIA
Ridwan Wahyudi 24
- FERTILITAS MIGRAN DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI FERTILITAS DI JAWA BARAT
Rindang Ekawati, Rina Herartri, Nuraini, Laili Rahayuwati, dan Sukamdi 44
- URBANIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA: DEMOGRAPHIC PERSPECTIVES ANALYSIS
Mustafa Elnagi Elsamani Hassan and Agus Joko Pitoyo 54
- PERILAKU STRATEGI *COPING* PELAKU TAMBAK UDANG DALAM MERESPONS KEBIJAKAN PENATAAN PEMANFAATAN TANAH KESULTANAN
Kuncoro Cahyo Aji, Muhadjir Darwin, Kwartarini Wahyu Yuniarti, dan Nurhasan Ismail 70
- Resensi Buku**
- AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL
Muhadjir Darwin 80

KATA PENGANTAR

Tawuran antarpelajar yang menjurus pada tindakan kriminalitas (*klithih*) sedang marak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini. Sehubungan dengan itu, Muhadjir Darwin, Henny Ekawati, dan Fadlan Habib tertarik menulis artikel tentang penanganan tawuran pelajar di Yogyakarta ditinjau dari sudut pandang hubungan antara orang tua siswa dengan sekolah. Menurut mereka, upaya yang harus dilakukan dalam penanganan masalah tawuran pelajar adalah adanya sinergi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua, terutama model komunikasi personal dengan sentuhan teknologi informasi.

Sementara itu, penelitian kualitatif Ridwan Wahyudi menyoroti perjalanan ilegal pekerja migran Indonesia di Malaysia atau PATI (Pendatang Asing Tanpa Izin) untuk sebutan buruh migran ilegal di Malaysia. Dinyatakan bahwa modal sosial dalam jaringan buruh migran ilegal meluas melalui berbagai saluran, terutama pertemanan, persaudaraan, lingkungan, komunitas, dan pengelompokan etnis. Jaringan mereka sangat kuat di luar kendali otoritas dan peraturan pemerintah. Namun, mereka juga kurang mendapatkan akses sosial karena tidak adanya dokumen resmi. Hak asasi mereka terampas karena terbatasnya akses sosial. Oleh karena itu, regulasi di kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia, harus mengakui hak, memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan mengekang korupsi.

Lebih lanjut, Rindang Ekawati, Rina Heratri, Nuraini, Laili Rahayuwati, dan Sukamdi meneliti perbedaan fertilitas antara migran dan nonmigran serta faktor-faktor yang memengaruhi fertilitas di Jawa Barat. Terdapat kecenderungan migran memiliki fertilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nonmigran. Sementara itu, faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap fertilitas adalah pendidikan, usia kawin pertama, penggunaan alat kontrasepsi, dan pekerjaan.

Di sisi lain, Mustafa Elnagi Elsamani Hassan dan Agus Joko Pitoyo meneliti kaitan urbanisasi dengan pembangunan ekonomi di Indonesia dilihat dari perspektif demografi. Dinyatakan bahwa proses urbanisasi di Jawa terjadi secara lebih dramatis dan cepat dibandingkan dengan di luar Jawa. Selanjutnya dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara tingkat perkembangan ekonomi regional dan tingkat urbanisasi di Indonesia. Namun, beberapa provinsi menyimpang dari generalisasi ini, seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Papua, dan Yogyakarta.

Terakhir adalah artikel yang ditulis oleh Kuncoro Cahyo Aji, Muhadjir Darwin, Kwartarini Wahyu Yuniarti, dan Nurhasan Ismail membahas perilaku strategi *coping* pelaku tambak udang dalam merespons kebijakan pemanfaatan tanah kesultanan di Kabupaten Bantul. Strategi *coping* para petambak udang dalam merespons kebijakan tambak udang berbeda-beda, seperti mengkritisi keputusan pemerintah, bersikap menerima, menerima dengan terpaksa, serta menerima dan mengakui bahwa mereka yang salah. Oleh karena itu, tiap kebijakan publik yang diambil pemerintah perlu berkesinambungan supaya tidak menimbulkan persepsi negatif di tingkat masyarakat.

Muhadjir Darwin

MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA

Muhadjir Darwin¹, Henny Ekawati², dan Fadlan Habib²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ²Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Muhadjir Darwin (e-mail: d_muhadjir@yahoo.com)

Abstrak

Tawuran antarpelajar yang menjerumuskan pada tindakan kriminalitas (*klithih*) sedang marak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kondisi ini tidak terlepas dari melemahnya peran keluarga dan sekolah dalam pola pengasuhan anak. Tindakan negatif dalam bentuk aksi *klithih* merupakan perwujudan dari pencarian jati diri yang tidak tepat karena tindakan tersebut semata-mata mengedepankan kontrol diri yang lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65,6 persen masyarakat Yogyakarta menyatakan kekerasan kelompok, terutama aksi *klithih*, meningkat dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah lemahnya peran orang tua dalam pengasuhan (65,7 persen), salah pergaulan (52,5 persen), dan lemahnya peran sekolah (36,2 persen). Upaya yang harus dilakukan dalam penanganan masalah tawuran pelajar adalah adanya sinergi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua, di antaranya dengan meningkatkan komunikasi yang baik antara keduanya dalam pembinaan dan pengawasan pelajar, terutama model komunikasi personal dengan sentuhan teknologi informasi.

Kata kunci: tawuran pelajar, pola asuh, pendidikan karakter

EFFORTS TO BUILD DIGITAL RELATIONS BETWEEN PARENTS AND SCHOOLS IN HANDLING STUDENTS BRAWLS IN YOGYAKARTA

Abstract

Student brawls that lead to criminal activities called *klithih* (a Javanese term for violence among teenage students) is currently rampant in Yogyakarta Special Region (DIY). This condition is related to the weakening role of families and schools in nurturing the students. The negative action, *klithih*, is a manifestation of improper identity searching because it demonstrates a lack of self-control. The research showed that 65.6% of the community of Yogyakarta were agreed that group violence especially *klithih* had increased in the last year, and the main cause was the weakening role of parents (65.7%), wrong association (52.5%) and schools (36.2 %). Therefore, efforts must be made to create a good synergy between the schools and parents in handling student brawls. One of the efforts is improving good communication between the two parties in coaching and supervising teenage students, especially through a model of personal communication involving information technology.

Keywords: student brawl, parenting style, character education

Pendahuluan

Fenomena kenakalan remaja yang menjurus pada tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh para pelajar di Yogyakarta telah mencapai tahap memperhatikan. Kenakalan remaja yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tindakan tawuran atau *klithih*. Berdasarkan data dari Polda DIY, tahun 2016 terjadi 43 kasus tawuran pelajar yang para pelakunya berusia antara 14 sampai 18 tahun (<http://news.detik.com/berita/d-3382743/kapolda-diy-sepanjang-2016-43-kasus-kriminal-didominasi-pelajar>).

Tawuran pelajar sebenarnya bukan sebuah fenomena baru karena hampir di semua tempat, terutama di wilayah perkotaan, kasus ini selalu ada. Fenomena tawuran pelajar ini sering kali dilihat sebagai sebuah tindakan yang biasa saja karena tindakan agresivitas ini awalnya merupakan tindakan yang alamiah mengingat usia remaja yang sebenarnya memiliki karakter yang labil, egois, dan mengedepankan kesenangan (Unayah dan Muslim, 2015: 136). Mereka sering menyebut kegiatan tersebut hanya sebagai perlambang keberanian yang membawa kebanggaan bagi pelakunya karena. Namun, sejak adanya kasus tawuran pelajar yang sampai menghilangkan nyawa orang lain masyarakat mulai resah.

Permasalahan tawuran antarpelajar atau *klithih* yang terjadi di Yogyakarta dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor pola asuh dalam keluarga. Ketidakharmonisan dalam keluarga menyebabkan remaja tidak menemukan kenyamanan dalam keluarga. Kehadiran sosok orang tua yang dapat menjadi teladan juga tidak didapatkan dalam keluarga sehingga perilaku mereka sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan luar. Karakteristik remaja yang ditandai dengan lemahnya

kontrol diri menyebabkan mereka tidak dapat membedakan mana tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat dan mana yang tidak. Ketidakmampuan mengontrol diri ini disebabkan oleh pencarian jati diri pada masa-masa remaja, terutama dalam hal identitas peran yang akan mereka bentuk. Oleh masyarakat, mereka dianggap sebagai anak nakal karena gagal mencari jati diri tersebut.

Kedua adalah adanya faktor pergeseran budaya. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri saat ini juga memengaruhi pola asuh terhadap anak. Dalam masyarakat agraris, pola pengasuhan anak lebih menitikberatkan pada keluarga. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat industri yang selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan material. Orang tua disibukkan dengan rutinitas pekerjaan yang menyebabkan relasi dalam keluarga menjadi longgar. Oleh karena itu, pola pengasuhan anak bergeser dari yang seharusnya menitikberatkan pada peran keluarga menjadi sepenuhnya diserahkan kepada institusi pendidikan formal. Tidak heran jika pada masyarakat industri sekarang, tumbuh subur tempat penitipan anak, PAUD, dan sejenisnya. Orang tua merasa lepas tanggung jawab untuk pembentukan karakter setelah anaknya disekolahkan di lembaga pendidikan formal.

Peran sekolah yang sangat kuat tidak ditopang oleh semangat para pendidik dalam mendidik anak didiknya. Relasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa sering kali bersifat sangat formal. Relasi sekolah dengan orang tua siswa pada umumnya terjalin saat penerimaan siswa baru dan pengambilan rapor atau ijazah saja. Saat itu pun yang disampaikan oleh pihak sekolah hanya berupa nilai-nilai akademis semata. Renggangnya relasi antara orang tua dan pihak sekolah juga disebabkan oleh banyaknya orang tua yang tidak terima jika anak mereka didisiplinkan

*MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH
DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA*

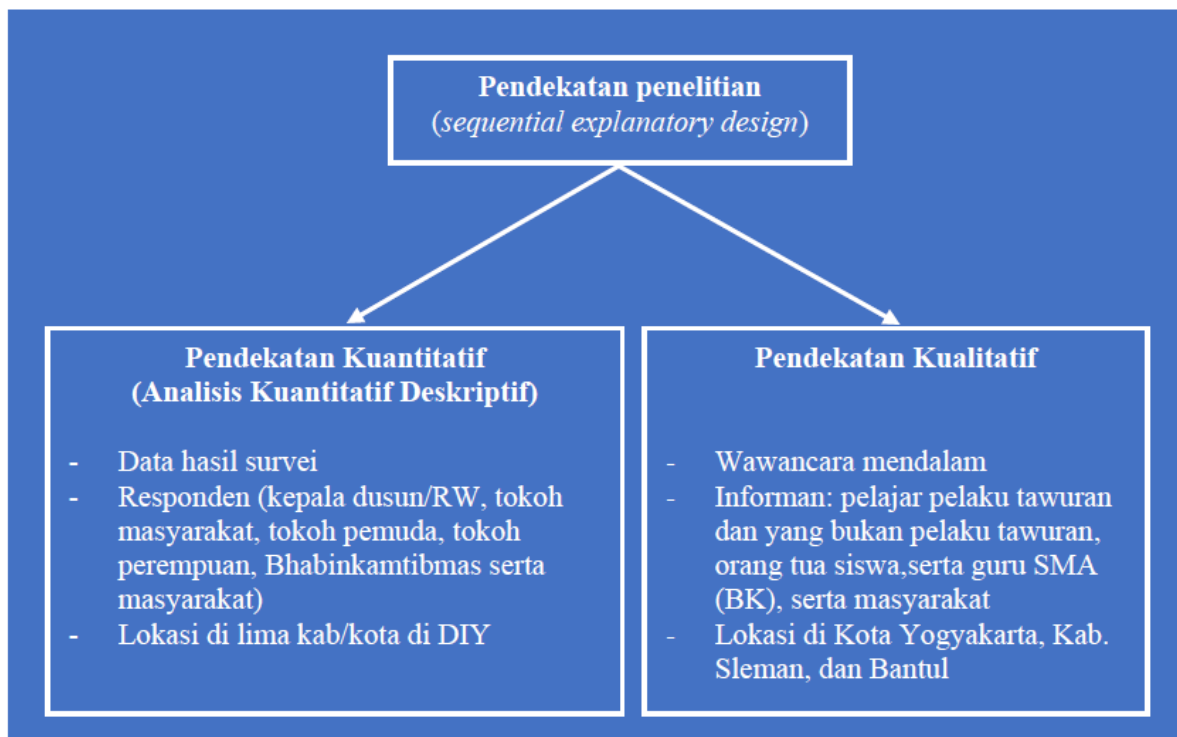
oleh guru ketika anaknya dinilai “nakal”. Ada juga orang tua yang sampai berurusan dengan pihak kepolisian terkait hal tersebut.

Ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi yang kurang tepat sasaran pada remaja. Pada masyarakat milenial seperti saat ini, informasi apa pun dapat diakses dengan mudah. Remaja sekarang lebih disibukkan dengan aktivitas media sosial dibandingkan dengan bercengkerama langsung dengan keluarga maupun lingkungannya. Dampak dari kondisi ini adalah renggangnya relasi dalam keluarga sehingga dengan mudah remaja mencari sosok dari luar yang menurutnya ideal.

Berdasarkan problematika yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pola pengasuhan yang ideal dalam keluarga dan sekolah serta bagaimana model relasi yang ideal antarkeduanya dalam menghadapi anak yang terlibat tawuran pelajar di Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *mixed methods*, yaitu menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif secara bersamaan dengan teknik analisis data deskriptif. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa pelajar yang pernah terlibat tawuran *klithih* dan beberapa pelajar yang tidak pernah ikut tawuran. Selain itu, juga dilakukan wawancara kepada orang tuanya dan beberapa guru di SMA yang ada di Yogyakarta serta beberapa anggota masyarakat. Sementara itu, data kuantitatif diperoleh berdasarkan data penelitian “Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” yang dilakukan oleh PSKK UGM bekerja sama dengan Bakesbangpol DIY tahun 2017 dengan jumlah responden sebanyak 7.744 orang.

Penelitian dengan teknik survei mengambil sampel dari seluruh kecamatan, desa/



Sumber: PSKK UGM, 2017

Grafik 1 Metode dan Desain Penelitian

kelurahan, dan pedukuhan/pedusunan/RW yang ada di lima kabupaten/kota di DIY. Pada tingkat kelurahan/desa, diambil enam responden, yang terdiri atas Babinkamtibmas, tokoh perempuan, tokoh pemuda, BPD dan LPMD (atau tokoh lainnya), serta unsur masyarakat. Melalui kriteria tersebut, diharapkan diperoleh informasi dari perspektif aparat kepolisian sebagai unsur pemelihara keamanan dan ketertiban, serta perspektif perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya. Sementara itu, di tingkat pedukuhan/pedusunan/RW, diambil sampel satu responden, yaitu ketua atau pengurus pedukuhan/pedusunan/RW.

Analisis data kuantitatif ini dimaksudkan untuk melihat persepsi masyarakat DIY terkait keresahan yang timbul akibat maraknya kejadian tawuran antarpelajar. Selain itu, juga analisis tersebut untuk melihat pendapat masyarakat DIY tentang langkah yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam menangani maraknya tawuran antar pelajar. Berikut adalah desain penelitian ini (Grafik 1).

Adapun jumlah informan dan topik yang digali dalam wawancara mendalam terdapat dalam Tabel 1.

Pembahasan

Klithih dalam Lintasan Sejarah Perubahan Sosial

Aktivitas tawuran antarpelajar di Yogyakarta terkenal dengan sebutan *klithih*. Awalnya istilah tersebut digunakan warga Yogyakarta untuk menggambarkan aktivitas santai yang tidak ditentukan waktunya. Menurut Suprpto (2017), dosen UGM dan seorang kriminolog, pada 2002-2003 kata yang berasal dari bahasa Jawa tersebut diadopsi oleh anak-anak SMP-SMA untuk menyebutkan aktivitas jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Kemudian makna *klithih* mulai bergeser tahun 2006 dengan adanya sekelompok anak muda bermotor yang saling mengejek dengan pelajar lain dan akhirnya tawuran yang menyebabkan korban luka-luka. Oleh karena itu, pada tahun-tahun selanjutnya

Tabel 1 Jumlah Peserta beserta Topik yang Ditanyakan

Wawancara	Topik
<ul style="list-style-type: none"> • Siswa • Orang tua siswa • Guru bimbingan konseling • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi, deskripsi, dan respons terhadap tawuran antarpelajar di Yogyakarta • Pola komunikasi yang terjalin dalam keluarga • Bentuk dan peran keluarga dalam pola asuh di keluarga • Peran sekolah dalam menangani peserta didik yang bermasalah • Sikap orang tua jika anaknya terlibat dalam perkuliahan antarpelajar • Relasi antara orang tua dan sekolah dalam penanganan tawuran antarpelajar

Sumber: PSKK UGM, 2017

MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA

klithih memiliki konotasi negatif meskipun tidak populer.

Masyarakat terbiasa menyebut *klithih* dengan stigma negatif tersebut sekitar tahun 2011-2012 ketika kasus pembacokan remaja sering terjadi (<http://jogja.tribunnews.com/2012/01/06/ini-data-tawuran-di-kota-yogya>). Sederetan kasus tawuran pelajar Yogyakarta selama tahun 2011-2012 adalah antara SMU Gama dengan SMU Bopkri 2 (Jumat, 22/4/2011), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Piri I dengan SMK Muhammadiyah 3 (Sabtu, 01/10/2011), dan SMA 6 dengan SMA Muhammadiyah 2 (Sabtu, 29/10/2011), serta dua siswa SMA 11 diamankan di Mapolsek Tegalrejo akibat terlibat tawuran di seputaran depan SMA 2 Yogyakarta (Rabu, 14/12). Kemudian media massa mulai gencar menyebut istilah tersebut dalam publikasinya sekitar tahun 2014 (<https://www.gatra.com/nusantara/jawa/250500-kapolda-minta-istilah-klithih-dihilangkan>). Hingga saat ini *klithih* menjadi tren tersendiri yang digunakan media maupun masyarakat Yogyakarta untuk menggambarkan fenomena tawuran pelajar.

Mayoritas *klithih* diwadahi dalam satu geng yang telah turun-temurun di sekolah tersebut. Menurut informan yang membina geng pelajar di daerah Jogokaryan, proses kaderisasi geng pelajar SMA/ sederajat dilakukan oleh kakak kelas dan teman seangkatan dengan cara mengajak mereka makan, nongkrong, *touring*, dan lain sebagainya. Namun, juga terdapat *klithih* yang murni individu, bukan anak yang tergabung dalam geng, tetapi kasus seperti ini sangat langka ditemukan.

“Setiap sekolah itu memiliki geng, saya pindah ke SMA X ini karena saya tahu ada geng besar di dalamnya. Hidup ini kan, sudah keras, makanya saya masuk geng agar bisa menjalani kerasnya hidup, terlatih

gitu lo ... dan tidak mudah kaget melihat apa pun – darah saat ada kecelakaan, mbleyer, dicurangi orang lain --, makanya menurut saya, masuk geng itu merupakan hal yang perlu dilewati, tapi tidak diulangi ketika sudah selesai SMA”.

Embrio geng remaja di Yogyakarta diawali pada 1970-an dari sebuah klub *minicross*, yaitu sepeda jenis mini dan jengki yang telah dimodifikasi (Jatmiko, 2010: 50-59). Kegiatan klub itu adalah seputar memodifikasi sepeda, pameran keterampilan bersepeda, *pelah cross* (lomba mendorong *velg* sepeda yang telah dilepas jerujinya lantas didorong dengan kayu), dan balapan sepeda. Para anggotanya adalah mereka yang berpakaian rapi dan terpelajar (Jatmiko, 2010: 59). Untuk menjadi anggota klub, mereka akan diuji melakukan *jumping* setinggi dua meteran, berstatus pelajar, dan mendaftar untuk mendapatkan kartu anggota (Jatmiko, 2010: 50-51). Karena persyaratan yang tidak mudah tersebut, anggota klub sepeda di masa itu terkesan elite dan borjuis.

Klub *minicross* dibentuk dengan tujuan untuk olahraga, serta simbol dari kekompakan, keberanian remaja yang berstatus pelajar, dan ekspresi sosial remaja kalangan menengah ke atas untuk menunjukkan eksistensinya. Klub di masa itu sama sekali tidak mengarah kepada afiliasi partai politik tertentu yang akan ditemukan pada 1980-an.

Terdapat sekitar 66 klub *minicross* pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an yang di antaranya adalah Marabunta (Manusia Raja Bunderan Yogyakarta), Cepethe (Cepet Pegun Themon), Derex (Depan Regol Xauman), KPX (Keproex), dan Gaplay Fox (Gabungan Anak Play Boy Fersi Orang Xolot) (Jatmiko, 2010: 54-56). Banyaknya nama klub *minicross* ini menunjukkan bahwa hampir setiap kampung di Yogyakarta memiliki klubnya sendiri. Sementara

itu, untuk menunjukkan keberadaannya, mereka membuat aksi coret-coret yang memenuhi tembok menggunakan kapur, arang atau alat-alat murah yang dapat digunakan untuk menulis (Wicandra, 2016: 52).

Kemudian pada awal 1980-an, muncullah sepeda jenis BMX yang sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan menengah ke bawah dan bukan pelajar. Akibatnya, klub yang awalnya bernuansa simpatik perlahan mengarah ke sikap premanisme: kekerasan dan tawuran (Jatmiko, 2010: 71). Hal inilah yang menggeser istilah “klub” menjadi “geng”. Namun, pada 1982-1985 (Sudjatmoko, 2016: 331) petrus (penembak misterius) sedang marak terjadi di Indonesia sehingga anggota geng tidak berani unjuk nyali karena jika ketahuan, mereka akan langsung ditembak tanpa diproses hukum.

Pasca peristiwa petrus muncul banyak fenomena di masyarakat yang di antaranya (Jatmiko, 2010: 70-79) adalah sebagai berikut. Pertama, geng kembali menguat yang ditandai dengan semakin banyaknya geng motor remaja di Yogya yang sebagian merupakan alumni dari klub *minicross* ataupun BMX. Sementara itu, sebagiannya lagi berasal dari geng motor legendaris yang telah ada sejak awal 1980, yaitu Joxzin (Joxo Zinthing) dan Qizruh (Q-ta Zuka Ribut untuk Hiburan).

Kedua, pada era 1980-an juga terjadi pergeseran pola tawuran yang sebelumnya terjadi antarkampung atau antarmahasiswa dengan motif sportif dan untuk mengukur keberanian remaja. Biasanya tawuran dilakukan satu lawan satu kemudian setelah selesai, mereka akan bersalaman dan berangkulan. Namun yang terjadi kemudian adalah pola *ndingkik*, yaitu menusuk lewat belakang, keroyokan, dan pencegatan terhadap mereka yang dianggap lawan. Ketiga, dari segi asal pelaku dan tempat bergerombol, geng remaja juga mengalami

pergeseran dari sebelumnya geng remaja jarang berdasar sekolahan menjadi geng yang berdasarkan nama sekolah SMA. Keempat, klub atau geng remaja yang sebelumnya bersifat nonpolitis menjadi mengarah kepada partai politik.

Tahun 1990-an Joxzin dan Qizruh meluaskan wilayah pengaruhnya ke sekolah setingkat SMA. Dari ekspansi tersebut, muncullah nama-nama geng pelajar, di antaranya adalah Oestad, Ranger, Morenza, Respect, LBD, Hippies, Pastoer, dan GNB (Jatmiko, 2010: 89). Aktivitas rutin masa ini adalah nongkrong, coret-coret menggunakan cat semprot, dan pada 2000-an kegiatannya bertambah dengan *ngenet* (bermain internet).

Memasuki tahun 2000-an Joxzin dan Qizruh sebagai dua geng utama di Yogyakarta melakukan ekspansi besar-besaran tidak hanya ke sekolah setingkat SMA, tetapi juga setingkat SMP. Beberapa geng SMP yang ada adalah ZNC, Ezphero, Dekrizo, ZKD, Spenyk, BTV, Zareta, dan Libaz. Selain itu, marak juga muncul beberapa geng yang beranggotakan murid perempuan, di antaranya adalah CeMazint, Bricex, B7NGAN 4YO3, dan CeQizhm CeRiezt (Jatmiko, 2010: 100-101). Tahun 2000-an ini geng pelajar yang sebelumnya melakukan *klithih* hanya kepada lawannya saja mulai bergeser dengan menyasar masyarakat biasa yang tidak memiliki masalah dengan anggota geng tersebut. Tujuannya adalah untuk menunjukkan eksistensi diri di dalam kelompok. Kondisi inilah yang membuat pelaku semakin berani, sadis, dan tega melukai orang lain akan mendapatkan posisi tinggi dalam geng tersebut.

Pergeseran istilah dan makna *klithih* dan klub-geng menjadi sangat kompleks seiring dengan perubahan sosial yang terjadi. Menurut Sari Murti selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta, kasus

MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA

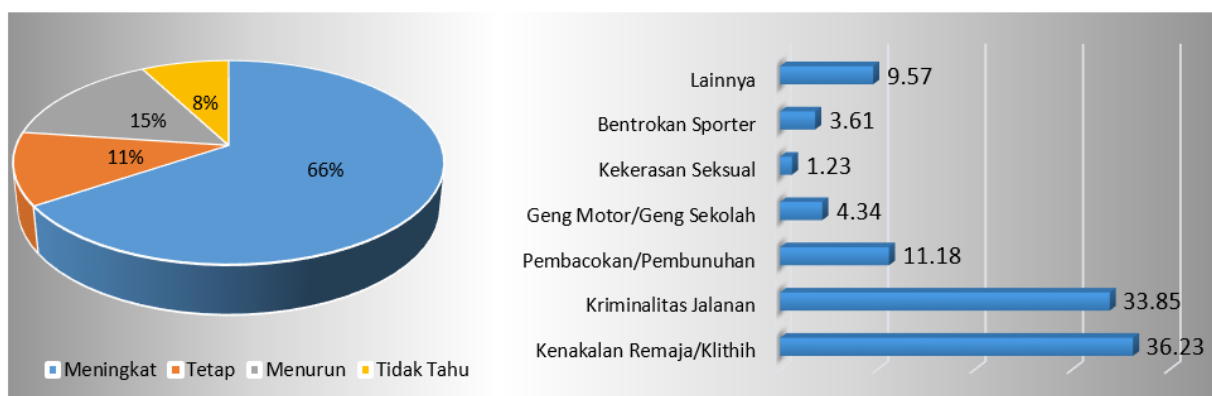
klithih lima tahun terakhir ini secara kuantitas berkurang, tetapi secara kualitas, semakin sadis. *Klithih* yang bermula dari jalan-jalan santai berubah menjadi sebuah aktivitas yang berujung pada penghilangan nyawa. Begitu juga dengan geng yang berawal dari perkumpulan pelajar yang memiliki hobi bersepeda berubah menjadi perkumpulan remaja yang bertindak premanisme.

Maraknya Tawuran Pelajar sebagai Pertanda Perkembangan Suatu Wilayah

Berdasarkan gambaran perjalanan pembentukan gang pelajar beserta rekam jejaknya di atas, salah satu hal yang menjadi keprihatinan bersama adalah kasus tawuran pelajar yang justru semakin menjurus pada tindakan kriminalitas dan berujung pada penghilangan nyawa orang lain. Berdasarkan dari data Survei Perubahan Sosial dan Potensi Konflik tahun 2017, masyarakat Yogyakarta menyatakan 66 persen tindakan kekerasan kelompok, terutama aksi *klithih* meningkat, sedangkan 11 persen masyarakat menyatakan tetap, 15 persen masyarakat menyatakan menurun, dan 8 persen masyarakat menyatakan tidak tahu.

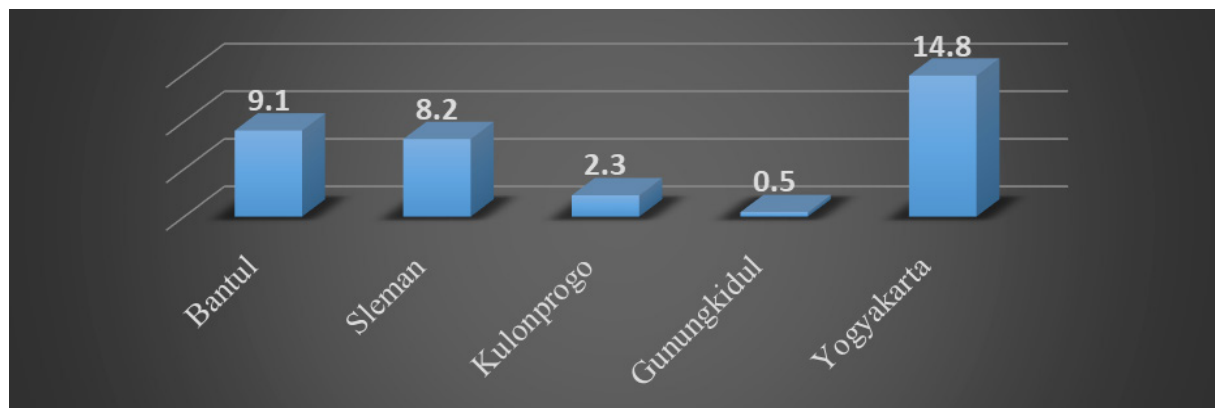
Persepsi masyarakat terhadap peningkatan aksi kekerasan kelompok disebabkan oleh maraknya pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, terutama melalui media sosial. Pemberitaan ini menjadi masif karena predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata yang seharusnya lekat dengan sopan santun, kelembutan dan keramahtamahan, tetapi yang muncul justru sebaliknya.

Tindakan tawuran pelajar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sebuah wilayah. Umumnya kasus seperti ini muncul di wilayah perkotaan maupun daerah penyangga perkotaan. Hasil dari data survei juga menunjukkan hal tersebut. Peneliti survei ini menggali data dengan menanyakan kepada masyarakat terkait keberadaan sekolah yang siswanya sering melakukan tawuran pelajar. Hasilnya memperlihatkan 14,8 persen masyarakat Kota Yogyakarta menyatakan bahwa sekolah di wilayahnya (dalam 1 kelurahan/desa) terlibat tindakan tawuran pelajar, kemudian 9,1 persen untuk Kabupaten Bantul, 8,2 persen untuk Kabupaten Sleman, 2,3 persen untuk Kabupaten Kulonprogo, dan 0,5 persen untuk Kabupaten Gunungkidul.



Sumber: PSKK UGM, 2017

Grafik 2 Pendapat Masyarakat Terkait Tindakan Kekerasan di Yogyakarta



Sumber: PSKK UGM, 2017

Grafik 3 Keberadaan Sekolah yang Siswanya Sering Melakukan Tawuran Pelajar menurut Kabupaten/Kota

Data di atas memperlihatkan bahwa tindakan tawuran antarpelajar umumnya terjadi di wilayah perkotaan atau semiperkotaan, sedangkan wilayah yang mayoritas perdesaan, seperti di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo, mempunyai persentase yang kecil. Berdasarkan teori *Differential Opportunity System* yang dikemukakan oleh R.A. Cloward dan L.E. Ohlin (dalam Sarwirini, 2011: 247-248), penyimpangan di suatu wilayah perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan yang legal maupun yang ilegal. Manakala kesempatan untuk memperoleh yang legal terblokir, maka tindak kriminal pun mungkin terjadi sehingga kecenderungan keterlibatan pada penggunaan narkoba atau dengan kekerasan juga dapat terjadi. Subbudaya yang mungkin terjadi, menurut Cloward dan Ohlin, dikelompokkan menjadi tiga bentuk. Pertama adalah *criminal sub-cultur*, yaitu bentuk-bentuk perilaku geng yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda. Kedua adalah *conflict sub-cultur*, yaitu bentuk geng yang berusaha mencari status menggunakan kekerasan. Ketiga adalah *reatreatist sub-cultur*, yaitu bentuk

geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan obat atau narkoba atau sejenisnya.

Kasus kekerasan geng sekolah juga dipengaruhi oleh peran teman sebaya dan peran alumni. Hasil wawancara mendalam dengan salah satu mantan anggota geng sekolah swasta di Yogyakarta menyebutkan bahwa awal mula ia mengikuti geng adalah karena dorongan dari teman-temannya. Mengikuti geng menjadi sebuah keharusan sebagai wujud aktualisasi diri. Faktor kakak kelas dan alumni juga merupakan faktor kunci untuk mendorong anggota geng melakukan aksi kekerasan (Anjari, 2012: 35). Aksi kekerasan ini diharapkan dapat menjadikan geng mereka lebih populer dan disegani walaupun harus melukai, bahkan sampai membunuh orang lain. Doktrin dari kakak kelas dan alumni menyebabkan siswa percaya bahwa hal tersebut benar.

Status tinggi dalam geng sekolah didasarkan pada anggota geng yang paling berani dan sadis. Untuk itu, tidak jarang saat melakukan aksi tawuran atau aksi yang lain, mereka dengan sadar merekamnya dalam bentuk video atau minimal menyampaikannya

MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA

dalam media sosial (terutama pada grup whatsapp kelompok mereka).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yang pernah menjadi pimpinan gang pelajar di era 1990-an (geng Joxzin) dan sekarang menjadi pembina geng pelajar, pergeseran motif pelaku tawuran lebih pada faktor pencarian status dalam kelompok geng tersebut atau yang disebut dengan *golek alem*. Oleh karena itu, dalam era digital saat ini peran media sosial, terutama Facebook, youtube, dan whatsapp, sangat penting.

Maraknya penggunaan media sosial tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pergeseran budaya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Generasi saat ini, terutama pelajar SMA, sangat lekat dengan *mobile internet*, bahkan telah masuk dalam kategori ketergantungan. Lekatnya mereka dengan gawai ditenggarai sebagai salah satu penyebab masifnya aksi *klithih* di Yogyakarta.

“Saya pernah lihat sendiri, anak didik saya sedang asik menggerombol lihat video tawuran. Mereka seperti termotivasi dengan aksi-aksi tawuran yang di-upload di video terutama alat yang digunakan dalam aksi tawuran” (informan pembina geng pelajar di Yogyakarta).

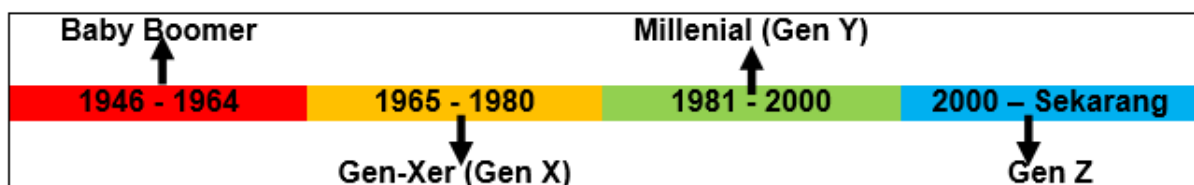
Menurut pakar demografi, Cohort, generasi yang lahir tahun 1981 – 2000 atau sekarang yang berusia 16 - 36 tahun masuk dalam kategori generasi milenial (dalam Ali, dkk.,

2016: 13-15). Ciri utama generasi milenial itu adalah tingkat keterpaparan mereka pada sosial media, meluasnya internet, dan munculnya ponsel pintar. Ketiga hal tersebut sangat memengaruhi pola pikir, nilai, dan perilaku yang dianut.

Dalam menghadapi generasi milenial ini, maka yang perlu diperhatikan adalah cara memanfaatkan teknologi informasi agar lebih banyak memberikan nilai positif dibandingkan dengan negatifnya. Guna menghindari dampak negatif yang muncul, perlu ditanamkan pondasi yang kuat dalam keluarga, terutama dalam hal pengasuhan. Tidak jarang terlihat bahwa meskipun secara fisik, orang tua dekat dengan anak, tetapi yang terjadi adalah mereka berjauhan karena kurangnya perhatian satu sama lain. Mereka asyik dengan dirinya sendiri sambil memainkan ponsel pintarnya. Ciri khas inilah yang muncul dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hal yang sama juga terjadi dalam relasi sosial pada masyarakat yang telah mulai renggang akibat dari ketergantungan mereka pada ponsel pintar.

Relasi sosial secara tatap muka dengan masyarakat di lingkungan kurang begitu terasa jika dibandingkan dengan relasi secara digital. Dampak yang nyata dari kehidupan yang mulai berubah ini adalah hilangnya peran masyarakat dalam mengontrol anggota dalam masyarakat tersebut. Jika dulu masih dapat terlihat tetangga yang menegur tetangganya karena anaknya berperilaku menyimpang, saat ini hal itu jarang terjadi.

Tabel 2 Teori Cohort tentang *Phase of Demographic Group*



Sumber: Cohorts dalam Ali, 2016.

Tabel 3 Pergeseran Budaya dalam Relasi Sosial

Pergeseran Budaya	Pertanian	Industri	Milenial
Relasi dalam keluarga	Kuat	Lemah	Sangat lemah
Relasi sosial/lingkungan	Kuat	Mulai memudar	Sangat lemah (lebih dekat dengan dunia maya)

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Peran Orang Tua (Keluarga) dalam Pengasuhan Anak pada Generasi Milenial

Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama yang didapatkan oleh seorang anak. Sifat dan perilaku seorang anak ditentukan oleh pembelajaran pertama mereka yang melibatkan keluarga. Oleh karena itu, keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran utama dalam pembentukan mental seorang anak. Peran orang tua terhadap anak di dalam keluarga adalah sebagai motivator. Orang tua harus senantiasa memberikan dorongan terhadap anak untuk berbuat kebaikan, termasuk dalam hal menuntut ilmu pengetahuan. Peran selanjutnya adalah sebagai fasilitator. Orang tua harus senantiasa memberikan fasilitas bagi kebutuhan anak yang berupa sandang, pangan, dan papan, termasuk kebutuhan pendidikan. Selanjutnya orang tua harus dapat menjadi mediator yang bertindak sebagai mediasi dalam hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan, terutama hubungan dengan sekolah (Makmun dan Abin, 1999: 40-43).

Peran orang tua dalam hal pendidikan anak telah seharusnya berada pada urutan pertama. Hal itu karena orang tua lah yang paling mengerti sifat baik dan buruk seorang anak, termasuk hal yang mereka sukai dan tidak sukai. Hasil wawancara mendalam dengan salah satu orang tua siswa SMA favorit di Yogyakarta menyatakan bahwa

ketika anak telah menginjak usia remaja, maka peran orang tua dalam pembelajaran harus ditingkatkan dari segi pengawasan dan pengarahan secara rutin. Orang tua juga harus selalu memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral, dan tingkah laku anak di lingkungan sekolah dengan selalu berkomunikasi dengan wali kelas. Usia remaja merupakan masa transisi seseorang dari anak-anak menuju dewasa dengan kondisi emosi jiwa yang sangat labil. Berbagai perubahan akan tampak pada masa itu, termasuk dalam cara berpikir ketika seorang anak remaja akan berusaha menunjukkan siapa dirinya, cenderung egois, dan ingin terlihat 'lebih' di lingkungannya. Ketika seorang anak mulai ingin menunjukkan eksistensinya, maka orang tua harus mengarahkan ke jalur yang benar. Salah satunya adalah ke ranah akademik sehingga seorang anak akan lebih dikenal karena prestasinya.

Remaja yang tidak diarahkan oleh orang tuanya akan lepas kontrol dan cenderung berbuat semaunya. Hasil wawancara dengan beberapa orang tua siswa SMK di Yogyakarta menunjukkan bahwa lemahnya kontrol orang tua sangat berpengaruh pada anak. Salah satu orang tua siswa pelaku tawuran menyebutkan bahwa ia memberikan kebebasan bagi anaknya untuk melanjutkan sekolah atau mau langsung bekerja. Ketika anak memilih bersekolah, orang tua juga memberi kebebasan kepada anaknya dalam

**MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH
DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA**

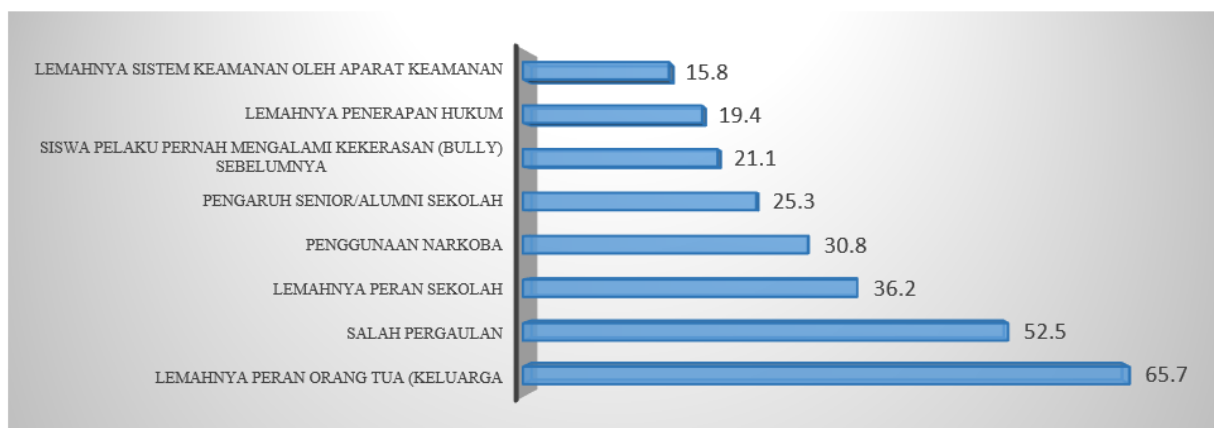
memilih sekolah. Orang tua juga tidak mengetahui dengan siapa anaknya bergaul sehari-hari. Orang tua siswa yang lain, bahkan tidak mengetahui aktivitas anaknya di sekolah karena bagi mereka, yang penting adalah dapat membiayai sekolah dan kenyataan bahwa si anak berangkat sekolah. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan kemandirian dari orang tua kepada anaknya. Lemahnya kontrol orang tua pada masa pencarian jati diri seorang remaja mengakibatkan perilaku remaja tersebut sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan luar yang tentu saja lebih banyak dampak negatifnya.

Proses pencarian jati diri yang tidak diarahkan oleh orang tua akan menyebabkan ketidakmampuan remaja dalam mengontrol diri sehingga gagal memilih cara untuk menunjukkan eksistensinya. Sifat remaja yang labil dan mudah goyah menyebabkan mereka mudah merasa minder dan malu jika tidak mengikuti arus perkembangan zaman dan akan menjadi objek persekusi teman sebayanya. Oleh karena itu, untuk membuktikan eksistensinya, remaja berinisiatif mencoba hal yang dianggapnya sesuai dengan perkembangan zaman tanpa memedulikan dampaknya. Remaja masa

kini yang hidup dalam kehidupan modern dan global sangat mudah mendapatkan akses terhadap banyak hal. Hal ini dapat menyebabkan remaja mudah terjerumus dalam pergaulan modern yang mengarah pada tindakan negatif (Basri, 1996: 57).

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil temuan data yang menyatakan bahwa tindakan negatif yang dilakukan oleh pelajar dalam bentuk tawuran sangat dipengaruhi oleh lemahnya peran orang tua (65,7 persen), salah pergaulan (52,5 persen), lemahnya peran sekolah (36,2 persen), dan faktor narkoba (30,8 persen) sebagaimana yang digambarkan dalam Grafik 4.

Lemahnya peran orang tua dalam pengasuhan pada era generasi milenial disebabkan oleh terputusnya pola komunikasi antara anak dan orang tua. Berdasarkan dari teori Cohort, orang tua yang memiliki anak usia SMA sekarang ini umumnya berasal dari era *Gen-Xer* atau generasi X. Mereka adalah generasi yang masih memiliki pola pikir konservatif meskipun telah masuk era transisi modernisasi teknologi informasi (Ali, 2016: 15). Terputusnya pola komunikasi inilah yang menyebabkan kehadiran orang tua kurang dirasakan oleh anak. Relasi sosial dalam



Sumber: PSKK UGM, 2017

Grafik 4 Pendapat Masyarakat terhadap Munculnya Tawuran Pelajar di Yogyakarta

keluarga dalam era digital sangat tergantung pada penggunaan ponsel pintar. Sering kali komunikasi antara orang tua dengan anak tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi digantikan dengan ponsel pintar (komunikasi tak langsung). Pola komunikasi dalam keluarga yang seperti ini pasti menimbulkan perbedaan dalam interaksinya karena lebih individualis. Dampak dari pola interaksi ini adalah tidak terjalinnnya kedekatan emosional antara orang tua dan anak.

Peran orang tua mutlak diperlukan dalam membimbing dan memberikan perhatian pada anak. Orang tua harus menemani, memantau, dan mengarahkan remaja agar mereka dapat melewati masa labil dan terhindar dari pengaruh negatif. Hal ini sesuai dengan data hasil survey yang menunjukkan bahwa 25,3 persen masyarakat menyatakan penanganannya terhadap tawuran pelajar dilakukan dengan meningkatkan peran keluarga, terutama orang tua. Sementara itu, 18 persen masyarakat berpendapat penanganannya

tawuran pelajar dilakukan dengan cara memberikan pembinaan kepada siswa yang dilakukan oleh sekolah dan masyarakat. Pendapat masyarakat yang lain adalah dengan menanamkan pendidikan agama dan budi pekerti (13,4 persen), serta peningkatan kesadaran dan penerapan hukum secara tegas (11,7 persen).

Peningkatan peran keluarga pada era digital dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya adalah orang tua harus melek teknologi, terutama internet karena yang terjadi saat ini adalah orang tua dianggap ketinggalan zaman atau kolot karena tidak mengenal internet. Tidak jarang, bahkan orang tua belajar internet dari anak-anak mereka. Dampak dari ketidaktahuan orang tua terhadap teknologi informasi itu menyebabkan mereka tidak mengetahui situs yang diakses oleh anak dan teman bergaul anak di dunia maya. Anak pun sekarang lebih banyak curhat lewat media sosial dibandingkan dengan bicara langsung ke orang tua.



Sumber: PSKK UGM, 2017

Grafik 5 Pendapat Masyarakat terhadap Penanganan Masalah Tawuran Pelajar di Yogyakarta

MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA

Upaya Membangun Relasi Digital antara Siswa, Orang Tua, dan Sekolah

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal tidak saja memiliki fungsi pengajaran, tetapi juga mengemban fungsi pendidikan. Salah satu komponen pendukung keberhasilan sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikan adalah adanya guru yang dapat membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua siswa (Hidayat, 2013: 92). Komunikasi yang efektif dan akrab antara guru dan siswa telah mulai dibangun oleh salah satu SMA melalui FKGM (Forum Komunikasi Guru dengan Murid). Melalui forum ini, diharapkan siswa dapat merasakan kenyamanan untuk berbagi dengan guru. Rasa nyaman itu akan berdampak pada keterbukaan siswa. Hal yang sama juga telah diterapkan oleh dua SMA lain dalam rangka menangani kasus tawuran dan *klithih*. Pendekatan personal dengan siswa akan sangat bermanfaat dalam memahami keinginan sebenarnya yang dimiliki oleh siswa.

Pihak sekolah juga diharapkan mampu menjalin relasi yang baik tidak hanya dengan siswa saja, tetapi juga dengan orang tua siswa. Relasi yang baik antara orang tua siswa dengan sekolah dapat dimulai dari awal proses seleksi siswa melalui wawancara dengan orang tua (Baedowi, dkk., 2015: 66). Proses ini telah diterapkan juga di salah satu SMA sebagai tahap awal membangun relasi dengan orang tua dan untuk mengenal karakter siswa. Wawancara merupakan alat seleksi yang cukup penting dan proses bertukar informasi yang baik (Rohmawati, 2015: 15-16). Melalui wawancara antara sekolah dengan orang tua, diharapkan akan terbangun komunikasi awal yang baik. Lebih lanjut proses wawancara dapat digunakan sebagai momentum penyatuan pemikiran bahwa mendidik siswa merupakan tanggung

jawab bersama antara sekolah dengan orang tua. Proses wawancara dengan orang tua juga akan memberikan informasi mengenai karakteristik siswa yang akan bermanfaat bagi sekolah dalam memahami siswa yang bersangkutan. Proses ini juga dapat memberikan gambaran visi dan misi sekolah kepada orang tua sehingga orang tua memahami program-program sekolah. Pemahaman yang baik terhadap program sekolah akan membantu orang tua berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerimaan siswa yang disertai wawancara dengan orang tua dinilai mampu menjadi salah satu cara dalam menangani kenakalan siswa (hasil wawancara mendalam dengan guru BK salah satu sampel SMA, 20 Juli 2017, pukul 07.16 WIB). Proses wawancara yang dilakukan akan memberikan informasi kepada pihak sekolah mengenai riwayat siswa yang bersangkutan. Informasi apakah siswa yang bersangkutan pernah terlibat kasus kekerasan atau tidak akan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi hal tersebut terulang kembali di SMA. Ketika informasi ini telah diketahui oleh pihak sekolah, maka pihak sekolah dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan, seperti dengan melakukan pengawasan lebih kepada siswa yang bersangkutan dan melaksanakan komunikasi rutin dengan pihak orang tua siswa.

Proses seleksi masuk dengan wawancara terhadap orang tua dan siswa serta tes psikologi telah diterapkan di salah satu SMA yang tidak memiliki riwayat kasus kekerasan. Hasil tes psikologi dibahas juga dengan orang tua siswa sebagai dasar menentukan arah program pengembangan siswa di sekolah. Orang tua dapat juga memahami potensi anak mereka tanpa harus memaksakan kehendaknya kepada anak. Hal ini sangat

penting karena pola asuh yang otoriter hanya akan berdampak negatif terhadap anak. Anak dengan pola asuh otoriter akan memiliki karakteristik suka melanggar norma, gemar menantang, berkepribadian lemah, dan menarik diri dari lingkungan sekitar (<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309077/penelitian/ARTIKEL+POLA+ASUH.pdf>).

Studi literatur menunjukkan bahwa proses pendidikan yang efektif membutuhkan beberapa konsekuensi, salah satunya terkait dengan partisipasi orang tua. Manfaat dari partisipasi efektif orang tua pada berbagai kegiatan sekolah adalah akan meningkatkan prestasi akademik siswa, menyebabkan siswa berperilaku positif, mengurangi sikap anti sosial siswa, dan menjamin keberlangsungan studi siswa ke jenjang yang lebih tinggi (Vahedi, 2010: 359-360).

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan siswa adalah harmonisasi komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Guru sebagai orang tua siswa di sekolah tidak

boleh hanya berkomunikasi dengan orang tua siswa ketika awal tahun ajaran baru dan saat pembagian rapor saja. Pertemuan-pertemuan tatap muka maupun komunikasi berbasis teknologisangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengomunikasikan perkembangan siswa. Melalui komunikasi tersebut juga, pihak sekolah dapat mengedukasi orang tua terkait cara memperlakukan anaknya yang telah remaja sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara orang tua dengan anak. Sebaliknya, pihak orang tua juga dapat memberikan informasi terkait kondisi anak di rumah. Komunikasi dua arah semacam inilah yang dapat dijadikan salah satu cara dalam mengatasi fenomena kekerasan/tawuran siswa SMA (Basri, 2015: 22). Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya beberapa SMA di Kota Yogyakarta telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan orang tua siswa, tetapi masih terdapat beberapa SMA yang mengadakan pertemuan tersebut terbatas pada awal tahun ajaran dan saat penerimaan rapor.

*MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH
DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA*

Tabel 4 Perbandingan Nilai yang Dikembangkan Sekolah antara Sekolah yang Memiliki Budaya Kekerasan dengan yang Tidak Memiliki Budaya Kekerasan

SMA	Budaya Kekerasan	Nilai/ Upaya Pencegahan/ Upaya Penanggulangan
SMA A	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Proses seleksi masuk siswa dilaksanakan dengan ketat dan disertai wawancara dengan orang tua siswa - Memfasilitasi kreativitas siswa dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler - Kegiatan bela negara dengan Rindam sebagai rangkaian Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) - Komunikasi yang erat antara sekolah dengan orang tua siswa (pertemuan tatap muka, presensi berbasis teknologi yang terintegrasi dengan ponsel orang tua siswa), pengajian
SMA B	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalin komunikasi efektif dan akrab antara guru dengan siswa melalui FKGM (Forum Komunikasi Guru Murid) - Menjalin komunikasi dengan orang tua siswa melalui pertemuan-pertemuan, grup WA - Memiliki Tim Kominfo yang bertugas memberikan informasi dan melayani pertanyaan-pertanyaan orang tua siswa melalui media sosial - Presensi menggunakan sidik jari yang terintegrasi dengan nomor ponsel orang tua (saat ini hanya sidik jari biasa) - Pemasangan CCTV di berbagai tempat - Pembinaan dari lembaga anti teror, kepolisian, psikolog, PKBI, dll. - Presensi menggunakan kartu (sekarang tidak digunakan lagi)
SMA C	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerangan siswa SMA swasta - Senioritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan personal tanpa menyalahkan dan tidak mengeluarkan siswa yang terlibat kasus kekerasan (membangun saling percaya antara siswa dengan guru) - Memberlakukan penghapusan <i>negative point</i> dengan poin prestasi - Pendekatan dengan orang tua melalui pertemuan-pertemuan, komunikasi melalui ponsel, kunjungan rumah, pengajian kelas - Menyediakan berbagai jenis ekstrakurikuler - Menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah - Presensi sidik jari - Pemasangan CCTV di seluruh lingkungan sekolah

SMA D	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Klithih</i> - Sindikat geng sekolah 'Ranger' - Senioritas - Tawuran dengan siswa sekolah lain yang lewat depan sekolah dengan <i>mbleyer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang CCTV di area depan sekolah yang biasa digunakan untuk nongkrong - Melakukan pendalaman kasus untuk mencari akar permasalahan dan solusi - Orang tua siswa dan siswa diminta membuat surat pernyataan bahwa jika hal serupa terulang maka bersedia untuk dikeluarkan dari sekolah (kesempatan diberikan 1x) - Melakukan wawancara kepada orang tua siswa dan siswa saat proses penerimaan siswa - Melakukan analisis siswa dengan potensi penyimpangan bawaan dari SMP (siswa yang dari SMP telah terindikasi melakukan tawuran akan fokus untuk dibina dan diawasi) - Orang tua dan siswa diminta menandatangani surat kesanggupan bermaterai terkait kesanggupan menaati peraturan sekolah - Sosialisasi peraturan sekolah saat tahun ajaran baru dan membuat buku kecil yang berisi peraturan sekolah kepada siswa dan orang tua - Membentuk Tim Tata Tertib Sekolah - Memberlakukan sistem <i>negative point</i> - Pemanggilan orang tua ke sekolah ketika siswa mendapat <i>negative point</i> 30-50 dan melakukan pembinaan - Menjalin komunikasi melalui pertemuan-pertemuan dengan orang tua siswa
SMA E	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus <i>klithih</i> nongkrong malam dengan membawa senjata tajam - Geng sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memanggil orang tua siswa yang bersangkutan ke sekolah - Memfasilitasi gladi rohani dua malam siswa dengan orang tua - Orang tua-siswa membuat surat perjanjian dengan sekolah dan memberikan kesempatan 1x lagi untuk memperbaiki diri; jika tidak dapat diperbaiki, maka dikeluarkan dari sekolah - Melakukan kerja sama dengan kepolisian untuk membina siswa dan memberikan materi terkait bahaya kekerasan - Melakukan pelatihan kepemimpinan di Korem - Menanamkan nilai-nilai cinta kasih - Melakukan komunikasi dengan orang tua siswa melalui pertemuan-pertemuan, via telepon, kunjungan rumah, mengundang dan membina induk semang indekos

**MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH
DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA**

SMA F	Kasus tawuran	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan secara personal - Memberlakukan <i>negative point</i>, dan <i>reward</i> bagi murid dengan <i>attitude</i> positif - Komunikasi dengan orang tua siswa melalui pertemuan tatap muka, via telepon, grup WA, dan pesan singkat perkembangan siswa di balik kertas ujian siswa. Dulu juga ada komunikasi berbasis aplikasi, tetapi sekarang tidak lagi karena kendala orang tua siswa yang kurang familiar dengan aplikasi itu - Memanggil orang tua untuk berdiskusi terkait penanganan siswa yang terlibat <i>klithih</i> termasuk juga memilihkan sekolah yang lebih cocok dengan siswa yang bersangkutan
SMA G	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Klithih</i> - Tawuran 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun keakraban antara guru dengan siswa agar guru dapat mengenali karakter siswa, dibentuk juga grup WA/LINE antara guru dengan siswa - Komunikasi dengan orang tua dilakukan melalui pertemuan tatap muka, surat, telepon, grup WA, kunjungan rumah bagi siswa yang membutuhkan penanganan khusus - Pemanggilan orang tua ke sekolah - Menjalin kerja sama dengan Polresta untuk memberikan materi terkait bahaya <i>klithih</i> dan geng pelajar kepada siswa dan orang tua siswa - Membentuk Satgas sekolah yang mengawasi dan berpatroli di sekeliling sekolah dan memastikan bahwa setelah jam ekstrakurikuler berakhir, tidak boleh ada siswa yang nongkrong di sekolah - Melarang alumni untuk nongkrong di sekolah - Memberlakukan <i>point negative</i> dan surat peringatan 1, 2, dan 3

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Banyak penelitian menegaskan pentingnya komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Faktor penghambat komunikasi ini umumnya adalah tingkat kesibukan orang tua. Oleh karena itu, komunikasi berbasis teknologi menjadi satu dari sekian alternatif yang efektif untuk digunakan. Aplikasi berbasis teknologi dapat menampung aspirasi orang tua dan juga aspirasi siswa terhadap sekolah dengan lebih leluasa. Komunikasi berbasis teknologi juga

sangat membantu sekolah meminimalisasi keterbatasan komunikasi akibat jam belajar-mengajar serta keterbatasan komunikasi dengan orang tua yang berada di luar kota atau luar negeri (Clay, 2005: 123).

Hasil penelitian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa beberapa SMA telah mencoba menyalahi keterbatasan waktu komunikasi akibat jam belajar-mengajar dengan memanfaatkan teknologi, seperti membuat

grup WA, LINE, dan komunikasi melalui telepon. Ada beberapa SMA yang juga telah memanfaatkan CCTV untuk memantau aktivitas siswa mereka. CCTV juga digunakan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan budaya nongkrong siswa di lingkungan sekitar sekolah, seperti di salah satu SMA negeri di Yogyakarta. Pemanfaatan CCTV ini terbukti mampu menghilangkan kebiasaan nongkrong siswa di SMA tersebut.

Selain penggunaan CCTV, beberapa sekolah juga telah memanfaatkan model presensi berbasis teknologi. Presensi berbasis kartu pernah dilakukan di salah satu SMA yang menjadi sampel penelitian walaupun saat ini telah berganti dengan sistem presensi sidik jari. Presensi sidik jari telah dilakukan di tiga SMA sampel penelitian. Sistem ini dirasa mampu meningkatkan kedisiplinan siswa dan dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan bukti dirasa sangat penting karena ada beberapa orang tua yang tidak percaya jika anaknya tidak sampai ke sekolah. Hal-hal semacam ini sangat penting untuk meminimalisasi kesalahpahaman antara sekolah dengan orang tua siswa.

Perbedaan penggunaan sistem sidik jari yang dilakukan antara sekolah yang tidak pernah ada kasus kekerasan dengan sekolah yang pernah ada kasus kekerasan terletak pada integrasi sistem presensi sidik jari dengan nomor telepon orang tua. Sekolah yang tidak pernah ada kasus kekerasan justru telah menerapkan sistem presensi sidik jari yang terintegrasi dengan nomor telepon orang tua walaupun pemanfaatannya masih perlu dibenahi dalam beberapa hal. Salah satu SMA dengan riwayat tanpa kasus kekerasan juga telah membentuk tim khusus yang menangani sistem informasi berbasis teknologi yang disebut Kominfo. Sistem ini dioperasikan oleh staf khusus yang bertugas

mengelola *website*, media sosial sekolah, serta sistem presensi sidik jari siswa untuk merekap kehadiran siswa, ketidakhadiran siswa, dan keterlambatan siswa. Staf ini juga bertugas menjawab seluruh pertanyaan dan masukan dari pihak orang tua dan siswa terkait dengan kemajuan sekolah. Melalui sistem ini, diharapkan orang tua dapat dengan mudah mengetahui keberadaan anak mereka. Aplikasi akan mengirimkan pesan kepada orang tua apakah anak mereka telah sampai di sekolah, apakah terlambat, atau apakah mereka tidak masuk sekolah. Sistem ini diharapkan untuk memudahkan kontrol orang tua dan sekolah terhadap siswa/anak.

Komunikasi personal antara guru (sekolah) dengan siswa dan orang tua pada era digital saat ini dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi, misalnya dengan memanfaatkan media sosial untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini akan sangat efektif untuk menghindari kekakuan dalam proses komunikasi di antara mereka.

Dampak positif dari dunia digital dalam hal pendidikan adalah mudahnya akses informasi dengan biaya murah dalam memperoleh informasi pendidikan. Berdasarkan penelitian *Digital Citizenship Safety among Children and Adolescents in Indonesia* yang dilakukan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) pada 2014, ditemukan fakta bahwa dari 30 juta anak-anak dan remaja pengguna internet di Indonesia, ada tiga motivasi utama untuk mengakses internet, yaitu mencari informasi, untuk terhubung dengan teman (lama dan baru), serta hiburan. Pencarian informasi yang dilakukan sering disebabkan oleh tugas-tugas sekolah, sedangkan penggunaan media sosial dan konten hiburan didorong oleh kebutuhan pribadi. Penelitian terhadap pola komunikasi anak dan remaja melalui internet mengungkapkan bahwa mayoritas

Tabel 5. Perbedaan Pola Komunikasi Tatap Muka dan Gigital

Perbedaan	Tatap muka	Digital
Model komunikasi	Formal	Personal
Waktu pertemuan	Ditentukan	Setiap saat
Biaya	Mahal	Murah
Pemantauan perkembangan siswa	Reguler	Setiap saat

Sumber: Hasil Analisis, 2017

komunikasi mereka dilakukan dengan teman sebaya, komunikasi dengan guru, dan komunikasi dengan anggota keluarga yang juga cukup signifikan (<http://geotimes.co.id/kolom/kolaborasi-digital-orangtua-dan-sekolah/>).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja relatif memiliki korelasi dengan pendidikan di rumah maupun sekolah. Ini modal sosial yang harus dioptimalkan untuk membangun kolaborasi digital antara orangtua dan guru dalam mengedukasi anak (Fatimah, 2016). Untuk menciptakan kolaborasi digital antara orangtua (keluarga) dan sekolah (guru), ada beberapa strategi yang dijalankan. Diantaranya adalah memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan pola komunikasi, relasi, dan interaksi antara orangtua dan guru. Di era digital, relasi keduanya berpotensi merenggang, jika tidak ditunjang oleh sistem komunikasi, relasi, dan interaksi yang berbasis digital. Membangun sistem berbasis digital sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.

Komunikasi antara orang tua dengan sekolah juga dapat dibina melalui *home visit*. Kegiatan *home visit* merupakan satu dari beberapa indikator adanya relasi yang baik antara orang tua dengan sekolah (Hasbullah, 2005: 91-94). Sayangnya, *home visit* yang

dilakukan beberapa sekolah dilakukan ketika siswa sudah melakukan kesalahan/ tindak kekerasan. Beberapa sekolah melakukan *home visit* ketika siswa sering tidak masuk sekolah, terlibat kasus kekerasan, dll. Terdapat SMA yang tidak memiliki riwayat kasus kekerasan melakukan *home visit* dengan bentuk pengajian kelas yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Pengajian ini mampu mendekatkan hubungan antara sekolah dengan orang tua dan sekolah dengan siswa. Selain itu, melalui pengajian ini diharapkan dapat memberikan informasi keagamaan yang dapat membentengi siswa dari hal negatif termasuk terlibat kasus tawuran dan *klithih*.

Hasil penelitian melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan diketahui bahwa pelaku tawuran dan *klithih* umumnya adalah mereka dengan pengawasan minim dan ada beberapa yang tinggal di indekos. Minimnya pengawasan dan kepedulian dari pemilik dan penjaga indekos akan sangat memengaruhi perilaku anak indekos. Pemberlakuan jam malam akan sangat bermanfaat dalam rangka mencegah kasus *klithih* yang umumnya terjadi di malam hari. Salah satu SMA mengaku telah mulai melaksanakan pembinaan terhadap induk seman indekos sebagai salah satu wujud pencegahan kasus *klithih*. Induk semang indekos sebagai pemilik dan pengelola indekos

juga bertanggung jawab ikut mengawasi anak indeksosnya. Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia menyebutkan bahwa kekerasan anak adalah krisis yang hanya akan berhenti jika semua pihak dari orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama melindungi anak dari bahaya kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban (Lentera Jiwa, 2016: 21).

Informasi keagamaan juga diberikan sebagai salah satu cara menangani kasus *klithih*. Ketika terjadi kasus *klithih* yang melibatkan siswanya, SMA tersebut memanggil pelaku dan kedua orang tua mereka untuk sama-sama melakukan gladi rohani. Gladi rohani dilaksanakan selama dua malam sebagai salah satu cara untuk mengembalikan nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri siswa. Informasi keagamaan seperti ini hanya diterapkan pada sampel sekolah yang berbasis keagamaan saja. Informasi keagamaan sangat bermanfaat untuk menangani kasus kekerasan siswa karena informasi keagamaan dapat menjadikan siswa memiliki pengendalian diri yang lebih baik (Abror, 2015: 65-66).

Rata-rata sekolah yang menjadi sampel penelitian akan memberikan kesempatan pada siswanya untuk memperbaiki kesalahan dengan memberi satu kali kesempatan lagi. Akan tetapi, jika hal serupa terulang kembali, maka siswa akan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Mengeluarkan siswa dari sekolah bukan tidak mungkin justru menambah masalah baru. Pihak sekolah takut siswanya akan terpengaruh oleh siswa yang dikeluarkan karena pertemanan antara anak yang dikeluarkan dengan temennya yang masih bersekolah di sekolah tersebut masih terjalin. Kekhawatiran yang lain adalah terkait penggunaan nama sekolah mereka oleh mantan siswa tersebut jika melakukan tindakan anarkis. Hal seperti ini menunjukkan bahwa mengeluarkan siswa dari sekolah bukan

solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tawuran atau *klithih*. Siswa yang bersangkutan justru akan merasa 'dibuang' dan justru bertindak lebih nekat lagi. Umumnya siswa yang bermasalah dan dikeluarkan dari sekolah akan dipindahkan ke sekolah dengan kualitas yang lebih rendah. Teman-teman yang lebih buruk akan memperparah kondisi siswa yang dikeluarkan tersebut karena lingkungan akan semakin tidak mendukung.

Narapidana kasus kekerasan yang berusia 18 tahun di Lapas Wirogunan (wawancara dilakukan pada 24 Juli 2017, Pukul 10:23 WIB) menuturkan bahwa ia telah tiga kali pindah sekolah. Kepindahannya tersebut karena dikeluarkan dari sekolah sebagai sanksi terlibat tindak kekerasan dan adanya tato di tubuhnya. Setelah dikeluarkan dari sekolah lama dan pindah ke sekolah baru, siswa tersebut masih bergabung di geng sekolah lama, bergaul dengan teman yang sama, dan tetap memakai identitas sekolah lama ketika melaksanakan tindak kekerasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa menempatkan siswa sebagai pihak yang bersalah dan memojokkannya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Budaya memojokkan siswa hanya akan semakin membuat siswa menjauhi guru, tidak memiliki kepercayaan kepada guru, dan akan mengulang hal yang sama (Chairani, 2009: 148).

Hasil wawancara dengan salah satu kepala sekolah menyebutkan bahwa dulu ada siswa sekolah tersebut yang terlibat kasus tawuran. Penanganan yang dilakukan pihak sekolah adalah tidak mengeluarkan siswa yang bersangkutan. Sekolah juga tidak meminta siswa tersebut menandatangani surat perjanjian apa pun. Sekolah lebih menekankan pada pendekatan personal serta merangkul siswa dan orang tua siswa untuk sama-sama memperbaiki diri. Hal yang telah terjadi sebaiknya tidak perlu diungkit kembali

MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA

dan sebaiknya dijadikan pembelajaran. Cara sekolah menangani kasus tersebut terbukti mampu mengurangi, bahkan menghilangkan kasus serupa sampai saat ini.

Keinginan untuk dimengerti menjadikan siswa SMA terkadang berperilaku negatif sebagai wujud protes terhadap lingkungan sekitarnya. Sekolah dan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perkembangan siswa harus mampu memahami siswa, termasuk ketika siswa berbuat kesalahan (dalam hal ini terlibat kasus tawuran dan *klithih*). Memberikan poin negatif ketika bersalah tanpa memberikan poin positif ketika berprestasi seakan menunjukkan ketidakadilan bagi siswa. Siswa akan merasa dipersalahkan atas semua hal yang telah terjadi tanpa diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Salah satu sampel SMA memberikan poin positif kepada siswanya yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun nonakademik. SMA tersebut, bahkan akan memberikan pengurangan poin negatif dari perolehan poin positif tersebut.

Masa SMA merupakan masa ketika mereka membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar dan masa penuh dengan kreativitas serta energi. Kreativitas dan energi ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika tidak diberikan wadah. Sekolah harus berupaya memfasilitasinya dengan menyediakan berbagai ekstrakurikuler. Siswa dapat memilih berbagai jenis ekstrakurikuler sesuai dengan minat mereka. Salah satu sampel SMA menerapkan kewajiban kepada siswanya untuk mengikuti minimal satu jenis ekstrakurikuler.

Siswa SMA saat ini menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Berbagai ancaman dan manfaat kemajuan tersebut dapat datang secara bersamaan, bergantung kepada daya tahan dari setiap individu (siswa) yang

bersangkutan. Untuk dapat bertahan dalam kemajuan zaman yang sekarang, setiap individu (siswa) harus dibekali dengan penguatan karakter. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui beberapa sekolah telah menerapkan upaya pendidikan karakter melalui kerja sama dengan Kodim dan Korem. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, kedisiplinan, dan memperkuat karakter mereka. Akan tetapi, hasil penelitian belum menemukan informasi bahwa pendidikan karakter telah dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran tersendiri.

Upaya pencegahan kasus kekerasan dan *klithih* di kalangan siswa SMA juga dapat dilakukan dengan membangun komunikasi dan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat. Jika dilihat, rata-rata kejadian tawuran siswa terjadi di luar kegiatan belajar-mengajar dan di luar lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap potensi kejadian tawuran sangat penting (<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/17/13560241/cegah-tawuran-polres-jaksel-bubarkan-pelajar-yang-nongkrong-di-pinggir>). Masyarakat yang berdomisili di daerah rawan (daerah yang biasa digunakan untuk kegiatan nongkrong) dapat melaporkan aktivitas-aktivitas anarkis kepada pihak kepolisian. Lebih lanjut pihak kepolisian dapat menangani hal tersebut dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan *klithih* harus melibatkan semua pihak, baik itu dari orang tua, sekolah, aparat kepolisian, dan juga masyarakat (Pangestuti, dkk., 2016: 21).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Maraknya aksi tawuran pelajar yang terjadi di Yogyakarta bukanlah sebuah fenomena yang baru.
2. Penyebab utama tindakan tawuran pelajar adalah lemahnya peran keluarga, terutama orang tua dalam pengasuhan anak sehingga menjadikan anak salah dalam bergaul.
3. Peran sekolah, terutama guru BK ataupun wali kelas, diharapkan mampu menerapkan komunikasi efektif dalam mengajarkan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, serta mengubah perilaku negatif siswa.
4. Terjalannya relasi yang baik antara orang tua dan sekolah penting dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan si anak didik, terutama dalam penanganan kekerasan pelajar.
5. Pada era digital sekarang ini, pola komunikasi yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi digital dalam membangun relasi antara siswa, orang tua, serta sekolah dalam melihat dan memantau pendidikan anak.

Daftar Pustaka

- Abror, Ahmad. 2015. *Peran Guru Agama Islam dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Tahun 2015*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Adisty, L. O. 2012. "Peran Masyarakat diperlukan untuk Mencegah Tawuran". <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/25/04393919/Peran.Masyarakat.Diperlukan.untuk.Mencegah.Tawuran>. Diakses pada Selasa, 1 Agustus 2017, Pukul 08.15 WIB.
- Ainin, Luthfiah Nur. 2014. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kenakalan Remaja di RW V Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo". *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan Stikes Dian Husada Mojokerto* 6(1).
- Ali, Hasanuddin, dkk. 2016. *INDONESIA 2020: The Urban Middle-Class Millennials*. Jakarta: Alfara Research Center.
- Baedowi, Ahmad, dkk. 2015. *Manajemen Sekolah Efektif*. Jakarta: PT. Pustaka Alfabet.
- Vahedi, Majid. 2010. "A Study of Parent's Participation in The High School Administration and its Effect on School Activities". *Procedia Social and Behavioural Sciences* 2: 359-363.
- Basri, Hasan.1996. *Remaja Berkualitas: Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Clay, Susan, Graham. 2005. "Communicating with Parents: Strategies for Teachers". *The School Community Journal*, 117-130.
- Dilogi. 2017. "Bergesernya Makna Klithih ke Arah yang Negatif", <http://dilogi.student.uny.ac.id/2017/03/31/184/>, diakses pada Selasa, 11 Juli 2017, Pukul 10.30 WIB.
- Fatimah. 2016. "Kolaborasi Digital Orangtua dan Sekolah". <https://geotimes.co.id/kolaborasi-digital-orangtua-dan-sekolah/>, diakses pada Sabtu, 15 Juli 2017, Pukul 22.20 WIB.
- Hasan Basri.1996. *Remaja Berkualitas: Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbullah.2005. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hernawan, Arif Koes. 2017. "Kapolda Minta Istilah "Klithih" Dihilangkan". <https://www.gatra.com/nusantara/jawa/250500-kapolda-minta-istilah-klithih-dihilangkan>. diakses pada Selasa, 11 Juli 2017, Pukul 14.00 WIB.
- Iwe. 2012. "Perang antar Geng Pelajar". <http://jogja.tribunnews.com/2012/01/06/ini-data-tawuran-di-kota-yogya>. Diakses pada Selasa, 11 Juli 2017, Pukul 11.00 WIB.

*MEMBANGUN RELASI DIGITAL ANTARA ORANG TUA SISWA DENGAN SEKOLAH
DALAM PENANGANAN TAWURAN PELAJAR DI YOGYAKARTA*

- Jatmika, Sidik. 2010. *Genk Remaja: Anak haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi?* Yogyakarta: Kanisius.
- Kurniawan, Bagus. 2016. "Kapolda DIY: Sepanjang 2016, 43 Kasus Kriminal Didominasi Pelajar". (<http://news.detik.com/berita/d-3382743/kapolda-diy-sepanjang-2016-43-kasus-kriminal-didominasi-pelajar>) diakses pada 11 Juli 2017, pukul 13.00 WIB.
- Lidyasari, Aprilia Tina. t.t. "Pola Asuh Otoratif sebagai Sarana Pembentukan Karakter Anak dalam Setting Keluarga". <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309077/penelitian/ARTIKEL+POLA+ASUH.pdf>. diakses pada 4 Agustus 2017.
- Makmun, Syamsudin Abin. 1999. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. 2002. *Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustika, K. 2009. "Komunikasi interpersonal guru dan orang tua dalam mencegah kenakalan remaja pada siswa SMA Kolombo Sleman". *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7(2):143-152.
- Nailufar, Nibras Nada. 2017. "Cegah Tawuran, Polres Jaksel Bubarkan Pelajar yang Nongkrong di Pinggir Jalan". <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/17/13560241/cegah-tawuran-polres-jaksel-bubarkan-pelajar-yang-nongkrong-di-pinggir>. diakses pada 11 Juli 2017, pukul 15.00 WIB.
- Raharjo, Edzan. 2016. "Kasus Tawuran Pelajar di Yogyakarta Meningkat di Tahun 2016". <https://news.detik.com/berita/d-3383483/kasus-tawuran-pelajar-di-yogyakarta-meningkat-di-tahun-2016>. diakses pada 11 Juli 2017, pukul 14.30 WIB.
- Rohmawati. 2015. *Pelaksanaan Sistem Seleksi Penerimaan Siswa Baru di MA Pembangunan UIN Jakarta*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- S. Hasan, B. 2015. "Fenomena tawuran antar pelajar dan intervensinya". *Jurnal Hisbah* 12(1):1-25.
- Sarwirini. 2011. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya". <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201209442514478516/5.pdf>. Jurnal. PERSPEKTIF XVI(4) Tahun 2011 Edisi September. Diakses pada Minggu, 16 Juli 2017, Pukul 17.24 WIB.
- Syarif, H. 2013. "Pengaruh Kerjasama Orang Tua dan Guru Terhadap Disiplin Peserta Didik". *Jurnal Ilmiah Widya* 1(1): 92-99.
- Sujatmoko, Andrey. 2016. "Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM: di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional". *Jurnal Ilmu Hukum* 2(2). Univ. Padjadjaran.
- Unayah, Nunung, dkk. 2015. "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas". <https://media.neliti.com/media/publications/52810-ID-fenomena-kenakalan-remaja-dan-kriminalit.pdf>, diakses pada Selasa, 11 Juli 2017, Pukul 11.45 WIB.
- Warah, A. 2012. "Tawuran pelajar dalam perspektif kriminologis, hukum pidana, dan pendidikan". *Jurnal Ilmiah Widya* 324:34-40.
- Wicandra, Obed Bima. 2016. "Graffiti di Indonesia: Sebuah Politik Identitas Ataukah Tren? Kajian Politik Identitas pada Bomber di Surabaya". *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana* 8(2).
- Yog, dkk. 2014. "Cah Klithih: Ancaman Hukuman Lebih Lima Tahun Penjara". <https://www.radarjogja.co.id/cah-klithih-ancaman-hukuman-lebih-lima-tahun-penjara/>. Diakses pada Selasa, 11 Juli 2017, Pukul 09.40 WIB.
- Pangestuti, Ratna Dewi, dkk. 2016. "Membangun Benteng Hadapi Kekerasan Pada Anak". *Media Komunikasi RSJS-Lentara Jiwa*. Edisi 35: 20-21.

ILLEGAL JOURNEY: THE INDONESIAN UNDOCUMENTED MIGRANT WORKERS TO MALAYSIA

Ridwan Wahyudi

Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,
Selangor, Malaysia

Correspondence: Ridwan Wahyudi (email: rwahyudi.bmi@gmail.com)

Abstract

The objective of this study is threefold. First, it uses fieldwork to explore the illegal journey of the Indonesian undocumented migrant workers, including all processes and interactions. Secondly, it identifies the substantive factors behind illegal influx into Malaysia. Thirdly, it draws out the implications from the illegal journey undertaken by them to Malaysia. This qualitative study applies the grounded theory approach. The result of this study shows that social capital within their network expands through various channels, particularly friendship, brotherhood, neighborhood, community and ethnic grouping. It also permeates strongly beyond government authority and regulation. They have constructed social classes among themselves. However, they have also been less able to get the social access because the absence of official documents deprives their human rights, and they are also blamed for social ills. Therefore, the regulation for both countries must recognize the rights, improvement governance, strengthen the integrity and curb corruption.

Keywords: corruption, Indonesian undocumented migrant workers, Malaysia, middleman, social capital

Introduction

As many 232 million people have migrated to the leading countries of the world. From those numbers, 71 million happened within intra-Asia and included 14 million migrant workers in ASEAN (ILO, 2014). The number of migrants is rising by 2030 and it is estimated that there will be about 30 million in ASEAN. Even the issue of migrant workers has rendered a vagueness regional relation between the countries of ASEAN, particularly Indonesia and Malaysia (Pandu, 2007). Destination countries of migrant workers include Malaysia, Singapore,

Brunei, and Thailand and origin countries include Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Philippines and Vietnam (Migration News, 2013). Malaysia is one of the largest importers of migrant workers for various sectors within the Asia Pacific region, alongside Singapore, South Korea, Japan, Taiwan and Hong Kong. Although the participation of women in the workforce is conspicuous, there is still a need for migrant workers to suffice certain sectors (Ducanes, 2013). These sectors include both semi-skilled and low skilled jobs most importantly plantation, manufacturing, service, construction, and domestic workers

(ILO, 2014). Ministry of Home Affairs (MoHA) of Malaysia said that more than 2.25 million people held temporary work permits in 2013 (MEF, 2014). The World Bank (2015) estimated that there were undocumented migrant workers in Malaysia more than 1 million in 2014.

The majority of migrant workers perform low skill workers, such as cleaners, farm workers, construction workers, drivers, waiter, and so on. The prominent work performed by migrant workers that categorized as 3D (Dirty, Difficult and Dangerous) (ILO, 2014; Human Rights Watch, 2004). Based on the statistical data from National Agency for Placement and Protection of the Indonesian Overseas Workers (BNP2TKI), 429,872 migrants in 2014 and 275,736 in 2015 have been flown out to abroad. During the same time period, 127,827 and 97,635 migrant workers left for Malaysia, respectively (BNP2TKI, 2016). The Malaysian Government have prior enacted policies, such as the clearance entry at the border, increasing the payment for working visas, detaining undocumented migrant workers, promoting local workers to work in sectors that have been employed by migrant workers, supporting employers to employing local residents, and utilizing technology to reducing the mass labor (Marhani, et.al., 2012; Mohamed, et.al., 2012; Yusof, 2005). Nevertheless, these policies have been unable to reduce the influx and dependence on migrant workers, due to lack of technical implementation and the most employer have still relied on the services of migrant workers, particularly low skilled workers (Kanapathy, 2004; Mei, 2006).

Indonesian migrant workers have frequently entered to Malaysia Peninsula through the routes of Batam and Johor Bahru (Castles, et. al., 2014; Hugo, 2005). IOM mentioned that immigration restrictions and border controls in Southeast Asia have led

to human trafficking and people smuggling (IOM, 2011). Undocumented migrants have chosen and routed illegal channels to escape from being detected by immigration authorities of both countries, in terms of irregular migration. Furthermore, IOM (2015) noted that within period 2005-2014, victims of trafficking from Indonesia amounted to 7,193 people. Unfortunately, as the media highlights, hundreds of people within the period of 2014-2016 died while trying to travel between Indonesia and Malaysia (Fadli, 2016; *The Jakarta Post*, 2015; Jatmika, 2014; Masrur, 2014). Therefore, this study firstly explores the processes and interactions that happened during the journey of undocumented Indonesian workers to and from Malaysia. Secondly, this study identifies factors that stimulate Indonesian undocumented migrant workers to enter Malaysia illegally. Thirdly, it draws out the implications from the illegal journey undertaken by Indonesian undocumented migrant workers to Malaysia.

Literature Review

There are several of debates about international migration. Therefore, the phenomenon of international migration could be seen from multidisciplinary academics, such as sociology, political science, law, economics, demography, geography, psychology and cultural studies (Brettel and Hollified, 2015). However, the most prominent and enormously influential theory is the international migration introduced by Lee (1966) which describes a push and pull model of migration. Moreover, at the latest notion, migrant workers have been not solely focused on men, but also women attracted by income and employment opportunities (Ducanes, 2013; Elias, 2008) and who are driven to improve the lives of their families in their

country of origin (Castles, et.al., 2014; IOM, 2005; Hugo, 2005). Meanwhile, Indonesian migrant worker push factors include poverty, unemployment, wage differentials, weak legal system implementation, ease of counterfeiting identity documents of migrant workers, and the lack of coordination between ministries or agencies involved. The pull factors are easy to penetrate the Malaysian immigration, cultural and religious similarities, access transport system, a wide-open job opportunity and a lack of oversight enforcement agencies (Prayitno, 2015; ILO, 2014; Mei, 2006).

A recent debate is related to the issue of social capital as accounted by Castles, et.al. (2014). According to Lin (2002), a social network is an investment for expecting a return. It involves individual and community networks (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Putnam, 1996) including network system of migrant workers by Morowska (2007). According to Boyd and Nowak (2012), there are four patterns of migrant networks: kinship networks, private networks, and network employees and a network of undocumented workers. This network is the consolidation process in the context of migrant communities (Zetter, et.al., 2006) and interdependence between each other (Rudiger and Spencer, 2004). When there is a grievance, undocumented migrant workers asked for assisting from family members, neighbors, friends, relatives and other social institutions to provide aid and better economic opportunities. The same thing takes place among Indonesian migrant workers in Malaysia would tie to closest to the countryman network (Hasanah, 2015).

Definition of Undocumented Migrant Workers

Kasim and Mat Zin (2011) have categorized undocumented migrants into eight categories. First, a person who enters a country with travel

documents (passport) and an official labor document, but the document is not renewed after expiration. Second, someone has a working visa officially, but works elsewhere i.e. employer name different from the place where he/she works. Third, a person who enters a country with only a travel documents (passport) and abuses the consent by working in the country. Fourth, someone who does not have any travel documents (passport) when entering a country. Fifth, the children born in Malaysia are not officially registered by parents abroad. Sixth, foreign people have different identity documents than the identity of the document holder. This is counterfeiting and document fraud. Seventh, they are asylum seekers, refugees where Malaysia is not a signatory to the Convention of Refugees, 1951/New York, 1967. Eighth, refugees in Sabah were given permission to stay temporarily under a special pass, which can be renewed every year. If not renewed, the refugees are considered informal settlers.

Research Methodology

This study employs qualitative by using grounded theory approach. It means that the approach has a constructivist perspective to build from scenario and series of occurrence experienced by the researcher (Charmaz, 2006). Furthermore, I depict the findings of my experience of the illegal journey by focusing on myself as the primary source. This was also explained by Pace (2012) in applying analysis strategy through grounded theory where researcher him/herself is used as the primary source in data collection. Grounded theory avoids the hypothesis and supposes to the theory that referred by the researcher, with the result in coming from the original sources were collected from observing and in the field script for analyzing the occurrences (Peters,

2014; Pace, 2012). Analysis technique is based on the sources of transcription through open coding, axial coding, theoretical memos, selective code and constant comparison (Pace, 2012; Creswell, 2009; Charmaz, 2006).

I traveled with undocumented Indonesian migrant workers directly as they started the travel from their hometown in Sampang and transited to Surabaya and Batam (Indonesia), then entered Malaysia via Johor Bahru and ended at a construction site. I also interviewed five Indonesian undocumented migrant workers and a senior diplomat of the Embassy of Indonesia as a complementary data from observations. I also observed sixteen Indonesian undocumented migrant workers in their group which comprise of three people of the employer as the head of migrant workers, a foreman, an agency of documentation, a ferry company in Batam, two employers of Malaysian citizen (sub-contractor company owner) and the main contractor company. The survey took for about sixteen months, i.e. in the period 2014-2015.

Result Study

A. Findings

(1) Character, Life and Tradition

In summer, people usually plant tobacco, if they have sufficient capital to cultivate it. For those people who do not have the capital, the unproductive land is left unoccupied and without the crop. Water for bathing, drinking and planting is rare during the dry season. I look at that brain drain phenomenon has been acutely occurred in Madura Island. Many residents have migrated to all corners in Indonesia and abroad. Consequently, there are a limited number of residents in this area. Madura Island population, which on average,

are a senior citizen and they always rely on their children and relative at overseas. They consistently remit to their parents and relatives at the village. I testified that *Madurese* have had been less enthusiastic against practicing of farming as much land remain idle and unproductive. Although they do not work, their children and relative overseas consistently meet the need to them for everyday life.

Madurese have preserved their traditions. During the day, they spend a time to work and either to chat with the whole family in a place called by *taneang lanjeng* at night. *Taneang lanjeng* is the *Madurese* traditional house and used for praying, such as tiny mosque (*surau/ musaola*) as well. Every family ought to have a *surau* at home in *Madurese* tradition and it is located on the outside of principal house building and available a yard amid the row of the relative house. Sometimes, they also put in a television inside the corner of *surau*. After praying, they would watch to television and chat to each other with their whole family till getting sleepy coming.

Most people have supposed that *Madurase* constitute a rude tribe. However, it actually is stigmatization that labeled to them. The term *carok* is a common thing in Madura. *Carok* is a fight between the *Madurese* with the incisive sickle. Death or serious injury rendering defects is genuineness within the *carok*. This is why the others look at *Madurase* as harsh compared to other Indonesian ethnicities. Occasionally, *Madurese* take it into the best solution and it signs to *Madurese* dignity. Afterwards, *carok* is the best way of life in the *Madurese* ethnicity if they are insulted to three key points of life. Rochana (2012) mentioned that there have been three heritages that ought to be guarded and respected for *Madurese* value, which are women, *taneang lanjeng* and jobs. Any interference and threats affecting the values of *Madurese* would lead

to *carok*. For *Madurese*, jobs definitely give meaning for everything because barrenness of the land has driven them to its value. This is why *Madurase* geography is typically labor ethic rather than land ethic even if compared with their Javanese sibling.

Family left behind who have migrant just returned usually run a feast for their safety while in abroad. All relatives and neighbors are invited to enliven the *kenduri* (ritual Moslem party tradition). Not just a feast alone, but migrant member families always bring some gifts to be distributed to relatives and neighbors. The gift is representing the value of social interaction among *Madurese*. The worth of gift would imply for the recognition and respect from neighbors of the family of the migrant. This activity is a symbol of motivation for success migrants. Even they would be willing to buy luggage on the plane to put some gifts distributed. They did not mind though in the process they looking for money and working were huge of risks and challenges in Malaysia. The most important thing for them is the recognition of the status, the honor of relatives and neighbors gathered after the re-integration with the environment. After spending remittance at the village, re-migration preparation is the next step one to looking forward to this cycle.

(2) Documentation for International Migration

A little of *Madurese* migrant have demographic documents, such as identity cards, family cards, a birth registration and education certificate. These documents are as a prerequisite for citizens of Indonesia to have a passport. They have been accustomed to acquiring those documents in various ways whether procedurally or not procedurally. Many of them do not have complete documents and some even have a fake identity. To obtain

the documents, they have to surreptitiously bribe officers through the middleman. The high cost is not an obstacle to them because there are *tekong* (unregistered recruitment agent/middleman) who bail out of all the costs by over borrowing pattern. The loan should be paid off by migrants after entering Malaysia and working at there. *Tekong* is a middleman who he/she usually also has a role as the employer in Malaysia. Middlemen and migrant group would try to hide that they are leaving the village for Malaysia. This is to avoid police raids or operations within the journey. Basically, they have realized what they doing is illegal thing, even though they do not know what the migration procedural is. Information on labor migration has been clogged and unable to be reached by the migrant. Nevertheless, local officials have also been less cooperative and would immediately take action against those who transgress of the falsification. Labor migration procedure was stipulated and compelled by the states through recruitment agencies which high-price for the migrant worker.

(3) Journey to Surabaya

I together with a group of migrants departed from the village on Friday, September 18, 2015. It had been done after their morning prayers (*subuh*) with different vehicles and time in each group. The police usually carry out checks along the way, for example in the Surabaya-Madura Bridge. Police would inspect to documents of people who want to travel abroad. Cops often get confidential information from *tekong* too. *Tekong* reports to police that there are migrants who were on a trip to entering Malaysia illegally. *Tekong* assists and bears the expense of making the identity card, family card, passports and airfare. For smoothing any matters, *tekong* frequently

charges for additional costs as giving bribes to officer. *Tekong* also frequently intimidate and threaten the migrants. I accompanied a migrant in processing a passport issuing at the Pamekasan immigration office which saw that *tekong* paid IDR1 million (\pm US\$ 70) to officer in order to smooth the passport processing. The passport fee is only IDR355 thousand (\pm US\$ 25).

(4) The Border Circumstances

During transit in Batam, this was a sorrowful stage for migrants. All migrants had to sit the room without enough room to stretch his legs. None could sleep comfortably, let alone lied down with a pillow. The proper accommodation was too expensive for them. They just sat and relaxed by lying down onto an unused box. There was only one bathroom to be used by hundreds of people. This building was smelly and dark with insects and trash strewn everywhere. Migrants were threatening and occasionally reminded not to talk too loudly because there were a lot of police outside the building. After entered into the building, we were locked inside the building by *tekong*. We could not pray in the absence of water and being surrounded by feces. Water pipe worked from 1 am until 4 am in the morning, afterwards, there was no water supply. Migrants could survive with such a precarious condition, even among them had occupied until a week.

(5) *Tekong* (the Middleman)

Tekong who accompany of migrants journey was actually connected to the *tekong* in Batam. He is who managed all entry for migrants to Malaysia. They must pay to *tekong* in Batam. It thus yields to be a wealthy man. He has an unused metal collector companies

in Batam and also invests some stocks for one of Airline Corporation as well. He usually buys an unused large ship to be unpacked and re-sold of the iron. He has certainly a partner with government officer at the border in Batam to carry out migrants' influx illegally. He has been providing service of thousands of migrants into Malaysia illegally for every month. No wonder he has been able to provide for IDR1.2 billion (\pm US\$ 90,000) per month to be paid to officer in Indonesia and Malaysia. His employees always apply to vary of methods and tricks to approve the entry of migrants, including bribing the officer. His charge had several differentiations to migrants. For those who have the blacklist, they must pay RM700 (\pm US\$ 165) and RM300 (\pm US\$ 75) for the first entering to Malaysia. After bribing to officer through the *tekong*, then the sheets of passport that were stamped by Malaysia immigration staff must be removed by *tekong*. Immigration staff is unavailable to be responsible for his decision to allow an entry permit to someone who actually is banned by the government. This pattern was actually presented by McMurray (2001) which argued that the border area with various features official borderlines is the real perpetrator border smugglers or human trafficking. It has been happened to the people of Mexico and Guatemala to the United States. Even Hagan (2008) instead mentioned the border official as more appropriate as the actual robbers.

(6) After passing off the Borders Clandestinely

To have undocumented status in Malaysia is not a serious problem for *Madurese* as long as they have a countryman network, any problem can be resolved by the network. Access to health facilities, housing, shopping, clean water, jobs and social relations with local residents are not difficult for them. There

have formed a social class between the workers and the head of workers who are able to manage and maintain of the labor. Even, when migrants cannot operate a computer for supporting their work, they would ask internet shops to assist migrants in term of solving any administration works. Many Indonesian migrants actually have their own business in Malaysia but under the name of a local resident. They have become employer for other migrants. They have dealt with local residents through a consensus for commission every month so that their business runs smoothly. The employers have been actually dependent on the supply of labor that he had brought from the village illegally.

Almost all the workers who live in *rumah kongsi* (shared house) are the undocumented migrants' worker. *Rumah kongsi* are semi-permanent house inside of on-going construction site. They are not only comprising of immigrants from Indonesia, but also from Bangladesh, India, Vietnam and others blending inside it. Sometimes, *rumah kongsi* are located deep inside the forest to safeguard the security of migrant workers against a police raid or the authorities. Placement far away from local communities and unexpected places inhabited by humans potentially avoid detection by the authorities. Social relationships within the *rumah kongsi* of migrants have been tied up in harmony, assisted to another and complemented each other.

(7) The Employment of Undocumented

There is an assortment of construction jobs for Indonesian migrant workers in Malaysia. They are particularly working on scaffolding, plastering, welding, bricklaying, painting, ceiling, and finishing, maintaining, as well as general labor. At the construction

site, the foreman is usually Indonesian and he/she oversees dozen undocumented migrant workers. Several foremen have joint cooperation with Malaysian employers and register the company on behalf of a Malaysian resident. They establish a sub-contractor company for supplying chain of labor to the main contractor in construction commerce. As a foreman, he/she recruits new labor and the prioritize relatives, neighbors, or people of the same ethnicity, which is *Madurese*. The kinds of employment *Madurese* have included scaffolding, maintaining, farrier, and staging. Plastering, ceiling, painting and finishing are done by Javanese people.

There is no certainty regarding about when undocumented Indonesian migrant workers would return to their home country. Nevertheless, they could return at any time they want to, if necessary. They have found a way to get home safely without receiving punishment from the Malaysian government for violating the residency permit. If they have been also caught by the Immigration Department during the raid, they would be charged by the Malaysian law on article 36 of the Immigration Act 1959/63, which was amended in 2006 stipulated that a person who has been found guilty of entering or staying in Malaysia over the period will be fined not more than RM10,000 (±US\$2,325) compounds or imprisonment not exceeding five years or both and also the names she was sentenced to whipping not exceeding six strokes. Concurrently, such undocumented migrant workers are not willing to undergo the punishment for immigration violations.

(8) Legalization Policy for Undocumented

There were a series of policies issued by the government from 2011 to 2015 in order to control illegal immigration. This

included registration, amnesty, legalization, surveillance, enforcement, and deportation or commonly known as the 6P (*Program Pendaftaran, Pengampunan, Pemutihan, Pengawasan, Penguatkuasaan dan Pengusiran*). Afterward, these programs have been converted into rehiring program or 3P for short (*Program Perekrutan dan Penggajian Semula*) that ran from February 2016 to December 2016. These programs were implemented by private companies appointed by the MoHA of Malaysia. Consequently, undocumented migrant workers must pay a fine to the government and the cost of such services to private companies.

Iman Resources Company is an agency that assigned by the MoHA to implement 6P in 2014. A similar program was developed by MoHA 2011-2014. However, many agencies involved within program in 2011-2014, even MoHA argued that it is hard to oversee and monitor such agencies. Thus, MoHA only assign single agency. I could contact with middlemen when arrived at the company's car park at Iman Resources Company. They offer a variety of added value if we apply their services, ranging from freight aircraft, sequential numbers, for faster treatment and others. The involvement of middleman would implicitly increase the cost of management for those who follow the program. Compared to a prior policy through in which undocumented migrant workers just paid RM400 (\pm US\$90) for fine at immigration department before in 2011, with the implementation of that program, Iman Resources Company increased the cost to a total of RM923 (\pm US\$210) in 2015 for undocumented migrant workers who followed the voluntary repatriation program. It also did not include the ticket fare, where each undocumented migrants had to purchase it to Iman Resources Company as well. Fare purchasing from outside agencies was not

allowed by Iman Resources Company. The cause is the only Iman Resources Company knowing the schedule of the returnees. Its reason is that Iman Resources Company just does not want a mistake to serving its customer, even though this is somewhat a monopolistic practice. Meanwhile, ticket fare is more expensive than prices in other agencies. Between August and December 2014, as many as 29,126 people registered joining this program. And between January and May 2015; 21,787 people returned home through Iman Resources Company (Prayitno, 2015). It is an enormous value for a guilty pool if its number is converted to the nominal value.

B. The Factors of Undocumented Migrant Workers

Based on the findings, there are two factors explaining on why undocumented migrant workers are willing to transgress the challenging and risky Malaysian border. These factors include economic factors and socio-legal factors. With regards to economic factor, migrants need jobs and revenue by considering the wage difference between countries of origin and destination, as mentioned by Massey, et.al. (1993). However, economic factor is divided into two stages, the micro and meso levels. Micro level leads to a deeper personal or motivational aspect regarding undocumented migrant workers who are willing to undergo such a precarious condition. In addition, the migrant has shown that the micro level to encourage them have agreed to make the decision to migrate out of the personal context. Sometimes economic factor at micro level can emerge as encouragement or insistence from family, neighbors, relatives, friends, or family relationship. Meso level has looked at deeply concerned into a network of undocumented migrant workers that are also

encouraging someone decision to migrate with undocumented status. Meanwhile, Houg (2008) argued that social network is embodied the form of kinship, friendship, and ethnic demarcation among fellow undocumented migrant workers.

Economic interests are the dominant factor behind why undocumented migrant workers decide to migrate (King, 2012; Massey, et.al., 1993). Their will is to always have a better livelihood and opportunity on the future. It based on the desire and motivation aspect for a better livelihood that is created through deed. In fact, the desire aspect is indefinite promise for a reality. Personal desire is also influenced by environmental conditions of migrants including family, ethnic demarcation, the closest relatives, neighbors and environmental factors of the migrants. They look at environment from the perspective of interaction and always refer to the value of surrounding environment, particularly in terms of property ownership. It is the sign a reference to the belief migrants' on deterministic materialism. Then they always think that migration to Malaysia would always bring up for better livelihood. This desire is based in turn on generating the will and realized into deed to migrate.

Migrants who failed also always have produced the genuine face on the environment. Most of failed migrants are deported by the Malaysian government for not having documents. This shows the failure observed by its environment; sensing very embarrassed is experienced by migrants because of its environment labels as individuals who fail from abroad. Perception is disclosed solely by the individual fails, even though the environment does not consider as such. The personal perception appears in line with the value of environment in which refers to the failure. The

actual perception is subjective. In another word, the society is not necessarily to judge that migration can assure for a better life to the truth value. Instead, this understanding is contagious as the correct sense by migrants and continues trusted by migrants. Each trust generated the will become an action that led to the migration. Thus, at the near future, they are ready to re-migrate and leave their home.

Environmental sphere drives to things of the deterministic materialistic (Lefebvre, 2009). This has been considered by a former migrants who has been successful. Success status improves the interaction process with their sphere. The sophisticated technology of property that had will affect the other migrants to follow the successful way. Therefore, the consciousness to comply the regular migration requirements fades, although undocumented migrant workers know the risky and challenging of illegal journey. Furthermore, the sphere has spawned an external desire of consciousness through the conspicuous asset. Thus, undocumented migrant workers deed has conscious unconsciousness of the decision to migrate (Morowska, 2007). They are not thinking that migration abroad has many obstacles, risks and challenges. Their desire is based on a value in society showing a sign of recognition that must be achieved. The recognition of their status in society is also the abstract things. It is just experienced by the individuals who are affected by the subjective evaluation. Similarly, with regard to the status of sphere is an integral part of value contained within the migrant communities.

Meso-level is concerned with the relationship of network within undocumented migrant workers. As has been stated above that their goal is to obtain a value that is based on asset, whether concrete or abstract. To achieve it, they must be involved with the network of undocumented migrant workers.

Meso-level is concerned with adhering interplay with the micro-level (Houg, 2008). Members in a social network of migrants depend on each other. Moreover, social network is not only to overcome financial matters, but also to cover their affairs in Malaysia. Interaction involves the interplay between subjects into a social network. Each individual involved within the network of undocumented migrant workers would always think that he/she is going to lead the group legally or illegally. The status of migrants will also consider to the person who has carried into Malaysia. They will scour the truth of people involved to carry into Malaysia. In this context, the respondents were chosen by the researchers came from the same village. That is, between *tekong* and person who recruits have known one another. This process gives rise to a truth that *tekong* is a person who has been trusted to manage the safe migration. Furthermore, *tekong* is a person who is successful in terms of economic and asset that were obtained from overseas. This becomes an additional contribution to increasing the truth that inherently had by *tekong*.

The truth value is going on the inter-subjectivity relationship within the network led to a sustained and robust system (Muadz, 2014). The truth is also influenced by cultural aspects and a clear demarcation between individuals within the network. This aspect will greatly strengthen the system within the network of undocumented migrant workers; despite their practice are illegal things. The goal of the network is required by entering into Malaysia and worked up earning at abroad. *Tekong* who role as an employer for undocumented migrant workers also has the responsibility to achieve those goals. This is different things in such of a *tekong* generally. *Tekong* usually only, for instance, treat as providing assistance to undocumented

migrant workers to enter the area of Malaysia. It means that he/she is just solely profit-oriented. However in this context, *tekong* who also a role as the employer in Malaysia has the responsibility for the safety of all its labor, whether in passing off the border security within journey and safety while working in Malaysia with an illegal status.

The value conceived within a network of undocumented migrant workers is the will of inter-subjectivity. All members within a network have the same goal which is to enter and work in Malaysia illegally. It is stated at the meso-level that before beginning an action, every subject must have the will. Despite the status of undocumented migrant workers is not to their penchant, but the limited information, to be a victim of fraud and high costs to be documented workers are a matter that cannot be resolved by *tekong* or even employer itself. Thus, the undocumented migrant workers are extremely complicated option that must be chosen by them. Their will is to improve the living and future, it is not a solely desire to undocumented status. Nevertheless, to be documented migrant workers constitutes their desire. Likewise, at last, to be undocumented migrant workers is their will. This was seen when they did not want to document their status even they actually have money and access to do it. Therefore, to change the undocumented status become documented must instill a way of thinking in which every individual will be able to. Each of individual will definitely have implications for action (Muadz, 2014).

The truth value, the will value and the love value within a network of undocumented migrant workers would not be achieved if there are no other factors that influence undocumented migrant workers, which is the communication between individuals within the group. Communication within network system

of migrants has reached three of which have been mentioned above. Even so, I argued that foreman or employers who recruit migrant from the same village, seen very dominate within a network. Employer of undocumented migrant workers also developed other networks for expanding access required by all members within a network. Network communication power that had by migrants leader is decisive to dominate within a network. Access in this term is with respect to access to seeking jobs in Malaysia, access to other middlemen including all of its employees illegally to Malaysia, access to arrange for the returning of migrant workers illegally to the village. The role of middlemen who is as foremen or employer strengthens its position within the network group of undocumented migrant workers.

The socio-legal approach is basically the legal approach which is applied to social sciences widely (Irianto, et.al., 2012). However, in this discussion is to present the social phenomenon happening to undocumented migrant workers that are closely linked with existing regulations for migrant workers. Although this study has methodological framework itself, but it showed the relationship between the two sets through the analysis conducted in this survey. This provides an overview of law involved to do the job by migrant, as not only the normative approach between right or wrong. These factors are determined by considering the history of migration between Indonesia and Malaysia. Presentation of social aspect is discussed in greater depth about the conditions applicable to existing migration regulation, both of migration in Indonesia and Malaysia.

Regulations are available and stipulated by governments of both countries to manage labor migration. However, there is a question for purposes of existing rules already covers

aspects of social progress by migrant workers, particularly for undocumented status. If referring to each process, migration is a long chain that involves the countries of origin and destination of migrant workers. In addition, it is found that the two countries have a same root history and culture, but the rules do not seem to recognize and pay attention to the two aspects. Therefore, I argue that there is a conflict between social phenomena and laws. Effects of the two countries have governed migration with the private sector for management of migration leading populous Indonesia migration to Malaysia independently and informally (Killias, 2010).

The basic needs are not only involved in the needs of food, clothing and housing, but it also includes the safety of individuals, access to communication and information, environment, justice, freedom and social aspects felt by undocumented migrant workers while working. These factors are also very influencing to migrants out of their home areas in Madurese people to Malaysia. Social access is the rights of the human. However, inequity development in Indonesia involves difficult to reach the social access. Therefore, the basic needs is the rights of every individual to be completed by employer and government. In fact, become undocumented migrant workers are not the main choice of a person, but rather a necessity for the precarious condition at their hometown in gaining the social access (Cormoş, 2014).

Network manages every precaution to reduce the authority of investigation and raid. The usual pattern of their practice is to collect money from all undocumented workers. The funds are usually collected and handed over to the foreman of such sector. Further, the fund is stretched to the head of construction site work. Head of labor at a construction site is usually a citizen who came from Indonesia. He/she, then, grants money to the authorities.

There is a friction in respecting of safety for undocumented migrant workers. Individual safety for migrants is obtained by criminal way for committing acts of corruption to the authorities. This term is used by groups of undocumented migrants in gaining safety access to work.

C. The Implication of Undocumented Migrant Workers

Discussion of social class on society was not only focused on the sociology, where it had been dominant models of social classes. As has been described by scholars, Knap, et.al. (2005) had discussed the manner than with a chance of life, while Robert and House (2000) discussed about health, illness and death, as well as Svallfors (2006), gave an opinion on the social classes in political behavior, Weeden (2002) and Grusky and Weeden (2008) also discussed social behavior. However, in recent discussions of social classes have been hovering on the socio-economic dimension, especially regarding the division of labor. In fact, the latest debate discussed social classes' dimension of migrant workers (Rogaly, 2014).

Indonesian undocumented migrant workers in Malaysia have been structured and divided into social classes that based on the situation and the work environment. This includes jobs as the employer, labor head, clerks, skilled workers, semi-skilled and low skilled workers. This case has been going on construction sector workers. These things have affected the involvement of values and norms prevailing among migrants. Value is referring to income and confidence generated from intimate social networks. The social class of undocumented migrant workers also affects the distribution of ethnic identity within the workforce. It is related to certain types of work

into the construction sector. Seems to have a clear boundary demarcation is concerned with the skills of labor.

There is a long history of international migration between Indonesia and Malaysia (Liow, 2003). It has led to the consolidation of ethnic acculturation and could be felt up to now (Hugo, 2005b). Furthermore, it can be said that between Indonesia and Malaysia are the same race. This thus facilitates the consolidation process, cultures acculturation and ethnic interaction in line with daily activities. This term is no exception to building a social class of undocumented migrant workers in Malaysia. More precisely, social networking between people of Indonesia and Malaysia has been awakened strongly and prosperously. In fact, social network has been established outside the government authority to both of countries. However, then, both countries do not concern on the historical experience and the recognition of cultural migration to making the regulation. There is a migration process occurred outside of the legal framework through independence migration, but it has been instead declared to illegal things. The migration process, however, has been happening before the rules were made by the two countries. This is in line with the practical commercialization of law-making on migration management in Indonesia (Bactiar, 2013). This statement coincided with Castles, et.al. (2014) notion that there has been a connection with the international migration between Indonesia and Malaysia, in which occurred with the network of middlemen role. Although Indonesian government has had a policy on management of migration through a recruitment agency, but that has indeed legitimated to be exploitation way to migrant workers by states. As we know that, employment by using recruitment agency has emerged the high-price for recruitment fees

whose burden to migrant workers (Killias, 2010).

Among the reasons for sustainability of undocumented migrant workers network are inherent resources owned by the middleman. The resource is the power of capital, attitudes and behaviors that are believed by undocumented migrant workers. Communication power and symbols of the prosperity that is owned by middleman also part of additional factors to strengthen the role of middleman within a group. Activities of middleman with various sources that he/she had and practiced continuously have formed a group structure unwritten among the group of undocumented migrant workers. Integrity plays a role in assisting and creating the will of undocumented migrant workers to take the lead and provide a better life goal, also part of survival effect. Therefore, Lin et al. (2001) argued that inherent resources and network location are used as the factors that influence and at the same time as a measure the strength of a social network.

In this context, undocumented migrant workers have indicated that they have blamed the governments of both countries because they assume that the governments have always complicated to people for seeking a better life. In this situation, undocumented migrant workers have actually been experiencing the sense of conscious unconsciousness. The strength of network structure involves awareness towards undocumented migrant workers. Network structure has treated to undocumented migrant workers in the same way, although by oppression and extortion patterns on them. This situation has been happening constantly which cause them are not aware if they have been suppressed by the actor/middleman. This reality is a social phenomenon has been described by Morowska (2007) relating to the concept of

structuration by Giddens that adapt to the international migration phenomenon involving the actors and structuring role.

Functions can be described as a passage to all components within a system. The system is none other than to act as a social network system of undocumented migrant workers. Based on the survey, I identified some social networking functions migrant workers are such as opportunities in seeking jobs for better life, providing financial, transportation and accommodation during the trip, dealing with the authorities to overcome the problems and information facilitation. Even the network role is more than government services that should overcome the grievance and protect migrant workers, including undocumented migrant workers.

Furthermore, each undocumented migrant worker for a certain construction site must pay the safety cost for such as staff RELA (Malaysian volunteer civil corps/paramilitary) and local police who usually worth range RM50 to RM100 (\pm US\$11 to US\$22). In addition, the position of RELA are embodied by regulations 4A, 4B and 4C of the Immigration Act 2002 (amended), composed from civil, have made and added a long list of repression to undocumented migrants in Malaysia (Department of State US 2013). RELA has also taken the opportunity to insecurity condition from undocumented migrant workers in Malaysia, especially on migrant voting strategy for victory in elections rigged by the ruling coalition parties like the *Barisan Nasional* (National Front). Undocumented migrant workers used as a political tool to strengthen the authorities RELA opposition coalition of opposition parties (Kudo, 2013).

The legalization policy for undocumented migrant workers through rehiring program that held by Iman Resource Company can be said to have failed. Hence, there are not

many migrants who pursue the program and continuously with undocumented status if comparing the amount of undocumented migrants in Malaysia. The problem lies in the requirements that it cannot be fulfilled by migrants. Meanwhile, such requirements have to comply as those living in Malaysia with undocumented status of more than three months based on immigration records, have no criminal footprint, have passed the medical examination, the permit fee borne by the employer, the employer's verification, employment agreement and the employer itself who must register it. If one of the stage cannot be met, afterwards, it is declared failed and migrants have to be deported to Indonesia. This elimination system leads migrants reluctant to join the legalization program. In addition, few employers who are willing to register directly, even though the cost of the permit is paid by the migrant themselves.

Many of the migrants try their luck through the broker's services. However, it is very risky for trying to manipulate it as if the broker has a role his employer. Likewise, the consequence that must be borne is the cost incurred higher than the certain cost because there is fee for brokers. Another problem lies with the employers of migrant workers who are not Malaysian citizens, but Indonesians who have settled in Malaysia for a long time. Indonesians like this usually cooperate with Malaysians to establish the enterprise or labor outsource. However apparently Malaysians do not know anything about employment, the most importantly Malaysians just earns a commission. On the other hand, the type of outsourced labor employer is often not granted by MoHA due to several considerations, namely based on liquidity, solvency, and profitability ratios. Therefore, the employer who considered feasible is the main contractor

company. Unfortunately, this type of employer does not employ low-skilled migrant workers with manual exertion, but high-skilled jobs such as engineers, accountants, architects and other white-collar workers.

Overview of the relationship between the government of Indonesia and Malaysia has agreed that liberalization of migration management is more focused on the role of private sector with privatization model. Despite the implementation policy has been never mentioned explicitly, but the practice is visibly very significant. Privatization means the transfer of three components, namely the responsibility of the government, property (with or without obligation) or rights to the use of assets and human resources; to all obtained through the private sector (Sheshinski and Lopes-Calva, 2000). Indeed, privatization has certain practical purposes, which include liberating the financial burden of government, improving the work becomes more efficient and more productive, economic growth, reducing the rate and the presence of public sector economic activity and meeting the New Economic Policy (NEP). NEP has two main objectives of combating poverty desires without depending on the community and reorganize society to establish the identity of the economy at the future (Ling and Sing, 2007). If observed, migration management is not things that it is right or wrong but to focus on potential conflicts of interest. It limits the ability of government power and influence power to do good values in accordance with the principles of the rule, can be lowered and a commercial perspective and gain (Suraiya and Ahmad, 2011).

The actual implementation of above can be attributed to rent-seeking model. Term rent-seeking activities give to exploit government resources for personal gain. Rent seeking is rather than the act of creating wealth but it

benefited from the opportunities who created by others (Brou and Ruta, 2011). In the general view, rent seeking is negative in which frequently considers the ineffectiveness and inefficiency as the individual divert resources from productive activities for their respective interlocked and related activities and holding power (Aidt, 2016). Hence, if the rent seeking is not controlled, it will result in corrupt behavior and the centralization of power is governed and influenced by a specific person (Ng, 2006).

There has been no long-term policy conducted by the Indonesian government to reduce the influx of undocumented migrant workers to Malaysia. In reality, the route of undocumented migrant workers has been definitely identified by the government. However, corruption and unauthorized collaboration have taken place at the border point by officers to both of countries, even though it conceives the characterization of the diversity this special monitoring unit. Thus, it was true that the border officers are the real criminal actor by Khosravi (2010).

Conclusion

Migration between Indonesia and Malaysia have begun before independence (Kaur, 2005: 4-5). Political tensions between the two countries relating to migrant workers have marked since the early 1980s. Indonesian undocumented migrant workers have to comply with the law in Malaysia (Prayitno, 2015); and then Indonesian should improve on labor migration management. Migrant workers should also be aware of the necessary documents and immigration Indonesia should be more careful in issuing passports. Transgression of migration procedures and corrupt practices by middlemen needs to be controlled and enhanced efforts to curb. The

Indonesian government also should focus on equal development in rural areas so that more job opportunities, particularly in the area of origin of migrants. Accordingly, independent migration in Indonesia, in term of the condition without private sector involving, should be regulated soon by the government to give an option to people rights on free movement.

The strategy undertaken by the Malaysian government by tightening visa application charge for migrant workers should be reviewed. Accordingly, the Malaysian government has to oversee private foreign recruitment company for imposing high fees to migrant workers in completing the employment provision. Hence, many undocumented migrant workers have become victims of fraud and racketeering by the middleman, actor who suspected as an individual civil servant and police. Consequently, levy imposed on migrant workers cannot afford to pay because complexities of management and obscurity procedures. Precisely, it also contributes to the undocumented migrant workers that not willing to register themselves. This is also in line with giving the strict sanction by the Malaysian government to employers who employ the undocumented migrant workers. In addition, the dissemination of information and streamlining management for legalization undocumented migrant workers have to be accomplished by Malaysian government. Accordingly, eradication corruption must be enforced for every institution that provide services for migrant workers in Malaysia.

Sophisticating of middleman in communication to migrant workers develops the robust network. The social network takes place on an on-going basis and habitually. At last, more migrant workers believe the role of middlemen despite overruling the law. The situation prevails in line with the statement by Giddens in *structuration* theory

as a condition of conscious unconsciousness. In these circumstances, a person's ability to acquire awareness becomes blurred, making it difficult to think rationally to follow the formal channels (Morowska, 2007). Networks of undocumented migrant workers have established social relationships among labor. However, the ability, the strength, transparency and labor management is an important aspect that determines social class among undocumented migrant workers (Rogaly, 2014). Furthermore, a network of undocumented migrant workers has also created social classes based on the worker's occupation and ethnic specialization in which come from Indonesia. Undocumented migrant workers are always working to improve the ownership of such valuables, property, homes, vehicles, land, jewelry and status. The mark is very valuable to transforming the welfare of migrant workers in their life. Each of them is willing to bear the cost or sacrifice to gain riches which can be witnessed by the people around him (Lefebvre, 2009). Stimulation of the materialistic environment, encourage migrant workers are working together to achieve success even had to sacrifice anything and are willing to hazard risk for undocumented work in Malaysia.

References

- Aidt, Toke S. 2016. *Rent Seeking and the Economics of Corruption*. Cambridge Working Paper Economics, 1621. Cambridge: The University of Cambridge.
- Bachtiar, Palmira Permata. 2013. *The Governance of Indonesian Overseas Employment in the Context of Decentralization*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- BNP2TKI. 2016. "Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2015." Accessed at April 15, 2016, at 12.45 pm, <http://www.bnp2tki.go.id/read/11034/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2015.html>.
- Bourdieu, Pierre. 1986. "The Forms of Capital." In John G. Richardson, eds. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, edited by, 241–58. New York: Greenwood Press.
- Boyd, Monica. and Joane Nowak. 2012. "Social Networks and International Migration" in Martiniello, M. and Rath, eds. *An Introduction to International Migration Studies*. Page 79 – 106. Amsterdam: Amsterdam University.
- Brettel, Caroline B. and James F. Hollifield. 2015. *Migration Theory: Talking Across Disciplines*. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Brou, Daniel., and Michele Ruta. 2011. "Rent Seeking, Market Structure and Growth." *Journal of the European Economic Association*, Vol. 9 (6): 1143 – 1167.
- Castles, Stephen., Hein de Haas., and Mark J. Miller. 2014. *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World 5th (fifth) Edition*. New York: The Guilford Press, A Division of Guilford Publication, Inc.
- Charmaz, Kathy. 2006. *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis*. London: Sage Publication.
- Coleman, James S. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital." *American Journal of Sociology* (94): 95–120, <http://www.jstor.org/stable/2780243>.
- Cormoș, Viorica Cristina. 2014. "Mentality and Change in the Context of International Migration." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 149: 242 – 247. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.224>.

- Creswell, John W. 2009. *Qualitative, Quantitative, and mixed Methods Approaches (3rd Edition)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication, Inc.
- Ducanes, Geoffrey. 2013. *Labour Shortages, Foreign Migrant Recruitment and the Portability of Qualifications in East and South-East Asia*. Bangkok: International Labour Office (ILO). [http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_226476/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_226476/lang-en/index.htm).
- Elias, Juanita. 2008. "Struggles over the Rights of Foreign Domestic Workers in Malaysia: The Possibilities and Limitations of 'rights talk'." *Economy and Society*, Vol. 37(2): 282 – 303. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/03085140801933330>.
- Fadli. 2016. "18 Joint Investigation Conducted to Find Cause of Batam Boat Accident." *The Jakarta Post*, Accessed at December 16, 2016, at 2.36 pm <http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/07/joint-investigation-conducted-to-find-cause-of-batam-boat-accident.html>.
- Grusky, David B., and Kim Weeden. 2008. "Are There Social Classes? An Empirical Test of the Sociologist's Favorite Concept". In Dalton Conley and Annette Laureau, eds. *Social Class: How Does it Work?* Page: 65 – 92. New York: Russell Sage Foundation.
- Hagan, Jacqueline Maria. 2008. *Migration Miracle: Faith, Hope and Meaning*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hasanah, Tunira. 2015. "Potential Social Capital of Indonesian Immigrant in Malaysia: A Preliminary Research." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 211: 383 – 389.
- Houg, Sonja. 2008. "Migration Networks and Migration Decision-Making." *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 34 (4): 585 – 605. DOI: 10.1080/13691830801961605.
- Hugo, Graeme. 2005a. Migration in the Asia-Pacific Region. A paper prepared for the Policy Analysis and Research Program of the Global Commission on International Migration, Geneva, September 2005.
- Hugo, Graeme. 2005b. Migrants in Society: Diversity and Cohesion. A paper prepared for the Policy Analysis and Research Program of the Global Commission on International Migration, Geneva, September 2005.
- Human Rights Watch. 2004. *Abuses against Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Malaysia*. July 2004 Vol. 16, No. 9 (B).
- Irianto, Sulistywati., Jan Michiel Otto., Sebastian Pompe., Adriaan W. Bedner., Jacqueline Vel., Suzan Stoter., and Arnscheidt Julia. 2012. *Kajian Sosio-legal*. Translated by Tristam Moelyono. Denpasar: Pustaka Larasan.
- International Labour Office (ILO). 2014. *Triangle Project: Practical Guidelines for Employers on the Recruitment, Placement, Employment, and Repatriation of Foreign Workers in Malaysia*. ILO Bangkok.
- International Organization for Migration (IOM). 2005. *World Migration: Costs and Benefits of International Migration*. Geneva: International Organization for Migration.
- International Organization for Migration (IOM). 2011. *Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants*. Geneve: International Organization for Migration Annual Report of Activities.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. 2015. "Laporan Korban Perdagangan Orang tahun 2015." Jakarta: IOM Jakarta.
- Jatmika, A. 2014. "Jumlah WNI Korban Kapal Tenggelam Jadi 14 Orang." *Tempo*. Accessed at November 2, 2016, 5.23 pm <https://m.tempo.co/read/news/2014/06/20/118586637/jumlah-wni-korban-kapal-tenggelam-jadi-14-orang>.

- Kanapathy, Vijayakumari. 2004. International Migration and Labour Market Developments in Asia: Economic Recovery, the Labour Market and Migrant Workers in Malaysia. Paper prepared for the 2004 Workshop on International Migration and Labour Markets in Asia organized by the Japan Institute for Labour Policy and Training (JILPT) supported by the Government of Japan, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the International Labour Office (ILO).
- Kasim, Azizah and Rugaiyah Mat Zin. 2011. "Irregular Migrants and the Law." *Philippine Journal of Development*. 70 (38): Numbers 1 & 2.
- Kaur, Amarijit. 2005. "Indonesian Migrant Workers in Malaysia: from Preferred Migrants to 'last to be hired' Workers." *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, vol. 39 (2): 3–30.
- Khosravi, Shahram. 2010. *'Illegal' Traveller: An Auto-Ethnography of Borders*. New York: Palgrave Macmillan.
- Killias, Olivia. 2010. "Illegal" Migration as Resistance: Legality, Morality and Coercion in Indonesian Domestic Worker Migration to Malaysia." *Asian Journal of Social Science* 38: 897–914.
- King, Russel. 2012. *Theories and Typologies of Migration: An Overview and A Primer*. In Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations, edited by Erica Righard, 3/12. Malmö: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
- Knap, Bojan., Jadranka Buturovic-Ponikvar., Rafael Ponikvar and Andrej F Bren. 2005. "Regular Exercise as a Part of Treatment for Patients with End-stage Renal Disease." *Therapeutic Apheresis and Dialysis*, Volume 9, Issue 3, 211-213. DOI: 10.1111/j.1774-9987.2005.00256.x.
- Kudo, S. 2013. "Securitization of Undocumented Migrants and the Politics of Insecurity in Malaysia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 17: 947 – 956.
- Lafebvre, Henry. 2009. *Space, State and World*. Minneapolis: The University of Minnesota Press.
- Lee, Everett S. 1966. "A Theory of Migration." *Demography*, Vol. 3 (1): 47-57.
- Lin, Nan. 2002. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. New York: Cambridge University Press.
- Lin, Nan., Karen Cook., and Ronald S. Burt. 2001. *Building a Network Theory of Social Capital*. New Jersey: Transaction Publisher.
- Ling, Shum Yoke., and Yap Tet Sing. 2007. "Role of Government and Its Agencies in Promoting Industrialization." In Har Wei Mun, eds. *Malaysian Economic Development: Issues and Debates*. Kampar: Universiti Tunku Abdul Rahman
- Liow, Joseph. 2003. "Malaysia's Illegal Indonesia Migrant Labour: In Search of Solution." *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25 (1): 44 – 64.
- Malaysian Employers Federation (MEF). 2014. *Practical Guidelines for Employers on the Recruitment, Employment and Repatriation of Foreign Workers in Malaysia*. Bangkok: ILO Asia Pacific.
- Marhani, Mohd Arif., Aini Jaapar., and Nor Azmi Ahmad Bari. 2012. Lean Construction: Towards Enhancing Sustainable Construction in Malaysia. *Procedia-social and Behavior Sciences*, Vol. 68: 87 – 98. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.209>.
- Massey, Douglas S., Joaquin Arango., Graeme Hugo., Ali Kouaouci., Adela Pellegrino., and J. Edward Taylor. 1993. "Theories of International Migration: A Review and

- Appraisal." *Population and Development Review*, Vol. 19 (3): 431-466. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2938462>.
- Masrur. 2014. "Kapal Angkut 27 TKI Tenggelam di Perairan Malaysia." *Tempo*, Accessed at November 3, 2015, 8.45 pm. <https://m.tempo.co/read/news/2014/06/19/118586493/kapal-angkut-27-tki-tenggelam-di-perairan-malaysia>.
- McMurray, David A. 2001. *In and Out of Morocco: Smuggling and Migration in a Frontier Boomtown*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Mei, Lin. 2006. *Indonesian Labor Migrants in Malaysia: A Study from China*. ICS Working Paper No. 2006 – 11. Kuala Lumpur: Institute of China Studies, Universiti Malaya.
- Migration News. 2013. "South East Asia: ASEAN 2015." *Migration News*, Accessed at October 2013, Vol. 20, (4). Online version: <https://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=3868>.
- Mohammed, Ramesh Kumar Moona., Charles Ramendran., and Peter Yacob. 2012. "The Impact of Employment of Foreign Workers: Local Employability and Trade Union Roles in Malaysia." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 2 (10): 530 – 541.
- Morowska, Eva. 2007. *International Migration: Its Various Mechanisms and Different Theories that Try to Explain it*. Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations 1/07. Malmö: Malmö University.
- Muadz, Muhammad Husni. 2014. *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersuyektivitas dengan Pendekatan Sistem*. Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup.
- Ng, D. 2006. "The Impact of Corruption on Financial Market." *Managerial Finance*, Vol. 32, (10): 882 – 836.
- Pace, S. 2012. "Writing the self into research: Using grounded theory analytic strategies in autoethnography." In Nigel McLoughlin & Donna Lee Brien, eds. *TEXT Special Issue: Creativity: Cognitive, Social and Cultural Perspectives*. April 2012.
- Pandu, Mario. 2007. *Non-Traditional Security Issue and International Conflict: A case study of Indonesian Migrant Labor in Malaysia*. MA Thesis, Lund University, Sweden.
- Peters, I. 2014. *Too Abstract to Be Feasible? Applying the Grounded Theory Method in Social Movement Research*. Hamburg: German Institute of Global and Area Studies.
- Prayitno, H. 2015. *Tantangan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BMI di Malaysia*. This essay was presented by Indonesia Ambassador for Malaysia, Herman Prayitno, while receiving of Indonesia Senator (DPD RI) on May 21, 2015.
- Putnam, R. 1996. "The strange disappearance of civic America." *The American Prospect*, Vol. (24): 34 – 48.
- Robert, Stephanie., and James S. House. 2000. "Socioeconomic Inequalities in Health: An Enduring Sociological Problem." *Handbook of Medical Sociology*, Vol. 5: 79 – 97.
- Rochana, Totok. 2012. "Orang Madura: Suatu Tinjauan Antropologis." *Humanus Jurnal*, Vol. 11 (1).
- Rogaly, B. 2014. "Migration and Social Class: Insights from the New Mobilities Paradigm." *Migration and Social Class Workshop on 2nd April 2014*, Department of Politic, Language and International Studies the University of Bath.

- Rudiger, Anja., and Sarah Spencer. 2003. Meeting the challenge: equality, diversity and cohesion in the European Union. Paper presented to the Joint European Commission/OECD conference on the economic effects and social aspects of migration, Brussels. Available on www.ippr.org.uk/research/files/team19/project22/integration.doc.
- Sheshinski, Eytan., and Luis F. lopes-calva. 2003. "Privatization and Its Benefit: Theory, Evidance and Challenges." *CESifo Economic Studies*, Vol. 49(3): 429 – 459. <https://doi.org/10.1093/cesifo/49.3.429>.
- Suraiya, Ishak & Ahmad Rafli Che Omar. 2011. "New Paradigms of Corporate Social Responsibilities for Geovernment Linked Companies." *Akademika*, Vol. 81 (3): 75 – 81.
- Svallfors, Stevan. 2006. *The Moral Economy of Class: Class and Attitutedes in Comparative Perspective*. California: Stanford University Press.
- The Jakarta Post. 2015. "15 Indonesian Killed in Malaysia Boat Accident." *The Jakarta Post*, Accessed at April 4, 2016, at 7.43 am <http://www.thejakartapost.com/news/2015/09/04/15-indonesians-killed-malaysia-boat-accident.html>.
- The World Bank. 2015. "Malaysia Economic Monitor, December 2015 – Immigrant Labour." *The World Bank*, Accessed at August 15, 2016, at 12.45 pm <http://www.worldbank.org/en/country/malaysia/publication/malaysia-economic-monitor-december-2015-immigrant-labour>.
- United States Department of State. 2013. *Country Reports on Human Rights Practices for 2013: Malaysia*. Washington: United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.
- Weeden, Kim A. 2002. "Why Do Some Occupations Pay More than Others? Social Closure and Earnings Inequality in the United States." *American Journal of Sociology*, Vol. 108 (1): 55 – 101.
- Yusof, Zakaria M. 2005. Ke Arah Pengurangan Kebergantungan Tenaga Kerja Asing di Sektor Binaan. *Jurnal Alam Bina*, Vol. 7 (2): 71 – 86.
- Zetter, Roger., David Griffiths., Nando Sigona., Don Flynn., Tauhid Pasha., and Rhian Beynon. 2006. *Immigration, Social Cohesion and Social Capital*. New York: Joseph Rowntree Foundation.

FERTILITAS MIGRAN DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI FERTILITAS DI JAWA BARAT

Rindang Ekawati¹, Rina Herartri², Nuraini³, Laili Rahayuwati⁴, dan Sukamdi⁵

¹Bidang Pelatihan dan Pengembangan—Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, ²Pusat Penelitian Kependudukan - BKKBN Pusat, Jakarta, ³Statistisi—Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, ⁴Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran, Bandung, ⁵Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Laili Rahayuwati (*e-mail*: laili.rahayuwati@unpad.ac.id)

Abstrak

Migrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dinamika penduduk, baik melalui jumlah migran maupun fertilitas migran. Jumlah migrasi yang besar ke Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penyebab peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Jika migran memiliki fertilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nonmigran, maka pengaruh tersebut akan lebih besar lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan fertilitas antara migran dan nonmigran serta faktor-faktor yang memengaruhi fertilitas di Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kecenderungan migran memiliki fertilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nonmigran. Sementara itu, faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap fertilitas adalah pendidikan, usia kawin pertama, penggunaan alat kontrasepsi, dan kegiatan utama (pekerjaan).

Kata kunci: fertilitas, migrasi, faktor sosial ekonomi

THE FERTILITY OF MIGRANTS AND FACTORS AFFECTING FERTILITY IN WEST JAVA PROVINCE

Abstract

Migration is one of the factors that influences the dynamics of population, both through the number of migrants and the fertility of migrants. The large number of migrants to West Java Province is one of the causes of a considerable increase in population. If migrants have higher fertility than non-migrants, the effect will be even greater. This study aims to examine the difference of fertility between migrants and non-migrants as well as factors affecting fertility in West Java. The data used is 2015 National Socio-Economic Survey (Susenas). The analysis is done using descriptive and inferential statistics. The results show that there is a tendency for migrants to have higher fertility compared with non-migrants while the socio-economic factors that have an effect on fertility are education, first marriage age, use of contraceptives, and main activities (work).

Keywords: fertility, migration, socio-economic factors

Pendahuluan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010, dapat diketahui bahwa jumlah migran seumur hidup bersih (neto) di Jawa Barat dari tahun 2000 ke tahun 2010 meningkat drastis dari 1.225.603 jiwa menjadi 2.710.927 jiwa atau meningkat sebesar 121,19 persen. Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki migrasi bersih positif. Peningkatan migrasi di Jawa Barat tidak lepas dari peran daerah ini sebagai *buffer zone* bagi Jakarta. Kenaikan jumlah migran tersebut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk di Jawa Barat dari 43.053.732 jiwa tahun 2000 menjadi 7.330.259 jiwa tahun 2010.

Migrasi yang tinggi merupakan suatu tantangan sekaligus ancaman bagi perkembangan suatu daerah. Dikatakan tantangan karena migrasi berkontribusi terhadap pembangunan di daerah tujuan. Namun, migrasi akan menjadi ancaman jika tidak terjadi integrasi antara migran dan nonmigran sehingga mengganggu *social cohesion* dan berpotensi menimbulkan konflik. Di luar kedua hal tersebut, dari sisi demografi, migrasi akan berkontribusi positif maupun negatif terhadap angka kelahiran di daerah tujuan.

Dalam konteks perubahan angka fertilitas, migrasi di Jawa Barat kemungkinan berkontribusi terhadap penurunan TFR (Total Fertility Rate) yang lambat pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir (SDKI 2002/2003 sampai dengan SDKI 2012). Hasil SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan) tahun 2002/2003. menunjukkan bahwa TFR di Jawa Barat adalah 2,6; sedangkan SDKI tahun 2012 mencatat TFR sebesar 2,5 anak. Data tersebut menunjukkan terdapat sedikit penurunan dalam periode sepuluh tahun.

Secara teoretis, hubungan antara migrasi dan fertilitas dapat dijelaskan dengan beberapa hipotesis (Kulu, 2003). Pertama adalah *socialization hypothesis* yang mendasarkan pada premis bahwa perilaku fertilitas migran merefleksikan preferensi fertilitas yang dominan selama masa anak-anak. Oleh karena itu, migran menunjukkan tingkat fertilitas yang serupa dengan penduduk di daerah asal dan konvergensi terhadap tingkat fertilitas penduduk di daerah tujuan hanya terjadi pada generasi berikutnya (mengingat adanya perbedaan antargenerasi). Kedua adalah *adaptation hypothesis* yang menyebutkan bahwa perilaku fertilitas migran, cepat atau lambat, mendekati perilaku dominan di daerah tujuan. Ketiga adalah *selection hypothesis*, yaitu migran adalah kelompok orang tertentu yang preferensi fertilitasnya lebih mirip dengan orang-orang yang berada di tempat tujuan daripada di tempat asal. Keempat adalah *disruption hypothesis* yang menjelaskan bahwa segera setelah migrasi, migran menunjukkan tingkat fertilitas yang rendah karena adanya faktor-faktor pengganggu yang terkait dengan proses migrasi.

Teori klasik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi dan fertilitas adalah teori dari Davis dan Blake (1956). Teori tersebut menjelaskan bahwa pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap fertilitas harus melalui variabel antara (*intermediate variable*). Variabel antara tersebut terdiri atas sebelas variabel, tetapi pada umumnya yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah penggunaan kontrasepsi dan usia kawin pertama yang disebabkan oleh keterbatasan data.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa fertilitas migran cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nonmigran. Penelitian di Bali oleh Sudibya, dkk. (2013)

menunjukkan bahwa fertilitas migran adalah 2,5 dibandingkan dengan nonmigran yang sebesar 2,32. Penelitian lain di Kota Singaraja, Provinsi Bali, oleh Haribaik, dkk. (2017) juga menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu paritas migran lebih besar (3-4 anak) dibandingkan dengan nonmigran (1-2 anak). Hasil yang senada lainnya menyebutkan bahwa migran cenderung memiliki anak yang lebih besar dibandingkan dengan nonmigran dan hal itu juga ditemukan di Jakarta (download.portalgaruda.org/article.php?article=351415&val). Penelitian lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Alfana dan Gyarsih (2015) juga menunjukkan hasil yang sama.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka dapat diduga bahwa kontribusi migrasi terhadap dinamika penduduk bukan hanya karena jumlah migrannya, tetapi juga fertilitas migran ikut berpengaruh. Pertanyaannya adalah apakah hubungan status migran dan fertilitas di Jawa Barat juga sama dengan hasil penelitian di daerah yang lain? Kontribusi migrasi terhadap fertilitas di suatu wilayah merupakan isu menarik dalam membahas dinamika penduduk di suatu wilayah. Hal itu karena penjelasan terhadap perbedaan fertilitas antara migran dan migran akan menjelaskan faktor yang berkontribusi terhadap perubahan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk di suatu wilayah. Isu tersebut menarik untuk dikaji di Jawa Barat, sebab provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka migrasi paling besar dan bersifat dinamis.

Studi ini merupakan studi lanjutan yang dilakukan oleh Herartri, dkk. tahun 2015 yang berjudul "Perbedaan Fertilitas Migran dan Nonmigran di Provinsi Jawa Barat" dan menggunakan data Susenas 2012. Dalam penelitian tersebut, konsep migrasi yang digunakan adalah migrasi total. Migrasi total

adalah migrasi yang diukur berdasarkan tempat tinggal yang saat survei dilakukan berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya, tanpa mempertimbangkan waktu pindahnya. Kelemahan pada studi ini terletak pada konsep migrasi. Karena menggunakan konsep migrasi total, maka hasilnya tidak dapat menunjukkan kondisi paling akhir atau terkini.

Memperhatikan kelemahan tersebut, maka dalam studi ini, konsep migrasi yang digunakan adalah migrasi risen, yaitu migrasi yang didasarkan pada status tempat tinggal sekarang (saat survei dilakukan) dibandingkan dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu. Di samping itu, studi ini juga memiliki kelebihan karena menggunakan data Susenas terbaru, yaitu tahun 2015.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu analisis data sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan adalah Susenas tahun 2015. Unit analisis yang digunakan adalah wanita pernah kawin berusia 15-49 tahun, yaitu anggota rumah tangga wanita yang saat survei dilakukan berstatus kawin, cerai hidup, atau cerai mati dan berumur 15-49 tahun yang menjadi sampel Susenas 2015.

Dari jumlah wanita pernah kawin (WPK) yang berjumlah 15.950 dan berumur 15-49 tahun di Jawa Barat, sebanyak 269 orang (1,72 persen) merupakan penduduk migran risen masuk. Kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi logistik. Variabel-variabel yang digunakan dalam regresi logistik adalah sebagai berikut.

Y : Variabel dependen, jumlah anak lahir hidup merupakan variabel *dummy* dengan kode 1 jika jumlah anak lahir

FERTILITAS MIGRAN DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI FERTILITAS DI JAWA BARAT

hidup yang dimiliki wanita migran >2 dan 0 jika jumlah anak lahir hidup yang dimiliki wanita migran ≤ 2

Xi : Variabel Independen (penjelas), yang terdiri atas

- a. daerah tempat tinggal, kode 1 jika bertempat tinggal di perkotaan dan 0 jika bertempat tinggal di perdesaan
- b. pendidikan, kode 1 jika pendidikan yang ditamatkan >SMA dan 0 jika pendidikan yang ditamatkan ≤ SMA
- c. usia kawin pertama, kode 1 jika usia kawin pertama <21 tahun dan 0 jika usia kawin pertama ≥21 tahun
- d. status migran, kode 1 jika berstatus migran risen dan 0 berstatus nonmigran
- e. penggunaan kontrasepsi, kode 1 jika pernah dan sedang menggunakan kontrasepsi dan 0 jika tidak pernah menggunakan kontrasepsi
- f. pekerjaan, kode 1 jika bekerja dan 0 jika tidak bekerja
- g. umur sebagai variabel rasio.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Wanita Pernah Kawin 15-49 tahun

Gambaran umum tentang wanita pernah kawin (WPK) umur 15-49 tahun dengan pengelompokan migran risen dan nonmigran risen dapat dilihat pada Tabel 1. Distribusi WPK menurut kelompok umur memperlihatkan pola yang sama antara migran dan nonmigran. Pola distribusi umur WPK migran menurut kelompok umur menunjukkan pola huruf U terbalik dengan puncaknya pada umur 25-39 tahun (65 persen). Pola yang sama ditemukan pada kelompok nonmigran meskipun jumlah pada kelompok umur puncak (25-39) lebih rendah dibandingkan dengan kelompok migran, yaitu 52 persen. Hal inilah yang menyebabkan median umur untuk kelompok migran lebih muda dibandingkan dengan nonmigran (Tabel 1).

Tabel 1 Persentase Nonmigran dan Migran Risen Wanita Pernah Kawin 15-49 Tahun per Kelompok Umur di Jawa Barat

Kelompok umur	Wanita Pernah Kawin 15-49 tahun				
	nonmigran risen	%	migran risen	%	Total
15-19	314	2,00	4	1,49	318
20-24	1.279	8,16	30	11,15	1.309
25-29	2.008	12,81	62	23,05	2.070
30-34	3.029	19,32	52	19,33	3.081
35-39	3.147	20,07	62	23,05	3.209
40-44	3.187	20,32	41	15,24	3.228
45-49	2.717	17,33	18	6,69	2.735
Total	15.681	100	269	100	15.950
Mean	35.93		33.29		
Median	36.00		33.00		

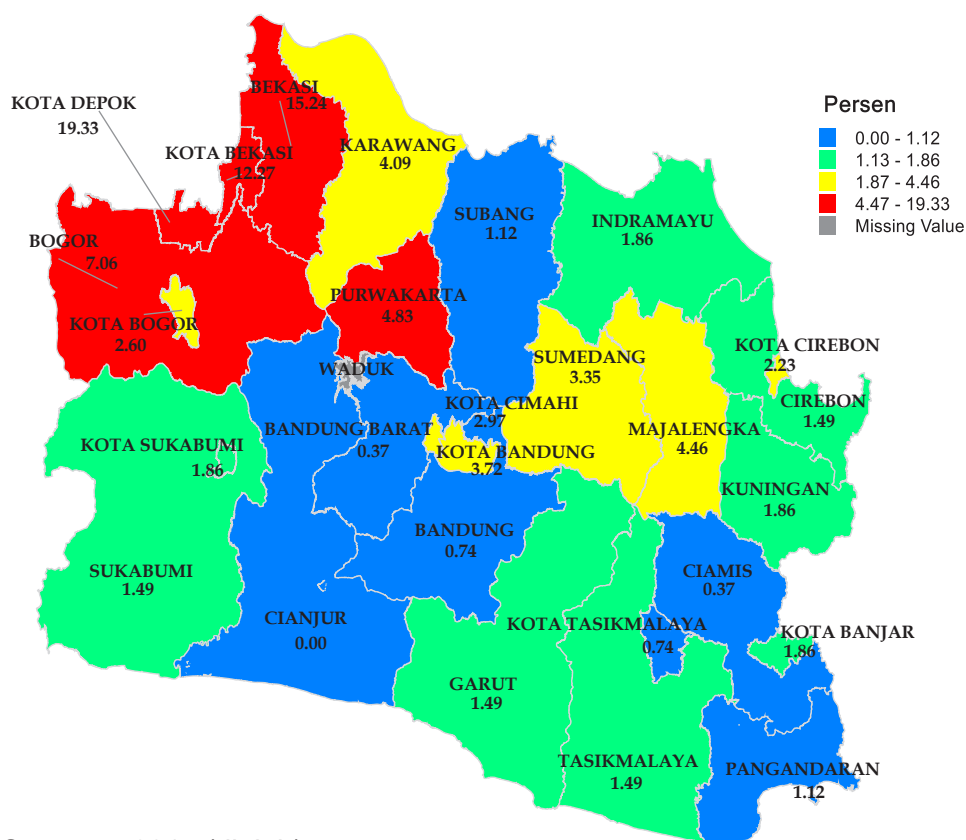
Sumber: Susenas, 2015 (diolah)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Provinsi Jawa Barat merupakan *buffer zone* bagi Jakarta. Data Susenas 2015 menunjukkan bahwa daerah asal migran adalah DKI Jakarta. Sementara itu, data migrasi risen hasil Sensus Penduduk 2010 maupun Supas (Survei Penduduk Antar Sensus) tahun 2015 menunjukkan bahwa migrasi risen DKI Jakarta adalah negatif. Hal itu berarti bahwa lebih banyak penduduk yang keluar dari Jakarta dibandingkan dengan yang masuk ke DKI Jakarta. Hasil Supas 2015 menunjukkan bahwa 62,28 persen penduduk dari DKI Jakarta menuju ke Jawa Barat.

Gambar 1 menunjukkan bahwa seperlima lebih migran risen di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi di Kota Depok. Selebihnya yang berjumlah 40,72 persen migran berada

di kabupaten dan kota yang terdekat dengan DKI Jakarta, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Kerawang. Keenam kabupaten/kota inilah bersama-sama dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang merupakan daerah penyangga bagi DKI Jakarta. Sebagian besar penduduk yang bekerja di DKI Jakarta bertempat tinggal di kabupaten/kota tersebut sebagai migran.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi adalah wilayah terdekat dari DKI Jakarta serta merupakan daerah asal terbesar WPK migran risen. Hal tersebut dapat dijelaskan secara teoretis pula. Berdasarkan Teori *Selection* menurut Caldwell (1982) (lihat juga Kulu, 2003;



Sumber: Susenas, 2015 (diolah)

Gambar 1 Persentase Migran Risen Masuk (WPK 15-49 Tahun) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Berdasarkan Data Susenas 2015

FERTILITAS MIGRAN DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI FERTILITAS DI JAWA BARAT

Hervitz, 1985; Ribe & Schultz, 1980; Herartri, Rina, dkk. 2013), keluarga yang melakukan migrasi 'terseleksi' berdasarkan kesamaan karakteristik sosial ekonomi dengan penduduk di wilayah tujuan. Kedekatan wilayah memungkinkan terjadinya dan mempermudah migran berinteraksi dengan penduduk asal karena karakteristik sosial ekonomi yang mirip, atau bahkan sama.

Faktor pendorong yang diduga menjadi penyebab migran risen dari DKI Jakarta menuju ke kabupaten dan kota tujuan migran tersebut adalah makin mahalnya biaya hidup di daerah asal. Sebaliknya, terdapat beberapa faktor penarik yang ada di daerah tujuan selain biaya hidup yang lebih murah, yaitu. 1) Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup, 2) kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, serta 3) keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang lebihnya aman dan menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.

Karakteristik lain memperlihatkan bahwa dari sisi ketenagakerjaan, kegiatan utama yang dilakukan oleh sebagian besar (43,36 persen) WPK migran adalah bekerja, sedangkan wanita nonmigran hanya 39,78 persen yang berstatus bekerja. Selain itu, sebanyak 20,56 persen wanita migran memiliki usaha sendiri dibandingkan dengan 14,16 persen wanita nonmigran yang memiliki usaha sendiri. Jika berusaha sendiri diklasifikasikan sebagai sektor informal, data tersebut menunjukkan bahwa wanita migran yang bekerja di sektor informal lebih besar dibandingkan dengan wanita nonmigran. Sementara itu, sektor jasa yang terdiri atas perdagangan, hotel, dan rumah makan merupakan sektor yang menjadi gantungan hidup para wanita, baik migran maupun nonmigran (35,40 persen). Besarnya wanita yang bekerja di sektor jasa ini sekaligus melengkapi informasi sebelumnya

yang menyatakan bahwa migran cenderung bekerja di sektor informal karena secara umum, sektor jasa di Indonesia didominasi oleh sektor informal.

Data menarik lain menunjukkan bahwa 20,30 persen WPK bekerja di sektor industri pengolahan dan hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor pertanian. Wanita migran yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 17,80 persen, sedangkan wanita nonmigran hanya 9,73 persen. Data ini sekaligus memberikan gambaran yang cukup menarik, sebab wanita migran yang bekerja di sektor pertanian cukup besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan wanita nonmigran. Namun, penelitian ini tidak dapat menjelaskan secara mendalam alasan banyak perempuan migran bekerja di sektor pertanian. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan yang akan melakukan analisis fenomena tersebut.

Selanjutnya salah satu variabel penting dalam analisis fertilitas adalah usia pernikahan. Data Susenas 2015 menunjukkan bahwa WPK migran memiliki usia pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nonmigran. Sebanyak 37,93 persen wanita migran menikah pertama pada umur kurang dari 21 tahun, sedangkan wanita nonmigran yang menikah kurang dari 21 tahun jauh lebih besar, yaitu 64,38 persen.

Data fertilitas menunjukkan 85,13 persen wanita migran memiliki dua atau kurang anak lahir hidup, sedangkan wanita nonmigran hanya 67,64 persen. Hal ini merupakan indikasi bahwa fertilitas migran lebih rendah dibandingkan dengan nonmigran. Anehnya, data ini tidak paralel dengan penggunaan alat kontrasepsi. Jumlah wanita migran yang menggunakan alat kontrasepsi jauh lebih rendah (48,70 persen) dibandingkan dengan wanita nonmigran yang tercatat 60,02 persen. Akan tetapi, kondisi sebaliknya terlihat pada pemakaian alat kontrasepsi Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang meliputi alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dan implan. Kontrasepsi mantap pada wanita migran tercatat lebih tinggi, yaitu 28,24 persen, dibandingkan dengan wanita nonmigran yang hanya 18,67 persen.

Alasan tidak ber-KB karena takut efek samping diungkapkan oleh 9,67 persen migran dan 13,04 persen wanita nonmigran. Sementara itu, responden mengatakan tidak ber-KB karena alasan terganggunya fertilitas diungkapkan oleh 16,67 persen migran dan 26,37 persen oleh wanita nonmigran. Berkaitan dengan proses persalinan, untuk penolong persalinan anak terakhir, wanita migran yang persalinannya ditolong oleh dukun beranak/*paraji* sebesar 3,17 persen, sedangkan wanita nonmigran 9,06 persen.

Dilihat dari variabel sosial ekonomi, yaitu status pekerjaan, jenis usaha, lapangan usaha utama, umur kawin pertama kurang dari 21 tahun, jumlah anak lahir hidup kurang atau sama dengan dua anak, pemakaian alat dan obat kontrasepsi, alasan tidak ber-KB, dan penolong persalinan; pada umumnya WPK 15-49 tahun yang berstatus migran berada pada status yang lebih baik dibandingkan dengan WPK nonmigran. Melihat daerah asal terbesar migran risen adalah DKI Jakarta, yang merupakan ibu kota negara, besar kemungkinan kaum migran risen ini telah berada pada posisi yang lebih baik daripada penduduk nonmigran. Seperti pada variabel demografi umur kawin pertama di bawah 21 tahun, hal itu lebih banyak terjadi pada penduduk nonmigran. Umur kawin pertama Provinsi Jawa Barat menurut hasil SDKI 2012 masih berada di bawah 20 tahun. Demikian pula jika ditinjau dari penolong persalinan oleh dukun beranak/*paraji*, WPK migran yang sebagian besar berasal dari DKI Jakarta lebih mudah mengakses penolong persalinan dari tenaga medis di fasilitas kesehatan yang ada.

Fertilitas Migran dan Faktoryang Memengaruhi

Perlu dicatat bahwa dalam analisis regresi, yang digunakan sebagai variabel tergantung adalah rata-rata jumlah anak lahir hidup yang diukur dalam bentuk variabel *dummy*, yaitu kurang atau sama dengan dua dan lebih besar dari dua. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa jumlah anak dua merupakan *benchmark* untuk menjelaskan jumlah anak sedikit atau banyak. Wanita nonmigran (risen masuk) pernah kawin 15-49 tahun mempunyai 1,68 kali kemungkinan (*odds*) untuk mempunyai anak lebih dari dua (>2) dibandingkan dengan wanita migran pernah kawin 15-49 tahun. Dengan kata lain, wanita migran (risen masuk) mempunyai 0,595 kali kemungkinan (*odds*) untuk mempunyai anak >2 dibandingkan dengan yang nonmigran (lihat Tabel 2).

Hasil ini sekaligus menegaskan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa migran memiliki fertilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nonmigran. Jika yang digunakan adalah *socialization hypothesis*, maka fertilitas migran seharusnya merefleksikan fertilitas daerah asal. Dalam pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa sebagian besar migran berasal dari DKI Jakarta yang notabene memiliki angka fertilitas yang lebih rendah. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa TFR di DKI Jakarta adalah 2,3; sedangkan di Jawa Barat adalah 2,5. Tampaknya perbedaan ini terkait dengan kondisi sosial ekonomi.

Faktor apakah yang mampu menjelaskan perbedaan tersebut? Hasil analisis menunjukkan bahwa daerah tempat tinggal, pendidikan (dengan derajat kepercayaan 10 persen), usia kawin pertama, pekerjaan, dan pemakaian kontrasepsi berpengaruh secara signifikan terhadap fertilitas (jumlah anak lahir hidup) pada wanita pernah kawin 15-49 tahun (Tabel 2).

Tabel 2 Koefisien Regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Daerah(1)	.224	.043	26.853	1	.000	1.251
Pendid(1)	-.135	.081	2.749	1	.097	.874
ukp(1)	.943	.046	420.920	1	.000	2.568
migranrisen(1)	-.519	.191	7.359	1	.007	.595
Pkontrasepsi(1)	.786	.049	260.580	1	.000	2.195
Pekerjaan(1)	-.247	.040	37.613	1	.000	.781
Umur	.156	.003	2489.355	1	0.000	1.168
Constant	-7.694	.164	2188.595	1	0.000	.000

Sumber: Susenas, 2015 (diolah)

Tabel 2 juga menunjukkan beberapa isu yang menarik sebagai berikut.

1. Wanita pernah kawin 15-49 tahun yang tinggal di daerah perkotaan mempunyai 1,25 kali kemungkinan (*odds*) untuk mempunyai anak lebih dari dua (> 2) dibandingkan dengan wanita pernah kawin 15-49 tahun yang tinggal di desa.
2. Wanita pernah kawin 15-49 tahun yang memiliki pendidikan setingkat SMA ke bawah (\leq SMA) mempunyai 1,144 kali kemungkinan (*odds*) untuk mempunyai anak lebih dari dua (>2) dibandingkan dengan wanita pernah kawin 15-19 tahun yang memiliki pendidikan di atas SMA (>SMA). Dapat dikatakan pula bahwa wanita yang pendidikan >SMA mempunyai 0,87 kali kemungkinan untuk mempunyai anak lebih dari dua (>2) dibandingkan dengan wanita pernah kawin 15-19 tahun yang memiliki pendidikan di bawah atau setingkat SMA (\leq SMA).
3. Wanita pernah kawin 15-49 tahun yang usia kawin pertamanya di bawah umur 21 tahun (UKP <21) mempunyai 2,57 kali kemungkinan (*odds*) untuk mempunyai anak >2 dibandingkan dengan wanita pernah kawin 15-49 tahun yang usia kawin pertamanya berumur 21 tahun ke atas (UKP \geq 21).
4. Wanita pernah kawin 15-49 tahun yang tidak bekerja mempunyai 1,28 kali kemungkinan (*odds*) untuk mempunyai anak lebih dari dua (>2) dibandingkan dengan wanita pernah kawin 15-49 tahun yang bekerja. Dengan kata lain, wanita bekerja mempunyai 0,78 kali kemungkinan (*odds*) untuk mempunyai anak >2 dibandingkan dengan yang tidak bekerja.
5. Wanita yang menggunakan kontrasepsi (pernah dan sedang) mempunyai 2,19 kali kemungkinan (*odds*) untuk mempunyai anak >2 dibandingkan dengan yang tidak pernah menggunakan kontrasepsi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan WPK mempunyai anak lebih besar daripada 2 adalah mereka yang bertempat tinggal di perkotaan, berpendidikan rendah, usia kawin kurang dari 21 tahun, dan tidak bekerja. Wanita nonmigran berpeluang lebih besar untuk memiliki anak lebih daripada dua orang dibandingkan dengan

WPK migran. Keadaan ini sesuai dengan teori yang menjelaskan perbedaan pola fertilitas di antara migran dan nonmigran, yaitu *socialization*. Teori itu menyatakan bahwa keputusan mengenai fertilitas dipengaruhi oleh lingkungan keluarga pada masa kecil (di daerah asal) (Caldwell, 1982; Kulu, 2003; Hervitz, 1985; Ribe & Schultz, 1980; Herartri, Rina, dkk., 2013).

Wanita pernah kawin 15-49 tahun yang bertempat tinggal di perkotaan berpeluang memiliki anak lebih daripada dua anak dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini sesuai dengan hasil SDKI 2007 dan SDKI 2012 Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa tingkat angka fertilitas total (TFR) di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

WPK 15-49 tahun yang berpendidikan SLTA ke bawah, umur kawin pertama kurang dari 21 tahun, dan tidak bekerja berpeluang memiliki anak lebih daripada dua anak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa wanita yang berpendidikan lebih rendah cenderung tidak memiliki pekerjaan dan menikah pada usia yang lebih muda.

Hal yang aneh adalah hasil yang menunjukkan bahwa WPK yang menggunakan alat kontrasepsi memiliki kemungkinan lebih besar untuk memiliki anak >2 dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan. Dalam penelitian ini belum dianalisis lebih lanjut tentang pengaruh faktor yang terkait dengan penggunaan kontrasepsi, misalnya jenis kontrasepsi dan angka keberlangsungan (*continuation rate*) terhadap fertilitas. Data Susenas 2015 tidak menyediakan data riwayat pemakaian kontrasepsi karena survei tersebut tidak ditujukan untuk secara khusus meneliti tentang pemakaian kontrasepsi.

Kesimpulan

Sebagian besar WPK yang berstatus migran risen di Jawa Barat adalah mereka yang tergolong usia produktif dan memiliki umur reproduksi yang masih potensial. Namun, dibandingkan dengan WPK nonmigran, ternyata peluang untuk memiliki anak lebih daripada dua orang lebih kecil dibandingkan dengan WPK nonmigran. WPK migran belum terbukti meningkatkan angka fertilitas di Provinsi Jawa Barat. Wanita pernah kawin 15-49 tahun yang tinggal di wilayah perkotaan, memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan tidak bekerja yang dapat digolongkan sebagai penduduk miskin perkotaan berpeluang memiliki anak lebih daripada dua orang.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan pada pihak BKKBN Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan dukungan terhadap penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Alfana, Muhammad Arif Fahrudin dan Sri Rum Giyarsih. 2015. "Fertilitas dan Migrasi: Kebijakan Kependudukan Untuk Migrasi di Kabupaten Sleman". *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 3 No 1.
- Caldwell, J. 1982. *Theory of Fertility Decline*. London: Academic Press.
- Davis, Kingsley and Judith Blake. 1956. "Social Structure and Fertility: An Analytic Framework". *Economic Development and Cultural Change*, 4(3): 211–235.
- Haribaik, Maria Adelia Suryani, Ida Bagus Made Astawa, Sutarjo. 2017. "Studi Komparatif Tentang Fertilitas Antara Migran dan Non Migran di Kota Singaraja".

FERTILITAS MIGRAN DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI FERTILITAS DI JAWA BARAT

Jurnal Pendidikan Geografi. Vol. 11, No. 2. Diunduh dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/view/10743> pada 30 November 2017.

- Herartri, Rina; Septi Nurhayati, dan Yusna Afrilda. 2013. *Perbedaan Fertilitas Wanita Migran dan Non Migran di Provinsi Jawa Barat*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan BKKBN Pusat.
- Hervitz, Hugo M. 1985. *Selectivity, Adaptation or Disruptive? A Comparison of Alternative Hypothesis of Migration on Fertility: The Case of Brazil* International Migration Review.
- Kulu, H. 2003. "Migration and Fertility: Competing Hypothesis Re-examined". *MPIDR Working Paper, 2003-035*, Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research.
- Ribe, H. & Schultz, P. 1980. *Migrant and Native Fertility at Destination Colombia: Are Migrant Selected according to their Reproductive Preferences?* Unpublished monograph.
- Sudibia, I Ketut, Ni Nyoman Dayuh Imbawan, AAI Marhaeni, Rusta Dewi Rustiriyuni. 2013. "Studi Komparatif Fertilitas Penduduk Antara Migran dan Non Migran di Provinsi Bali". *Piramida*, Vol. 2. No IX : 77-88.

**URBANIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA:
DEMOGRAPHIC PERSPECTIVES ANALYSIS**

Mustafa Elnagi Elsamani Hassan¹ and Agus Joko Pitoyo²

¹Department of Population and Human Studies, Faculty of Geographical and Environmental Sciences, Khartoum University, Sudan, ²Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Correspondence: Mustafa Elnagi Elsamani Hassan (e-mail: mustafa2031991@gmail.com & mustafa2031991@uofk.edu)

Abstract

The level of urbanization has increased from 17.2% to 49.7% in the last three decades. The urbanization process in Java is occurring more dramatically and rapidly compared to that in outer Java. There is a growing trend of urbanization in the Java Islands, where the level of urbanization has increased from 11.55% to 33.64% in 1971-2010. The ratio of urban population of all the provinces in Indonesia was greater than 20% in 2010 exclude East Nusa Tenggara. There is a strong positive relationship between the level of regional economic development and level of urbanization. Evaluation of urbanization can be improved from two aspects: first, the forward conditions of urbanization can be analyzed, such as the number of non-farm jobs, infrastructure level and the supply capacity of public services. Second, the forward effects of urbanization should be comprehensively evaluated, including economic, social, and environmental sustainability.

Keywords: urbanization, economic development, demography

Introduction

Urbanization has been seen as an integral part of economic growth, as a defining phenomenon of the 21st century, it puts the developing world in a position of economic and demographic transformation with a complex and nuance development process. Urbanization is the massive and unprecedented historical movement of people from one rural country side to the bourgeoning cities of the world (Marmara and Usman, 2015: 2).

The historical facts and statistics reveal that almost all of the developed countries have a

higher level of GDP per capita and also a higher level of urbanization. Numerous studies have previously found that the level of urbanization is closely correlated with the level of GDP per capita (Chen M. & other, 2014). It is widely accepted that economic growth promote the expansion of industries and an increase in urban population in a country; conversely, urbanization also promotes economic growth to same extent by provide cheap labour for instance.

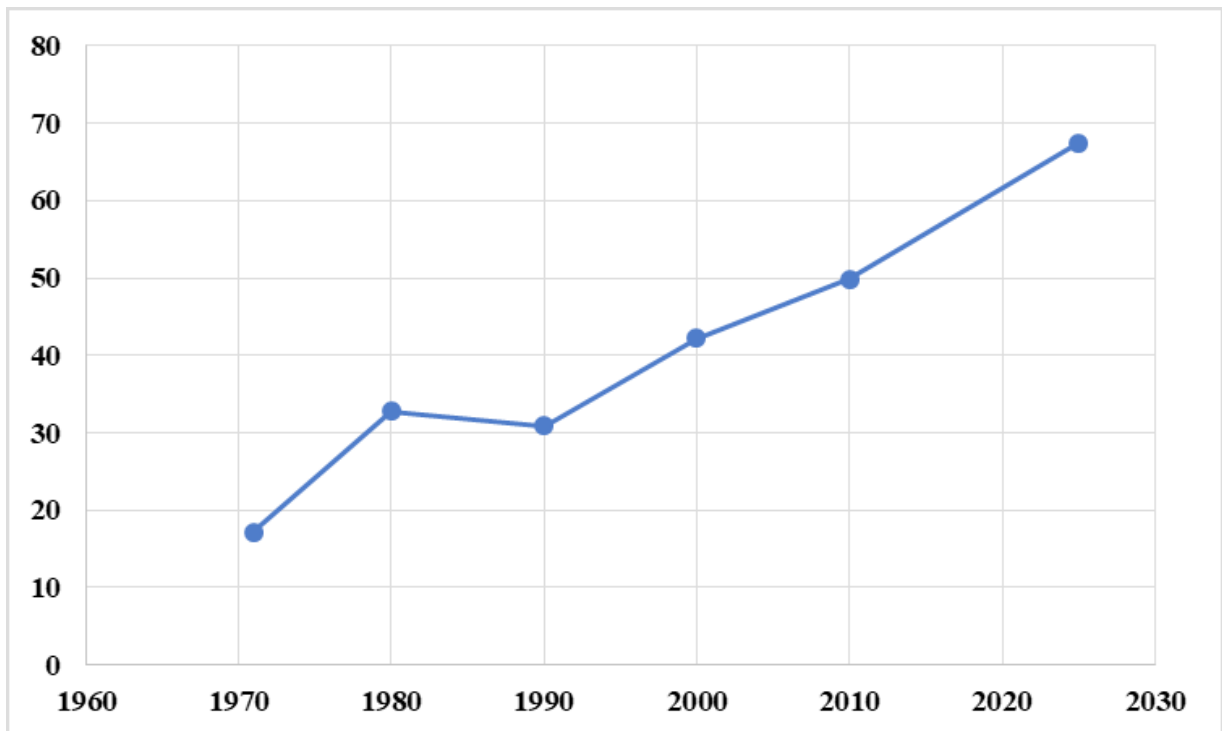
Urbanization is an inevitable process that occurs in tandem with economic development. The size density, and diversity of an urban population lead to innovation, the division of

labour, and economic growth. Urbanization has positive social impact as it makes it easier to provide access to services such as education and health care. The impact of urbanization is, however, not only positive. The size of density of population and of economic activities can lead to congestion, pollution, alienation and crime. More over poverty remains a serious problem and may increase as employment in agriculture declines (Sheng and Thuzar, 2012: 67).

The debate over the role of urbanization in the Third World has culminated in two major arguments (Sukamdi, 1996). The first is the idea that urbanization is dependent on a nation's level of development and should be analysed as such. The second argument views urbanization as an independent process which either stimulates or inhibits national development (Sukamdi, 1996). Statistical evidence suggests that the richer a nation, the higher will be the level of urbanization

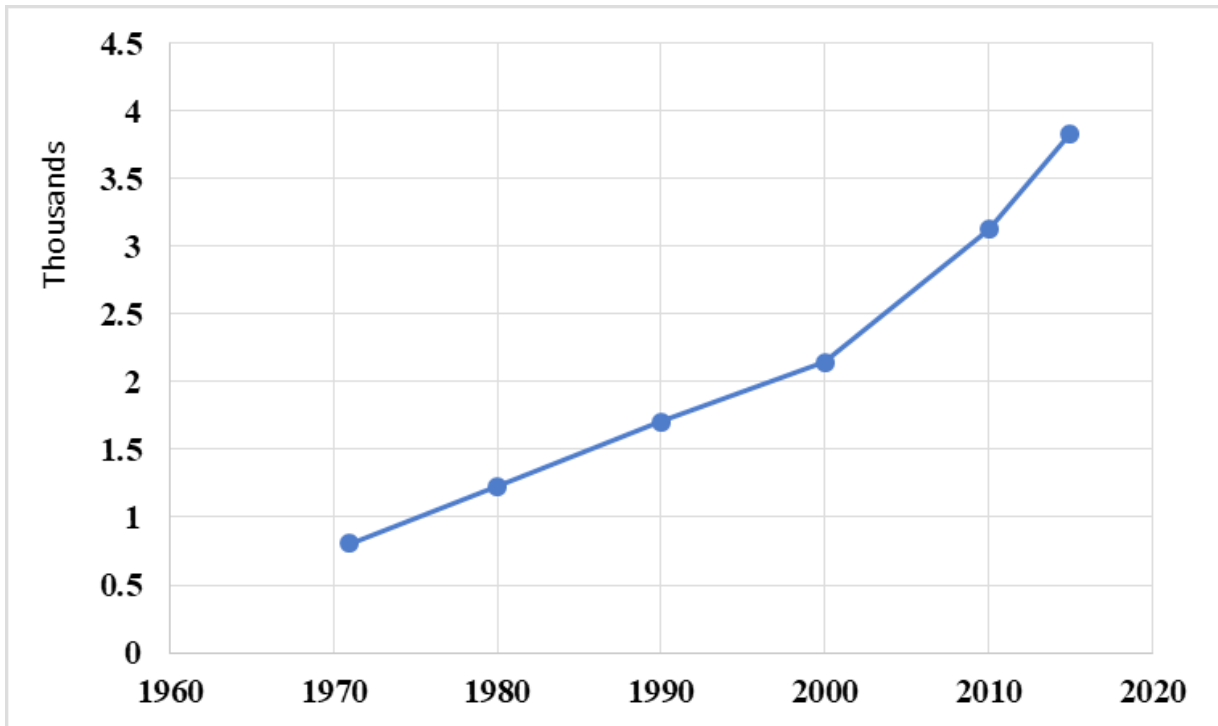
and that urban economy generally plays an important role in overall development (World Bank, 1986; Sukamdi, 1996).

Indonesia, the largest archipelagic country in the world with more than 17,500 islands, has grown at an average annual GDP growth rate of around 5.5% since it recovered from the 1997 financial crisis. This relatively high growth has been associated with rapid urbanization and the geographical concentration of economic activities, particularly in a few major cities, such as Jakarta. In the 1990s, the proportion of urban population was below 40%, but it has increased gradually and by 2012, exceeded 50%, recently is expected to be more than 50%. It is thus useful to know the relationship between economic growth (Gross Regional Domestic Product GRDP) and the process of urbanization in Indonesia, since urbanization is one of the major of economic development (Sagala, Perdamen and other, 2014: 135).



Source: Djaja Komara, 2012

Figure 1 Sharing Urban Indonesia between 1971-2025%



Source: World Bank data, 2017

Figure 2 GDP per Capita (constant 2010 US\$)

In Indonesia, since 1971, the development effort has produced significant results (Yulius, 1990: 1). Rapid economic growth during the 1970s brought a Indonesia into lower middle income countries by 804 \$ in 1971 into 3.843 per capita according the constant 2010 (World Bank data, 2017). In other hand, the proportion of urban population is increased dramatically during 1971 -2010 by 20.5 millions in 1971 (17.2) into 118.3 millions in 2010 (49.8), and expected to be 67.5% by 2025 (Abd Wahab, 2015; Djaja, 2012).

Data and Methods

Urbanization began during the Industrial Revolution, and refers to the increasing number of people that live in urban areas. Urbanization is not only about a simple increase in the number of urban residents,

but also involves a series change from rural to urban styles in terms of industry structure, employment, living conditions, and social public services. Economic growth is the increase in the value of goods and services produced by a country or regional economy over time. Two key indicators are selected to measure economic development level: gross domestic product (GDP) per capita, and level of urbanization measure by proportion of urban population (Chen M. & other, 2014). The study is a contribution to the debate on the above mentioned urban economic. It attempts to verify whether there is a causal relationship between the urbanization process and economic development.

The research data come from the Central Bureau of Statistics (*Badan Pusat Statistik Indonesia*) publications and reports. The

empirical data cover 33 province in Indonesia. The source of data about GRDP collected from Statistic Yearbook of Indonesia 1984, 1994, 2003, and 2015 using constant price. The number of provinces of the statistic collection periods ranging between 27 to 33 province in 1971 to 2010. Urban population refers to people living in urban areas, as defined by national statistical offices (*Badan Pusat Statistik Indonesia/ BPS*). The source of the proportion of urban population is collected from the several Indonesia national censuses during 1980 to 2010. In addition, the objective of this paper is to examine the correlation difference between the level and speed of urbanization and economic growth level.

It is widely accepted that GIS and associated analytical software have played a critical role in spatial pattern analysis. The spatial analyst function was used to analyze the regional urbanization process and changes in the speed of urbanization and economic growth during 1980–2010. Moreover, to determine whether there is a correlation difference between level and speed in the relationship of urbanization and economic growth, we used the analysis methods of person correlation test, to test the mutual relationship. If the urbanization level and GDP per capita have a positive relationship, and the speed of urbanization and the economic growth rate are also positive simultaneously. In this case, it provides evidence that urbanization changes of level and speed, no doubt, in the same direction with economic growth. Thus, a positive urbanization policy would undoubtedly be supported. Otherwise, the rationale for pursuing accelerated urbanization would be weakened and would need to be reconsidered (Chen M. & other, 2014: 2).

The Patterns of Urbanization in Indonesia

Indonesia is the third largest country in Asia after China and India. Unlike these other countries, Indonesia is an archipelago, comprised of about 13,000 island and with a total area of about 2 million square kilometers. The central government of Indonesia has divided the country into 34 provinces (See Figure 3). However, it is also customary to divide the nation according to division of water and natural resources, which leads to six major region (Sumatera, Java, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku/Papua) or alternative two major region Java and Outer Java (BPS, 2015).

As show in Figure 3, the major characteristic of Java is its high population density, that is, more than 1,000 inhabitants per square kilometers (BPS, 2015). The provinces and region of Indonesia differ not only in their social customs, language, and illiteracy rate but of the economic, the provision of public services, and utilities. As a result, they have experience different economic growth rate. This is reflected in various indicators of economic development such per capital regional domestic production, employment, life expectancy, education, etc.

Furthermore the provinces and regions of Indonesia also vary greatly in the extent to which they have become urbanized. The region pattern of urbanization and urban growth in Indonesia is presented in Table 1. This table show that among the six major groups of islands, Java is the most urbanized province since 1971 up to 2010. In 1971 the total number of urban population was 11.55% and by 2010 increase to reach 33.64% from the total number of urban population in Indonesia in 2010, with urban growth 22.13 during 1971-2010, while Maluku/Papua is the least urbanized at 0.25% in 1971 and increased into

0.76% by 2010. As metropolitan region, Java contains more than 65% of Indonesia's urban population, although it has only about the 57.5% of the total population of the country. This indicates significant regional differences between Java and Outer Java (other islands). The process of urbanization in Indonesia reflects the adjustment and relocation of labour and population, not only between rural and urban area but also between regions. Such adjustment and relocation have been biased toward the major cities on Java. The higher degree of urbanization and size of urban population in Java imply that many of modern, non-agriculture activities have concentrated on Java island as well Sumatera. This raises question pertaining to causes and effects of such pattern and the impact of urbanization on development in general and economic development particularly of each region in Indonesia.

Patterns and Level of Regional Urbanization in Indonesia (Provincial Level)

A major feature of the urban growth pattern in Indonesia is its acceleration over the past three decades. Table 2 shows that absolute urban population growth was 2,250,702 persons, during 1980-1990 period, and increased to 3,111,417 persons during 2000-2010. This implies that urban population in Indonesia in 1990 had grown approximately around 23 millions persons than 1980, and around 31 million persons during period 2000-2010. The regional patterns of urban growth is shown in Table 3. Among the regionals, urban growth was higher than national growth, from 1980-1990 in Aceh, West Sumatera, Riau, Jambi, Bengkulu, West Java, Yogyakarta, Bali, East Nusa Tenggara, Central Kalimantan, East Kalimantan, and Central Sulawesi.

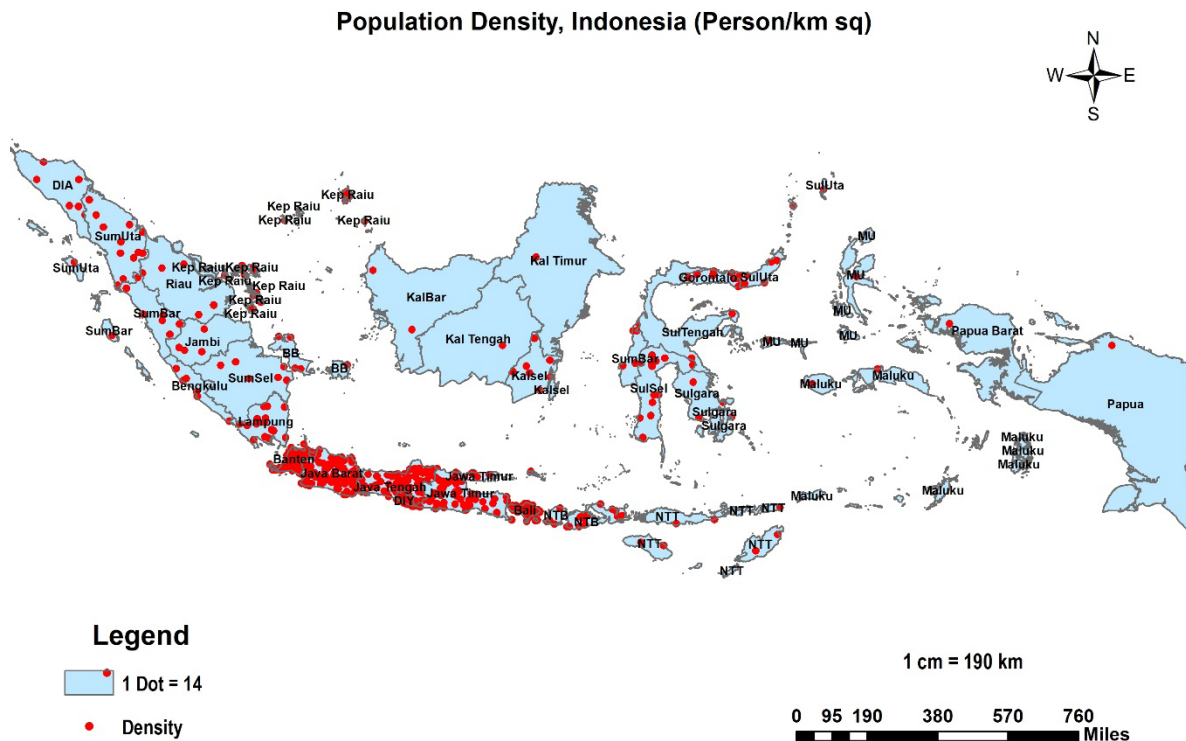


Figure 3 Population Density, Indonesia 2010 (person/km²)

Table 1 Percentage of Urban Population per Region to Total Percentage of Population in Indonesia and Growth Rate, 1971-2010

Region	1971	%	1980	%	1990	%	2000	%	2010	%	Growth 1971-2010 (%)
Sumatera	3557	3,01	5486	3,73	9313	5,21	13879	6,9	19788	8,33	5,22
Java	13675	11,55	22953	15,62	38395	21,49	59056	29,35	79950	33,64	22,13
N T and Bali	516	0,44	953	0,65	3461	1,94	3506	1,74	5126	2,16	1,72
Kalimantan	1049	0,89	1443	0,98	2511	1,41	3920	1,95	5799	2,44	1,5
Sulawasi	1373	1,16	1655	1,13	2789	1,56	4001	1,99	5843	2,46	1,28
Maluku/ Papua	295	0,25	405	0,28	750	0,42	872	0,43	1814	0,76	0,52
Indonesia	20465	17,29	32895	22,39	55442	31,04	85234	42,35	118320	49,79	32,37

Source: BPS censuses reports 1971,1980, 1990, 2000, and 2010

However, urban growth in Aceh, West Sumatera, West Java, East Nusa Tenggara, Central Sulawesi, and East Kalimantan are still higher than the national rate through 2000-2010. While the urban growth was higher than national level in Sulawesi Utara, South East Sulawesi, Maluku, North Maluku, West Papua, Papua, Jambi, Lampung, Kep. Bangka Belitung, West Nusa Tenggara, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, and Banten, which were not in last period.

This urban population growth was dominated by Java, where their rates of urban growth were still higher than national rate through 1980-1990 period. Java contributed around 69% and this decreased to 67% in 2000-2010 period (Table 2). Thus, the contribution of Java to total urban growth is much higher than its share to total population (less than 60% in 2010). This reveals the strength of Java's cities in attracting in-migration from outer Islands. This phenomenon has been the major concern of population distribution

policies in Indonesia, and indeed, even since the colonial period.

Looking at the rate of urban growth in each province, during 1980-1990 period the rate of urban growth was substantially higher Aceh, Jambi, Bengkulu, West Jawa, DIY, Central Sulawesi, South East Sulawesi, and Maluku, and lesser in South Sumatera, Lampung, West Nusa Tenggara, West Kalimantan, South Sulawesi, and Papua. By 2000-2010 period Aceh, West Java, Banten, Central Sulawesi, South East Sulawesi, Maluku, and Papua, and lesser extent in Riau, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, and Gorontalo.

The attribute data relating to urbanization levels in 1971 and 2010 are put together with the regional spatial data and visualized in an GIS environment. Looking at the regional distribution of urbanization level, it is easy to see an irreversible trend of Indonesia urbanization and remarkable growth in almost all provinces during 1971–2010 (Figure 4). Nationally, the urbanization level has risen from 17.2% in 1971 to 49.79% in 2010. In

**Table 2 Urban Growth Rate and Absolute by Province,
Periods 1980-1990 and 2000-2010**

Province	Growth Rate		Absolute/ Thousands	
	1980-1990	2000-2010	1980-1990	2000-2010
Nanggroe Aceh	13	21	307	854
North Sumatera	7	3	1,511	1,504
West Sumatera	9	5	375	648
Riau	8	0.4	460	92
Jambi	14	4	250	267
South Sumatera	4	1	570	307
Bengkulu	23	2	168	72
Lampung	3	4	171	559
Kep.Bangka Belitung	-	6	-	215
Jakarta	4	2	,2161	1261
West Jawa	11	6	6,440	10,314
Central Jawa	6	2	2,942	2,312
Yogyakarta	11	3	687	497
East Jawa	6	3	3,208	,3613
Banten	-	7	-	2,898
Bali	10	5	371	775
West Nusa Tenggara	5	4	199	545
East Nusa Tenggara	8	5	167	300
West Kalimantan	5	4	229	391
Central Kalimantan	15	6	147	245
South Kalimantan	6	4	263	445
East Kalimantan	9	6	430	798
Sulawes Utara	6	4	211	296
Central Sulawesi	14	6	165	245
South Sulawesi	5	3	589	652
South East Sulawesi	16	7	142	242
Gorontalo	-	3	-	53
Maluku	13	9	201	272
North Maluku	-	4	-	84
Papua	6	10	145	359
Indonesia	7	4	22,507	33,086

Source: BPS censuses reports 1971,1980, 1990, 2000, and 2010

Outer Java Islands, the urban proportion has increased rapidly from 5.74% to 16.15% over the same period. Interestingly, there is also a growing trend of urbanization in the Java Islands, where the level of urbanization has increased from 11.55% to 33.64% in 1971-2010. The color difference is clearer in the Outer Java, especially in Nusa Tenggara and Sumatera, Kalimantan, and Sulawesi which represent the bulk of the urbanization process and where urban population growth has occurred in provinces were non-urbanized yet in 1971 (Figure 4).

However, the overall relative level of distribution of urbanization on a national scale is basically changed over the time period. The Java provinces regions remain at a higher level of urbanization, while the Outer Java provinces are relatively lower. Note that most Outer Java have a distinctly higher urbanization level than Java provinces. The urban population ratio of East Kalimantan, for example, reached 62% in 2010, which exceeds the level in the vast majority of Outer Java.

We will now interpret the changes in urbanization level in more detail, in particular their evolution over the past 39 years, using an approach of classification by different levels of urbanization. There is significant diversity in the urbanization levels, divided into ten types ranging from 0% to 100%, derived from different provinces or regions.

In 1971, looking at the regional distribution of urbanization levels, it is easy to see a massive concentration of urban people between 10% and 20% and includes almost the majority of provinces of Indonesia. The second classification is in the 20–30% range, including South Kalimantan, South Sumatera, and Jambi. The third classification including only East Kalimantan, which ranging between 31%–40% of urban population. The extremely

level of urbanization is mainly, concentrated in the Jakarta, by 100 level of urbanization.

The regional of urbanization in 2010 differs slightly from that of 1971. This pattern of urban growth can be presented by dividing the 33 country provinces into following categories. Take a look at the regional distribution of urbanization levels, it is easy to see a massive concentration of urban population between 30% and 40% and includes almost the majority of provinces of Indonesia, such as West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, West Kalimantan, Central Kalimantan, Central Sulawesi, Gorontalo, Sulawesi Barat, and North Maluku. The second category ranging between 41%–50%, including North Sumatera, Bangka Belitung, Central Java, East Java, Bali, South Kalimantan, and North Sulawesi. The third category is ranging 51%–70% range, including Bali, Yogyakarta, West Java, Banten, and East Kalimantan. While the fourth category including only Riau islands, which ranging between 81%–90% of urban population. The extremely level of urbanization is mainly, concentrated in Jakarta, by 100 level of urbanization. Lastly, the only with urban population less than 20% is East Nusa Tenggara.

The Correlation of Urbanization Level and Economic Growth

A major indicator of economic development is Gross Domestic Product (GDP) per capita for each province. The Central Bureau of Statistic (*Badan Pusat Statistik*) of Indonesia estimates and publishes regional income data based on a Gross Regional Domestic Product (GRDP) at level of province. To compile there statistic, two approaches have been used: production approach and expenditure approach. The first approach is to measure value added produced

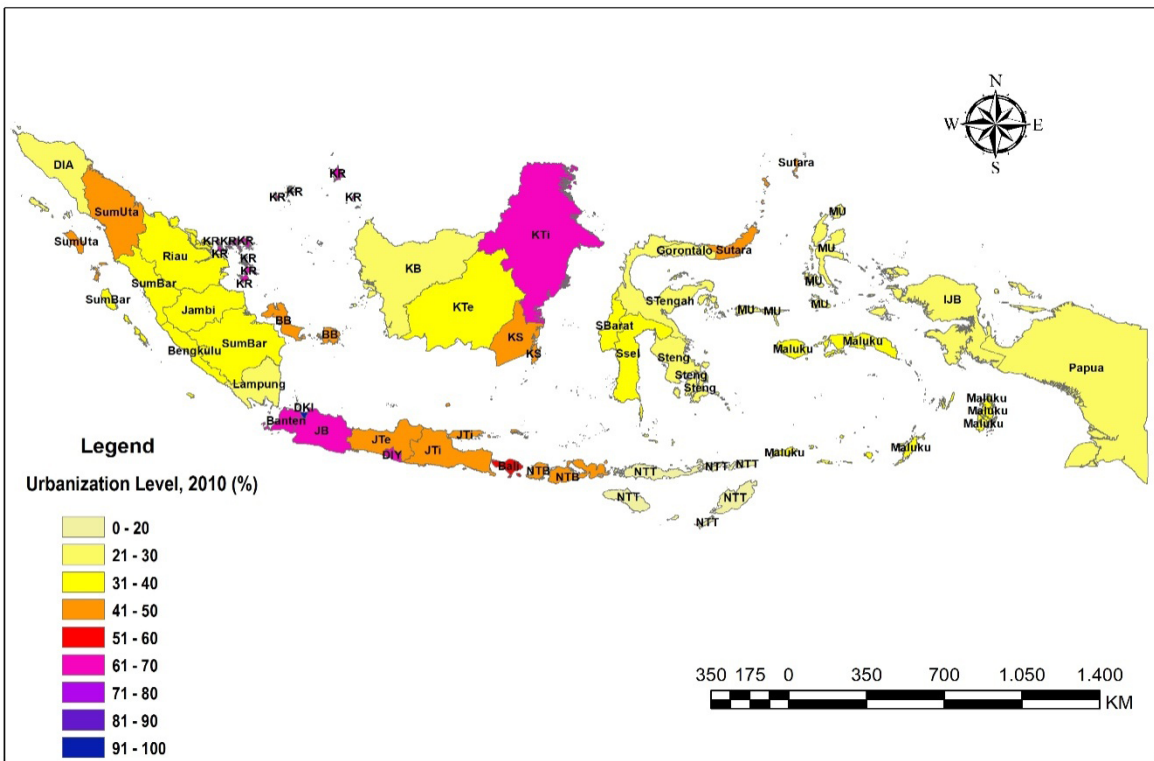
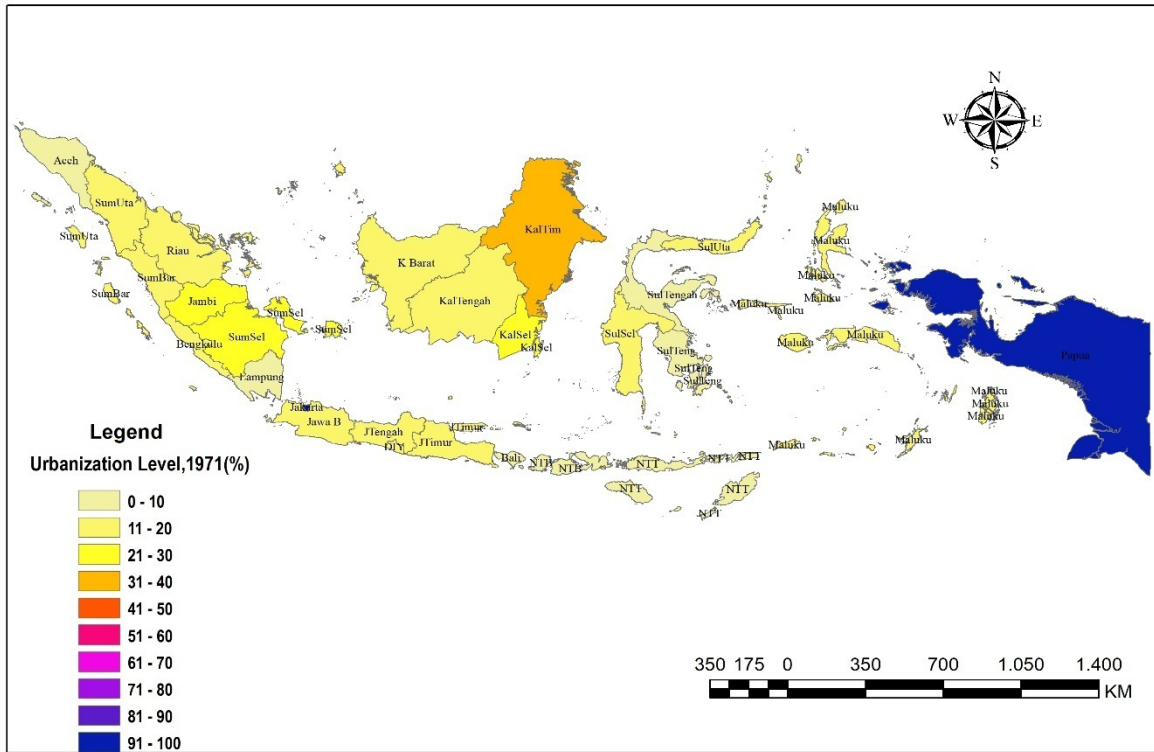


Figure 4 Regional patterns of changes in urbanization 1971-2010

by various kinds of economic activities, while the second approach is to measure final use of country's output. In other words, GRDP is the sum of the total value added produced by all economic activities and the way using it (BPS, 2015: 263).

Addition to the possibility of bias through calculations, the estimation of regional income based on GRDP also appear to be somewhat less realistic since they do not take into account the impacts of money and commodity flows (or the regional balance of payments) between regions, on regional income. However, the GRDP per capita is not necessarily irrelevant as an independent variable affecting urbanization (Yulius, 1990: 63). Another problem is the difference of the base years of calculation between GRDPs of 1980 -2010. The former is based on 1975 constant prices while the later is based on 2010 constant prices. An attempt is therefore made to deflate the later to the level of the former in order to estimate the growth of regional GDP per capita at a comparable period of urbanization.

Table 3 shows correlation analysis between the level of urbanization and GRDP per capita. It can be seemed that most the equation shows positive relationship between the level of urbanization economic development (measured by GRDP per capita

and regional variation in levels of urbanization. All correlation coefficients of the equations are highly significant at the 0.000 percent level of significance. This implies that the level of regional patterns of urbanization in Indonesia.

The results in Table 3 demonstrate that there is a strong relationship between level of urbanization and economic development, with correlation coefficients of around .87% for 1990. This means that the variations in regional urbanization levels Indonesia can be explained by the GRDP per capita in each region. However, the foregoing generalization conceals some spatial aspects of both regional economic development and urbanization. In order to obtain a greater understanding of how and in which regions economic development affects urbanization, it will be useful to analyze the relationship between regional GDP per capita and urbanization levels using the cross-tabulation technique.

The gross tabulation analysis produces some interesting features concerning the regional patterns of urbanization in relation to regional economic development in Indonesia. Data in Table 4 and 5 can be summarized as following. First, the provinces which have urbanization levels equal to and higher than the national average are regarded as the more urbanized regions. By 1980, this category comprised the provinces of Jakarta,

Table 3 The Correlation GRDP with the Level of Regional Urbanization

Year	r Correlation	Significance	N
1980	.704	0.000	26
1990	.872	0.000	26
2000	.740	0.000	31
2010	.586	0.000	33

Source: *Badan Pusat Statistik BPS, Censuses and Statistic Yearbook of Indonesia*

East Kalimantan, South Sumatera, Riau, Yogyakarta and North Sumatera. However, by 2010, Jakarta, Riau Islands, Banten, West Java, Yogyakarta, Bali, and East Kalimantan were in the category. Second, the less urbanized regions are those provinces with urbanization levels ranging from 21-15% for 1980 and from 34-49% for 2010. Finally, the provinces with urbanization levels lower than 15 and 33 (1980-2010 respectively) are present are classified as least urbanized regions.

As with urbanization, GRDP per capita should also be classified into three groups. This classification can be carried out by modifying Kaassen's classification method (Yulius, 1990: 66). In the present study the provinces with GDP levels higher than weighted average of GRDP per capita for Indonesia as a whole are classified as the more developed regions. The provinces which have GRDP per capita lower than the national averages are classified into less developed and underdeveloped (lagging) regions. The less developed and regions are defined here as the provinces with GDP level ranging between 86-118 Rupiahs in 1980 and 1,800-28,000 Rupiahs in 2010. The province with GDP levels lower these lower interval limits are included the lagging regions.

Based on the above classification, cross-tabulation between regional urbanization levels and the level of GRDP per capita is presented in Table 4 and 5. As shown in the main diagonal of the tables, there is a strong positive relationship between the level of regional economic development and level of urbanization. However, many provinces deviate from this generalization.

First, in the extreme cases, some provinces are classified as being more developed regions, but they are still less-urbanized or, simply put are experiencing downward deviation. There provinces include Central

Kalimantan in 1980, and Jambi, Papua, and West Papua in 2010. The reason behind the low level of urbanization in Papua and West Papua into the poor transportation network (roads, airports, stations, etc.) as well as the natural topographic limitation. It be concluded that basic industries may have less impact on urban growth when they have these characteristics. In most provinces specialized in primary products and resources-based industries have experienced economic growth faster than their rate of urbanization (Table 4 and 5). For instance, Central Kalimantan and Jambi has low level of urbanization although the level of economic development is high. This occurs because the main source of it economic growth is the export of primary product, such as timber, rattan and of other forest products. In Aceh, Lampung, West Kalimantan and Central Kalimantan, and South East Sulawesi the level of economic growth is medium, while its urbanization level is low. May resource based industries are found in this provinces such as wood processing, crumb-rubber, manufactured cement, coal and marble mining. However, the low level of urbanization due to the location of industries are not include functionally urban.

Second type of deviation is upward deviation. This is found in Yogyakarta, where the level of urbanization exceed its economic development as compared with the other provinces on the main diagonal of Table 4. There are least two possible explanation for this pattern of urbanization. One is based the history of province and another is based on the role and function of Yogyakarta in the national development plan of Indonesia. Historically, City of Yogyakarta was treated as the capital city of Kingdom Mataram before and after Dutch colonial rule. Through colonial period this city become one of the central cities of the colonial government. During the Independent

Table 4 Gross Regional Domestic Product per Capita and Levels of Urbanization, 1980

Level of Urbanization	GRDP per capita		
	High	Medium	Low
High	Jakarta East Kalimantan South Sumatera North Sumatera	Riau	Yogyakarta
Medium	North Sulawesi Papua	West Jawa East Jawa West Kalimantan South Sulawesi Bali	Central Jawa South Kalimantan
Low	Central Kalimantan	Jambi Aceh Maluku	West Sumatera Bengkulu Lampung Central Sulawesi South East Sulawesi East Nusa Tenggara West Nusa Tenggara

Source: *Badan Pusat Statistik/BPS*, Statistic Yearbook of Indonesia 1984

Table 5 Gross Regional Domestic Product per Capita and Levels of Urbanization, 2010

Level of urbanization	GRDP per capita		
	High	Medium	Low
High	Jakarta Riau Island East Kalimantan	West Jawa Banten Bali Yogyakarta	
Medium	Riau Bangka Islands	Belitung North Sumatera West Sumatera South Sumatera Jawa Central East Jawa South Kalimantan South Sulawesi North Sulawesi	West Nusa Tenggara Maluku West Sulawesi
Low	Jambi Papua West Papua	Aceh Lampung West Kalimantan Central Kalimantan South East Sulawesi	Bengkulu East Nusa Tenggara Gorontalo North Maluku Central Sulawesi

Source: *Badan Pusat Statistik/BPS*, Statistic Yearbook of Indonesia, 2015

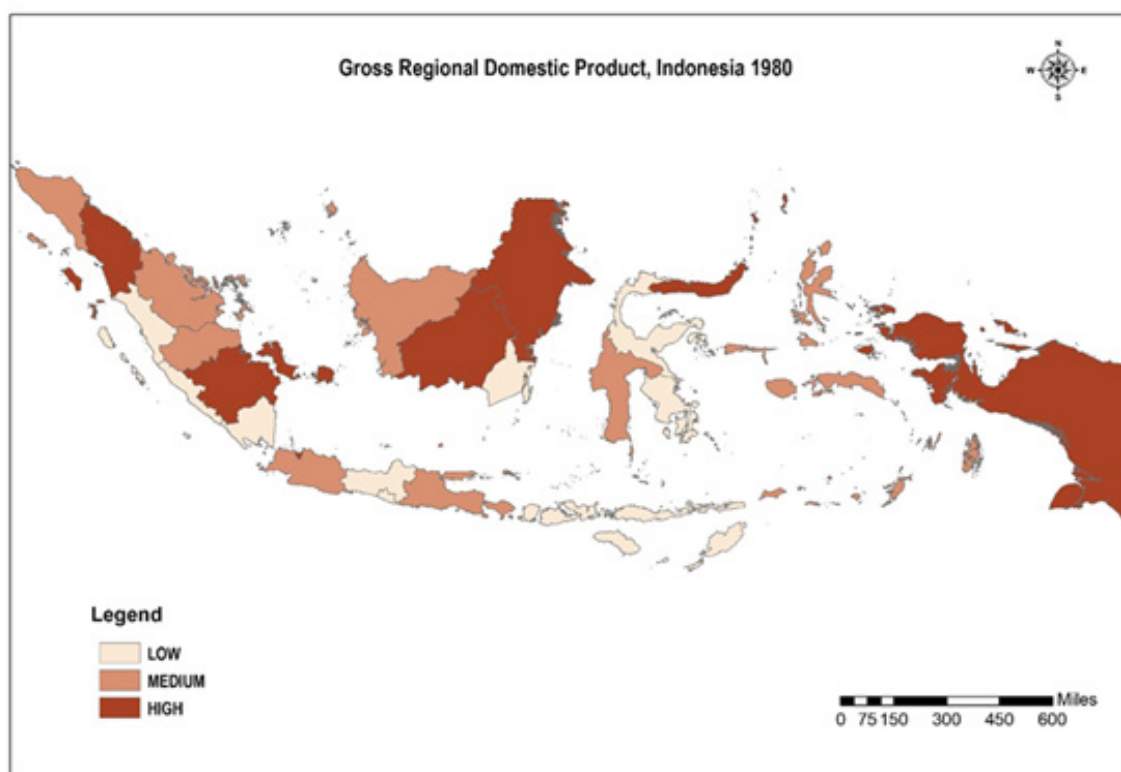
revolution of Indonesia, Yogyakarta was treated as the capital city of Indonesia since Jakarta was felt to be the center of Dutch imperialism.

Therefore, historical factor played a significant role in stimulating the urbanization process of Yogyakarta. Since independence, Yogyakarta has played a significant role in national development in Indonesia. This reflection in its prevision of educational and recreation of facilities. The growth of Yogyakarta has been stimulated mainly by its high quality of educational facilities, particularly for higher education, such University of Gadjah Mada and State Institute of Islamic Studies and several private universities. In addition, Yogyakarta has also become a tourism region since the province contains various historical areas of interest. Yogyakarta received a significant number of domestic and international visitors each year. Based on the urban base theory, the

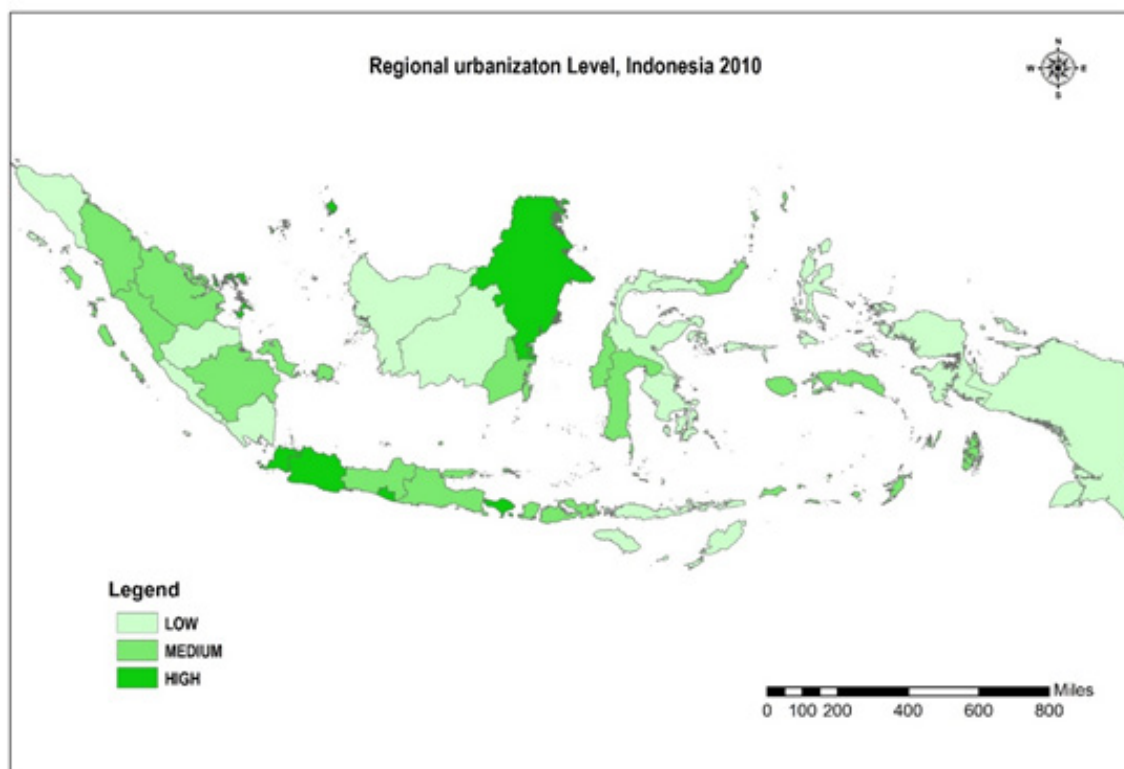
educational and tourism sectors are regarded as basic activities since the inflow of people in accompanied by an inflow of money and capital. As a result, the relative position of its level of economic development is lower that its urbanization level. Additionally, it is important to note that migrants to Yogyakarta from other provinces tend to be non-productive, in the sense that contribute to population size but not to GRDP. Finally, the difficulties in estimating value added emanate from the informal sector which is the dominating the economic activities in Yogyakarta, this affect the measurement of GRDP.

Conclusion

Careful pattern exploration and correlation analysis of regional empirical data during the last three decades in Indonesia have allowed a difference to be established between level and speed, and have permitted a re-



Figures 5a The regional urbanization level and gross domestic product, 1980



Figures 5b The regional urbanization level and gross domestic product, 2010

examination in detail of regional variation in the correlation between urbanization and economic development. A provincial level have already been selected to explore the pattern and level of urbanization and economic development. This study, however, is a one of conduct a differentiated analysis of levels and speeds of urbanization and economic development via an approach using a classification of urbanization levels on a regions scale in the period 1980–2010. The following key conclusions can be drawn and discussed.

The Indonesian has experienced an ongoing urbanizing process, and the urbanization level has increased from 17.2% to 49.7% in the last three decades. Urban center play a more important role in economic development Indonesia. The urbanization process in Java islands is occurring more dramatically and rapidly compared to that in outer Java islands. The urban proportion has

increased rapidly from 5.74% to 16.15% over the same period. Interestingly, there is also a growing trend of urbanization in the Java Islands, where the level of urbanization has increased from 11.55% to 33.64% in 1971–2010. The relative patterns, however, do not change the fact that Java islands have a higher level of urbanization than outer Java regions. Moreover, the proportion of urban population of all the provinces in Indonesia was greater than 20% in 2010 excluding East Nusa Tenggara.

Similar to urbanization effect, the high urbanization level group often has high levels of GDP per capita. In general, there is a strong positive relationship between the level of regional economic development and level of urbanization. However, many provinces deviate from this generalization. First, in the extreme cases, some provinces are classified as being more developed regions but they are still less-urbanized or, simply put are

experiencing downward deviation. There provinces include Central Kalimantan in 1980, and Jambi, Papua, and West Papua. The reason behind the low level of urbanization are the poor transportation network (roads, airports, stations, etc.), the natural topographic limitation and in most provinces specialized in primary products and resources which these location of industries are not include functionally urban. Second type of deviation is upward deviation. This is found in Yogyakarta, where the level of economic development is lower than level of urbanization. There are least two possible explanation for this pattern of urbanization. One is based the province history. Historically, the city of Yogyakarta was treated as the capital city of the kingdom Mataram before and after Dutch colonial rule. Another reason is based on the role and function of Yogyakarta in the national development plan of Indonesia. This reflection in its prevision of educational and recreation of facilities.

Further, urbanization is a complex issue that must be assessed not only in terms of urbanization speed or effects of economic growth. In order to increase the quality of the urbanization process, the forward conditions and backward effects must also be explored. It is suggested that the evaluation of urbanization can be improved from the following two aspects. First, the forward conditions of urbanization can be analyzed, such as the number of non-farm jobs, infrastructure level and the supply capacity of public services. Second, the forward effects of urbanization should be comprehensively evaluated, including economic, social, and environmental sustainability. Numerous studies have shown that urbanization has significant effects on contemporary hot topics, such as CO₂ emissions, climate change, water resources, biodiversity, and human health

(Chen, 2015). Only when all these facets are taken into consideration can we fully assess the urbanization process. Policy-makers in developing countries should seek multiple ways of enabling forms of urbanization that contribute to economic growth, an increase in jobs, environmental sustainability, and so on, rather than pursuing accelerated urbanization.

References

- Abd Wahab, Abd Wafiee. 2015. "Living in Cities: The Relationship between Urbanization and Economic Growth in Thailand versus Indonesia". In *Global Majority E-Journal*, 6 (2), 59-71.
- Badan Pusat Statistik. 1975. *Population of Indonesia: Population Census 1971*. Jakarta.
- _____. 1981. *Population of Indonesia: Results of Population Census 1980*. Jakarta.
- _____. 1991. *Population of Indonesia: Results of Population Census 1990*. Jakarta.
- _____. 2001. *Population of Indonesia: Results of Population Census 2000*. Jakarta.
- _____. 2010. *Population of Indonesia: Results of Population Census 2010*. Jakarta.
- _____. 1984. *Statistical Yearbook of Indonesia*. Jakarta. p45
- _____. 1994. *Statistical Yearbook of Indonesia*. Jakarta. p542.
- _____. 2003. *Statistical Yearbook of Indonesia*. Jakarta. p561.
- _____. 2015. *Statistical Yearbook of Indonesia*. Jakarta. p597.
- Chen, M., Zhang, H., Liu W., Zhang, W. 2014. "The Global Pattern of Urbanization and Economic Growth: Evidence from the Last Three Decades". *PLoS ONE* 9(8): e103799.

doi:10.1371/journal.pone.0103799. pp
1-15.

- Djaja, Komara. 2012. *Urban growth and its challenges: Case of Indonesia*. The World Cities Summit, Singapore.
- Marmara, Abdullahi Daiyabu & Usman, Sani Isyaku. 2015. "An Economic Analysis of Urbanization and Economic Growth in the Republic of China. SRM University, Chennai, India", accessed at [http://globalbizresearch.org/Chennai_Symposium/conference/pdf/C535 .pdf](http://globalbizresearch.org/Chennai_Symposium/conference/pdf/C535.pdf).
- Sagala, Perdamen., Akita, Takahiro., and Yusuf, Arief Anshori. 2014. "Urbanization and expenditure inequality in Indonesia: Testing the Kuznets hypothesis with provincial panel data". Springer-Verlag Berlin Heidelberg. pp 133-147. accessed at <https://link.springer.com/article/10.1007/s12076-013-0106-7>.
- Sheng, Yap Kioe., and Thuzar, Moe. 2012. *Urbanization in Southeast Asia: Issues and impacts*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sukamdi. 1996. "Urbanization and the Structure of Urban Employment in Indonesia". *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 11 (1), 52-75.
- World Bank data. 2017. "World Bank National account data, and OECD National Accounts data files". Accessed at 14/06/17 10:00 pm.
- Yulius, Yusrizal. 1990. *Urbanization and Regional Economic Development in Indonesia*. The Flinders University of South Australia.

PERILAKU STRATEGI *COPING* PELAKU TAMBAK UDANG DALAM MERESPONS KEBIJAKAN PENATAAN PEMANFAATAN TANAH KESULTANAN

Kuncoro Cahyo Aji¹, Muhadjir Darwin², Kwartarini Wahyu Yuniarti³, dan Nurhasan Ismail⁴

¹Program Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ³Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ⁴Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Kuncoro Cahyo Aji (e-mail: kun_wi@yahoo.com)

Abstrak

Kebijakan penataan pemanfaatan tanah kesultanan untuk tambak udang di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menimbulkan bentuk strategi *coping* sebagai respons masyarakat yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi mengenai strategi *coping* petambak udang yang berbeda-beda dalam merespons kebijakan penataan tanah kasultanan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa 1) terdapat bentuk strategi *coping* yang dilakukan para petambak udang dalam merespons kebijakan penataan pemanfaatan tanah kesultanan untuk tambak udang serta 2) adanya pengaruh emosi, kognisi, dan emosi dengan strategi *coping* para pelaku tambak udang. Strategi *coping* para petambak udang dalam merespons kebijakan tambak udang adalah mengkritisi keputusan pemerintah (0,914), adanya sikap menerima (0,894), penerimaan dengan terpaksa (0,849), dan evaluasi diri (0,561). Strategi *coping* tersebut dipengaruhi oleh persepsi negatif (0,864), perbedaan pendapat (0,851), kebingungan (0,822), ekspektasi (0,816), dan percaya diri (0,657).

Kata kunci: strategi *coping*, kognisi, emosi

BEHAVIOR OF COPING STRATEGY OF SHRIMP FISHERS IN RESPONDING TO THE POLICY OF LAND USE UTILIZATION OF THE SULTANATE

Abstract

The policy of arranging the utilization of cultivated land for shrimp ponds in Bantul District of Yogyakarta Special Region has resulted in the form of coping strategies as different community responses. This research is an exploratory research on shrimp farmers coping strategies that vary in response to the policy of the landscape of the Sultanate. The results of this study are as follows. 1) There are forms of coping strategy conducted by shrimp farmers in responding to the policy of arranging the utilization of the land of sultanate for shrimp ponds; 2) There are influences of emotion, cognition and emotion with the coping strategy of shrimp farmers. The coping strategy of shrimp farmers in responding to shrimp farming policy is to criticize the government's decision (0.914), to accept the decision (0.894), to accept by forced (0.849), and to have self-evaluation (0.561). The coping strategy is influenced by negative perceptions (0.864), disagreements (0.851), confusion (0.822), expectations (0.816), and confidence (0.657).

Keywords: coping strategy, cognition, emotion

Pendahuluan

Secara umum, permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah banyak dijumpai pada kasus-kasus kontestasi pemanfaatannya. Persoalan pertanahan sering diawali dengan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik kepemilikan izin maupun kesesuaian tata ruangnya. Kontestasi tanah sering dimaknai sebagai perebutan ruang antara berbagai pihak yang berkepentingan sesuai dinamika wilayah dan keanekaragaman kebutuhan.

Konflik tersebut, di antaranya, terjadi di tanah sepanjang pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian besar merupakan tanah milik Kesultanan Yogyakarta atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Sultanat Grond*. Tanah di sepanjang Pantai Pandansimo sampai Depok, misalnya, telah lama dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk tambak udang, pariwisata, pertanian cabai, bawang merah, dan buah naga. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/0981 tertanggal 3 Oktober 2014, diketahui jumlah petambak udang di daerah tersebut adalah 254 dengan total luas lahan yang digunakan sebesar 32,44 ha (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2014).

Berkaitan dengan munculnya tambak udang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan kebijakan untuk menutup semualokasitambakudangdanmerelokasinya ke Desa Wonoroto atau Ngepet, Kecamatan Sanden. Alasan penutupan itu adalah tambak udang mengganggu lingkungan. Posisi tambak udang tersebut telah melanggar tata ruang, melanggar daerah milik jalan

lintas selatan, serta melanggar sempadan sungai dan pantai. Pemda Kabupaten Bantul telah menutup 37 tambak udang, tetapi kegiatan relokasi ke daerah tambak udang yang baru belum dilaksanakan karena kebijakan relokasi masih belum jelas. Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, lokasi yang selama ini digunakan sebagai tambak udang akan direncanakan sebagai daerah pengembangan pariwisata. Meskipun kegiatan tambak udang mereka telah ditutup, kegiatan pembinaan teknis pengembangan tambak udang masih terus dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Daerah DIY dan Himpunan Nelayan Indonesia sehingga menimbulkan kebingungan pada para petambak udang tersebut.

Menanggapi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengenai pemanfaatan tanah kesultanan untuk tambak udang, tidak semua petambak menaati kebijakan tersebut. Para petambak udang merasa keberatan karena mereka berpersepsi bahwa mereka memanfaatkan tanah leluhurnya yang selama ini tidak termanfaatkan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, mereka telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengembangkan budidaya udang. Para petambak udang juga meragukan keberhasilan rencana relokasi karena selama ini tanah kesultanan di Desa Wonoroto yang merupakan calon lokasi pemindahan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Menurut mereka, hal itu juga akan menciptakan konflik antara mereka dengan masyarakat Desa Wonoroto.

Dinamika persoalan yang terjadi antara petambak udang dan pemerintah daerah dapat menimbulkan perbedaan perilaku yang sangat rentan menimbulkan konflik antaraktor. Para petambak menunjukkan berbagai macam respons terhadap kebijakan tersebut. Respons tersebut

muncul sebagai bentuk upaya, baik yang dipengaruhi oleh emosi maupun kognitif, untuk menoleransi atau mengurangi stres (Lazarus & Folkman, 1984; Sarafino, 1990; Keliat, 1999), yang selanjutnya disebut sebagai strategi *coping* dalam tulisan ini. Strategi *coping* yang ditunjukkan oleh setiap petambak berbeda tergantung pada pengetahuan mereka tentang pemanfaatan tanah kesultanan. Tulisan ini akan membahas alasan tidak semua petambak udang mematuhi kebijakan pemerintah daerah mengenai penataan pemanfaatan tanah kesultanan.

Metodologi

Studi ini dilakukan menggunakan metode campuran (*mixed method*) yang diawali dengan metode kualitatif dan dilanjutkan dengan metode kuantitatif. Sasaran penelitian meliputi masyarakat petambak udang di sekitar Pantai Pandansimo-Depok, Kecamatan Srandakan-Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden atau aktor yang dipilih adalah para petambak udang yang terkena dampak langsung kebijakan penataan pemanfaatan tanah kasultanan untuk tambak udang.

Metode kualitatif diterapkan pada tahap analisis isi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman peneliti tentang strategi *coping* yang berkembang di masyarakat petambak udang yang terkena dampak kebijakan penataan pemanfaatan tanah kasultanan untuk tambak udang. Sampel yang dipilih meliputi ketua kelompok, para pemilik tambak, dan masyarakat setempat yang menjadi petani tambak. Data yang berupa catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto rekaman, dan catatan pribadi dikumpulkan dalam tahap ini. Namun, wawancara

yang dilakukan didasarkan pada asumsi dan kerangka teoretis bahwa masyarakat petambak udang menunjukkan perilaku *coping* sebagai wujud dari ketidakberdayaan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Hasil wawancara kemudian dianalisis dengan pendekatan penafsiran yang naturalistik karena sebelumnya peneliti telah mempelajari kondisi lingkungan alamiahnya (*grounded research*) sehingga dapat memaknai atau menafsirkan fenomena dari sudut pandang responden. Hal itu menyerupai dengan yang telah didemonstrasikan oleh Creswell (2013). Secara teori, para peneliti yang bekerja pada titik-titik yang berbeda dalam waktu dan mungkin dalam keadaan yang berbeda harus mendapatkan hasil yang sama ketika menerapkan teknik yang sama untuk data yang sama (Creswell, 2013). Oleh karena itu, diharapkan hasil analisis isi yang didapatkan sesuai atau paling tidak mendekati asumsi awal yang dibuat.

Hasil analisis isi menunjukkan adanya perilaku *coping* masyarakat petambak udang yang terkena dampak kebijakan penataan pemanfaatan tanah kasultanan untuk tambak udang. Berdasarkan hasil tersebut, analisis dilanjutkan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi strategi *coping* yang ditunjukkan. Faktor-faktor tersebut disebut sebagai variabel yang meliputi kognisi, emosi, dan sikap. Selanjutnya analisis dilakukan dengan metode kuantitatif *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM adalah penggabungan antara dua konsep statistik, yaitu konsep analisis faktor yang masuk pada model pengukuran (*measurement model*) dan konsep regresi melalui model struktural (*structural model*). Model pengukuran menjelaskan hubungan antara variabel dengan indikator-indikatornya, sedangkan model struktural menjelaskan hubungan antarvariabel (Hoyle, 2011).

*PERILAKU STRATEGI COPING PELAKU TAMBAK UDANG DALAM MERESPONS
KEBIJAKAN PENATAAN PEMANFAATAN TANAH KESULTANAN*

Hasil dan Pembahasan

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Bantul yang berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" LS dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" BT. Di sebelah timur kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pada kenyataannya, sebagian besar pemanfaatan lahan untuk tambak udang ditemukan di wilayah pesisir Kabupaten Bantul dengan jumlah luas tambak udang total adalah 32.44 ha (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2014). Ketika pengamatan mulai dilakukan di lokasi penelitian, terlihat banyak tambak udang yang berada di tanah kesultanan, bahkan sebagian nelayan, selain mencari ikan di laut, sekarang telah mengembangkan usaha tambak udang di pesisir sepanjang Pantai Pandansimo-Depok, Kabupaten Bantul. Selain di wilayah tersebut, upaya budidaya tambak juga dapat dijumpai di wilayah

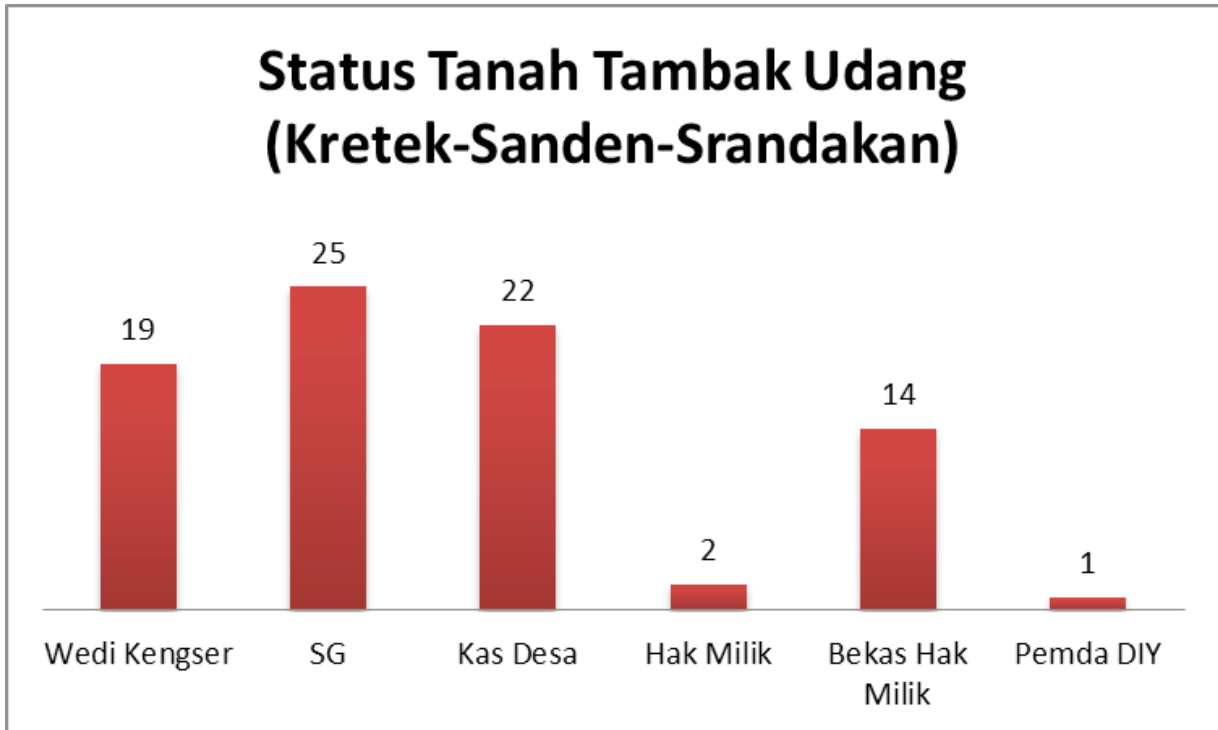
Kecamatan Kretek, Srandakan, dan Sanden. Sebagian besar usaha tambak udang tersebut menggunakan tanah kesultanan (*Sultanat Grond*). Pada 10 Juli 2014 tercatat jumlah kolam tambak di Kecamatan Kretek adalah 22 kolam, di Kecamatan Srandakan 225 kolam, dan di Kecamatan Sanden 42 kolam. Hingga 10 Desember 2014 jumlah ini bertambah menjadi 33 kolam di Kecamatan Kretek dan 229 di Kecamatan Srandakan, sedangkan di Kecamatan Sanden jumlah kolam tetap (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, 2014; Tabel 1). Ketiga kecamatan tersebut memperlihatkan bahwa jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan tambak udang di sepanjang Pantai Pandansimo-Depok sebanyak 253 orang, masing-masing 76 orang di Kecamatan Kretek, 86 orang di Kecamatan Sanden, dan di Kecamatan Srandakan sejumlah 91 orang dengan tiap personil dapat memiliki lebih dari satu usaha tambak udang. Total usaha tambak udang dari 91 personil tersebut adalah 136 usaha (Tabel 1).

Terkait dengan status tanah yang dipakai untuk usaha tambak udang, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1, sebagian besar masyarakat di tiga kecamatan tersebut menggunakan *Sultanat Grond* sebagai lokasi usaha mereka, yaitu sebanyak 25

Tabel 1 Jumlah dan Luas Kolam untuk Kegiatan Tambak Udang di Kecamatan Pesisir Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Usaha	Jumlah kolam	Luas (Ha)
1	Srandakan	136	229	23,42
2	Sanden	86	42	4,51
3	Kretek	76	33	6,07
Jumlah total		298	304	33,99

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, 2014



Sumber: Pengolahan Data dari Data Tambak Udang Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta (2016)

Keterangan: (SG = *Sultanat Grond*)

Gambar 1 Status Tanah Tambak Udang di Kecamatan Kretek-Sanden-Srandakan

kolam tambak udang. Status tanah lain yang juga mendominasi adalah tanah kas desa sebanyak 22 kolam dan *wedi kengser* sebanyak 19 kolam. Yang mencolok adalah adanya satu kolam usaha tambak udang yang memakai tanah milik Pemda DIY. Sementara itu, kolam usaha tambak udang yang berada pada tanah hak milik hanya sejumlah 2 kolam. Data status tanah yang dimanfaatkan untuk usaha tambak udang di atas mengindikasikan bahwa selama ini para petambak udang di tiga kecamatan tersebut menggunakan lahan yang bukan milik pribadi. Hal inilah yang akhirnya menjadi polemik ketika lahan-lahan tersebut diminta untuk dikosongkan dari aktivitas pertambakan.

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan dan konsultasi publik yang telah dilakukan

pemerintah daerah, lokasi budidaya tambak udang akan difokuskan pada satu kawasan yang berada di pesisir Kecamatan Sanden. Kawasan yang direncanakan sebagai lokasi tujuan relokasi tambak udang tersebut mempunyai luas sekitar 32,02 ha. Lahan-lahan tambak yang berada di luar kawasan tersebut nantinya akan direlokasi ke dalam kawasan tersebut. Rencana pengawasan dan pengelolaan program relokasi akan dilakukan dengan melibatkan pihak swasta.

Hasil wawancara menunjukkan aspek-aspek yang mengontrol respons petambak udang terhadap kebijakan penataan tambak udang. Aspek-aspek tersebut kemudian dikategorikan menjadi empat variabel umum, yaitu variabel kognitif, emosi, sikap, dan perilaku. Jenis-jenis aspek yang muncul

Tabel 2 Variabel Psikologi yang Berkembang dalam Strategi Coping Petambak Udang dalam Menghadapi Kebijakan Penataan Tambak Udang

No.	Variabel	Aspek
1.	Kognitif	Persepsi Negatif
		Perbedaan Pendapat
		Ekspektasi
		Percaya Diri
		Kebingungan
		Kekhawatiran
2	Emosi	Kemarahan
		Takut kehilangan
		Adanya sosok yang dapat dipercaya
		Adanya rasa marah terhadap pemerintah
		Memiliki kemampuan untuk bertahan dan menyesuaikan diri (<i>self efficacy</i>)
		Adanya penerimaan bersyarat
3	Sikap	Kecewa
		Legawa
		Merasa tidak ada keadilan
		Merendahkan kinerja pemerintah
		Adanya keraguan pada pemerintah
		Kecurigaan
4	Perilaku strategi coping	Munculnya pembelaan diri
		Adanya Ketidakrelaan
		Penerimaan dengan terpaksa
		Mengkritisi keputusan pemerintah
		Adannya sikap menerima
		Adanya sikap evaluasi diri

Sumber: Hasil kategorisasi wawancara

dalam hasil wawancara beserta kategorisasi variabelnya dapat dilihat dalam Tabel 2.

Hasil kategorisasi wawancara menunjukkan bahwa aspek variabel kognitif yang berkembang mencakup aspek persepsi negatif; perbedaan pendapat, ekspektasi atau

harapan dapat tetap membuka tambak udang, dan kebingungan (poin 1 dalam Tabel 2). Selain kognitif, di lapangan juga berkembang variabel emosi yang terdiri atas aspek kekhawatiran, kemarahan, takut kehilangan, adanya sosok yang dapat dipercaya, dan

adanya rasa marah terhadap pemerintah (poin 2 dalam Tabel 2). Pada hasil wawancara terhadap informan juga dapat diketahui adanya beberapa macam sikap para petambak udang terhadap kebijakan penataan tambak udang, meliputi memiliki kemampuan untuk bertahan dan menyesuaikan diri, adanya penerimaan bersyarat, kecewa, legawa, merasa tidak ada keadilan, merendahkan kinerja pemerintah, adanya keraguan pada pemerintah, kecurigaan, munculnya pembelaan diri, dan adanya ketidakrelaan (poin 3 dalam Tabel 2).

Dari hasil kategorisasi wawancara yang didapat, terlihat bahwa respons para petambak udang dalam menghadapi kebijakan penataan tambak udang (poin 4 dalam Tabel 2) terdiri atas penerimaan dengan terpaksa, mengkritisi keputusan pemerintah, bersikap menerima, dan mengevaluasi diri. Evaluasi diri yang dimaksud adalah mengakui bahwa diri salah karena telah menggunakan tanah yang bukan hak miliknya, termasuk *Sultanat Grand*, untuk usaha tambak udang mereka. Pemilihan strategi *coping* dapat dipandang sebagai faktor yang menentukan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang menekan (*stressful life events*) (Lazarus & Folkman, 1984).

Dari keempat perilaku strategi *coping* yang berkembang, mengkritisi keputusan pemerintah adalah respons yang paling sering muncul yang menunjukkan angka statistik 0,914. Menurut sebagian besar para petambak udang, pemerintah hendaknya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan sebelum menentukan kebijakan penutupan tambak udang. Strategi *coping* yang berkembang selanjutnya secara berturut-turut adalah bersikap menerima (0,894), menerima dengan terpaksa (0,849), dan mengevaluasi diri (0,561). Faktor budaya masyarakat setempat yang cenderung menyimpan atau tidak menunjukkan emosinya secara terbuka

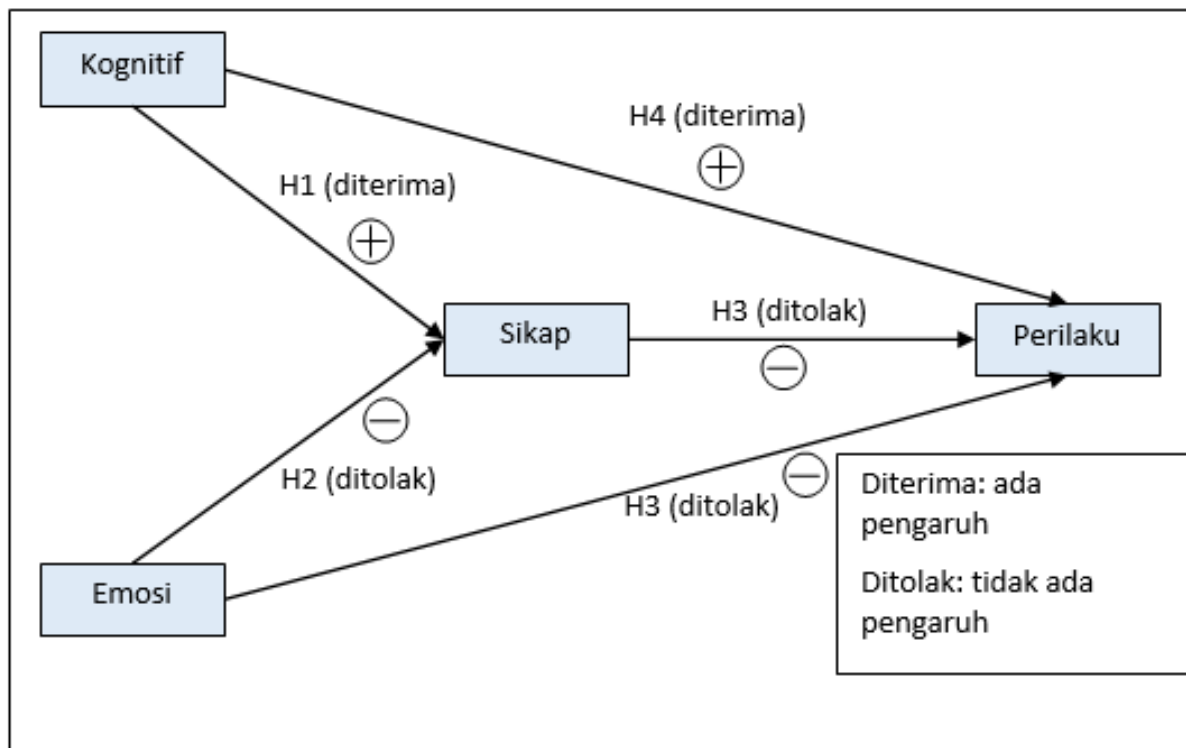
boleh jadi melatarbelakangi semua respons yang ditunjukkan.

Guna mengetahui pengaruh dari setiap variabel terhadap variabel lainnya, analisis kuantitatif dengan metode SEM (*Structural Equation Model*) dilakukan berdasarkan hasil kategorisasi wawancara yang sebelumnya telah ditentukan. Pengujian SEM didasarkan pada lima hipotesis yang telah dibuat sebelumnya dan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Hipotesis 1 (H1) : adanya pengaruh positif kognitif terhadap sikap
2. H2 : adanya pengaruh positif emosi terhadap sikap
3. H3 : adanya pengaruh positif sikap terhadap perilaku
4. H4 : adanya pengaruh positif kognitif terhadap perilaku
5. H5 : adanya pengaruh positif emosi terhadap perilaku.

Hubungan antarhipotesis dapat dilihat pada Gambar 2. Dari kelima hipotesis yang diuji, hanya H1 dan H4 yang menunjukkan hasil positif. Dengan kata lain, hanya kedua hipotesis tersebut yang diterima, sedangkan tiga hipotesis lainnya ditolak. Adanya pengaruh positif kognitif terhadap sikap (H1) memperlihatkan bahwa peningkatan kognitif akan meningkatkan sikap, sedangkan adanya pengaruh positif kognitif terhadap perilaku (H4) menunjukkan bahwa peningkatan kognitif akan meningkatkan perilaku. Meskipun kognitif terbukti memengaruhi sikap dan perilaku, sikap tidak memengaruhi perilaku seperti yang ditunjukkan oleh hasil pengujian terhadap H3.

Selanjutnya hasil perhitungan dengan metode kuantitatif digunakan untuk menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung dari setiap variabel (kognitif, emosi, dan sikap) terhadap perilaku (Tabel



Gambar 2 Interaksi Antarvariabel berdasarkan Hasil Analisis SEM

3). Pengaruh langsung dan tidak langsung akan menghasilkan pengaruh total yang menunjukkan seberapa besar pengaruh dari variabel tersebut dalam mengontrol perilaku strategi *coping* yang berkembang.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh kognitif terhadap perilaku adalah yang paling besar dengan kontribusi total sebesar 0,858 (85,8 persen) (Tabel 3). Pengaruh langsung kognitif terhadap perilaku adalah 1,397 (139,7 persen), sedangkan

pengaruh tidak langsungnya terhadap perilaku karena adanya sikap (Gambar 2) adalah 0,520 (52 persen) (Tabel 3). Dari ketiga variabel yang diujikan, variabel kognitif memiliki total pengaruh yang paling besar terhadap perilaku.

Kemudian pengaruh langsung emosi terhadap perilaku adalah 0,291 (29,1 persen), sedangkan pengaruh tidak langsung emosi terhadap perilaku yang dimediasi oleh sikap (Gambar 2) adalah -0,149 (negatif

Tabel 3 Kontribusi Pengaruh Antarvariabel

Variabel	Perilaku		Pengaruh Total
	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	
Kognitif	1.379	0.520	0.858
Emosi	0.291	-0.149	0.142
Sikap	-0.668	-	-0.668

Sumber: Hasil Perhitungan dengan AMOS

14,9 persen) yang menghasilkan pengaruh total sebesar 0,142 (14,2 persen). Hasil negatif pada pengaruh tidak langsung emosi terhadap perilaku mengindikasikan bahwa arah pengaruhnya berkebalikan. Artinya bahwa peningkatan emosi akan menurunkan perilaku. Berdasarkan hasil perhitungan tidak langsung kognitif dan emosi terhadap perilaku, yang sama-sama melalui variabel sikap, dapat disimpulkan bahwa sikap bukan merupakan variabel mediasi antara kognitif dan emosi terhadap perilaku.

Adanya pengaruh yang besar oleh kognitif terhadap perilaku mengindikasikan bahwa para petambak udang lebih didorong oleh adanya motivasi kognitif di dalam merespons kebijakan penataan tambak udang. Salah satu kriteria individu/masyarakat yang dikontrol dominan oleh aspek kognitif adalah senang berdialog. Oleh karena itu, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelesaikan penataan tambak udang didasarkan pada sifat tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Persepsi setiap informan berbeda, baik mengenai keberadaan tambak udang maupun peraturan yang berkaitan dengan kebijakan penataan pemanfaatan tanah kesultanan untuk tambak udang. Perbedaan ini memberikan perbedaan perilaku strategi *coping* dalam merespons kebijakan penataan pemanfaatan tanah kesultanan untuk tambak udang. Perilaku strategi *coping* yang muncul secara berturut-turut berdasarkan statistik yang diperoleh meliputi (1) mengkritisi; (2) menerima dengan legawa; (3) menerima dengan terpaksa; dan (4) menerima dan mengakui bahwa mereka yang salah.

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa perilaku strategi *coping* yang ditunjukkan oleh petambak udang hanya dipengaruhi oleh variabel kognitif. Jenis

variabel kognitif yang paling berpengaruh secara berturut-turut meliputi persepsi negatif, perbedaan pendapat, kebingungan, ekspektasi, dan terakhir indikator percaya diri. Strategi *coping* para petambak udang tidak dipengaruhi oleh emosi. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor budaya masyarakat setempat yang cenderung menyimpan atau tidak menunjukkan emosinya secara terbuka.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pihak kesultanan sebagai pihak pemilik tanah kesultanan dapat memberikan arahan yang jelas mengenai pemanfaatan tanah tersebut untuk tambak udang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dengan melibatkan pihak kesultanan, mengadakan dialog secara kontinu mengenai pemanfaatan tanah kesultanan untuk tambak udang.
3. Tiap kebijakan publik yang diambil pemerintah perlu berkesinambungan supaya tidak menimbulkan persepsi negatif di tingkat masyarakat.
4. Setiap kebijakan yang telah mempunyai ketetapan hukum harus segera disosialisasikan ke masyarakat, baik melalui kecamatan, desa, maupun tokoh masyarakat.
5. Keberadaan tanah kesultanan lengkap dengan kebijakan pemanfaatan tata ruangnya, misalnya dalam bentuk peta, perlu divisualisasikan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat memfasilitasi pembuatan aturan pemanfaatan tanah untuk tambak udang dengan memperhatikan lingkungan dan status kepemilikan tanah sebagai upaya revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul,

*PERILAKU STRATEGI COPING PELAKU TAMBAK UDANG DALAM MERESPONS
KEBIJAKAN PENATAAN PEMANFAATAN TANAH KESULTANAN*

melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dapat membantu menciptakan inovasi kebijakan yang mengatur bagi hasil antara kesultanan dengan rakyat petambak udang.

8. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat menarik retribusi dari para petambak udang kemudian mengembalikan uang yang masuk tersebut sebagai biaya pemulihan lingkungan, misalnya pencegah abrasi laut, pengelolaan limbah air tambak, dan tanaman penghambat angin.

Keliat, B. A. 1999. "Pengertian perilaku maladaptive". Artikel Kesehatan. Diunduh dari www.FKUNHAS.com dan diakses pada 12 September 2012.

Lazarus, R. S. and Folkman, S. 1984. *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer Publications.

Sarafino, E. 1990. *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions*. New York: John Wiley & Sons.

Daftar Pustaka

Creswell, John. 2013. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*, terjemahan dari *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition. First Published 2013, SAGE, ISBN: 978-1-4129-9530-6. Edisi Indonesia. Cetakan I, 2015.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 2014. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bantul Tahun 2014. Dokumen final. Dokumen digital versi tanggal 18/03/2015. Tidak dipublikasikan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2016. "Peningkatan Produksi dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya". Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Perikanan Budidaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 19 April 2016.

Hoyle, R.H. 2011. *Structural Equation Modeling, for Social and Personality Psychology*, SAGE Publication Ltd 1 Oliver's Yard 55 City Road London EC1Y 1SP. ISBN 978-0-85702-403-9.

Resensi Buku AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL

Muhadjir Darwin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Muhadjir Darwin (e-mail: d_muhadjir@yahoo.com)



Judul	: Bulan Sabit Terbit di atas Pohon Beringin - Studi tentang Muhammadiyah di Kotagede sekitar 1910-2010 (Edisi Revisi Ditambah Bagian Dua)
Penulis	: Mitsuo Nakamura
Penerjemah	: ISEAS, 2012
Penerbit	: Suara Muhammadiyah
Cetakan	: Kedua, 2017
Tebal	: 487 halaman

Mitsuo Nakamura (2017) *Bulan Sabit Terbit Di atas Pohon Beringin: Studi tentang Muhammadiyah di Kotagede sekitar 1910-2010* (Edisi Revisi Ditambah Bagian Dua). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017. Diterjemahkan dari *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town 1910-2010* (Second Enlarged Edition). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2012.

Buku ini merupakan revisi dan penyempurnaan dari buku yang terbit pertama kali di Indonesia pada 1983 oleh Gama Press. Buku baru yang diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh ISEAS Singapura dan dalam bahasa Indonesia oleh Suara Muhammadiyah ini merupakan hasil revisi dari teks lamanya

dan penambahan bab-bab baru sebagai hasil dari kajian lanjut yang ia lakukan sejak 1980 hingga sekarang. Buku yang berasal dari disertasi doctoral di Cornell University, tulisan antropolog berkebangsaan Jepang ini telah menjadi klasik, sejajar, bahkan ada yang mengatakan lebih penting, daripada buku klasik Clifford Geertz (1960), *The Religion of Java*. Geertz berhasil merekonstruksi konsep trilogi dalam kebudayaan Jawa yang sangat terkenal: santri, abangan, dan priayi. Santri dan abangan mempunyai orientasi keagamaan atau kebudayaan yang berlawanan. Santri cenderung puritan, sedangkan abangan cenderung sinkretis. Jika orang Jawa santri merepresentasikan keislaman yang lebih puritan dengan menekankan kepada ritual formal Islam, seperti salat, puasa, atau zakat;

maka orang Jawa abangan hanya menerima Islam sebagai agama formalnya, tidak secara teratur menjalankan ibadah formal seperti diajarkan dalam Islam, dan masih mengikuti adat Jawa yang bersumber pada kepercayaan dari leluhur mereka sebelumnya: Hindu, Budha, bahkan animisme.

Nakamura dalam bukunya tersebut dengan berani membantah tesis Geertz tersebut, sebuah tesis yang banyak jadi rujukan ilmuwan lain dalam mempelajari masyarakat Jawa, bahkan Indonesia. Nakamura mengoreksi teori Geertz dengan mengatakan bahwa Islam di Jawa tidak semarginal itu, tetapi merupakan sebuah agama yang justru sedang tumbuh (*the ongoing process of Islamization*) dan mengambil bentuk yang tegas di tengah masyarakat Jawa yang secara keseluruhan bersifat sikretis. Islam bukan tumbuh melawan kebudayaan Jawa, tetapi justru memanfaatkan karakter Jawa yang konsisten dengan Islam, menggairahkan suasana keislaman tanpa harus kehilangan karakter Jawanya. Teorinya itu disimbolkan dengan ungkapan yang menjadi judul bukunya: *Bulan Sabit* (simbol keislaman) *yang Terbit di Atas* (bukan menjatuhkan atau mematikan) *Pohon Beringin* (simbol budaya Jawa).

Nakamura tidak berhenti mempelajari Islam di Jawa setelah menulis disertasinya. Ia secara teratur datang ke kota penelitiannya, Kotagede, mencatat perubahan-perubahan yang terjadi di Kotagede dan Indonesia pada umumnya dari waktu ke waktu, bahkan secara mendalam mempelajari organisasi Islam besar lainnya, yaitu Nahdhatul Ulama. Titik tekan dari analisis Nakamura adalah pada perubahan sosial atau pembangunan kesejahteraan sosial yang tengah terjadi Indonesia. Di dalam perubahan tersebut, Islam, atau organisasi Islam Muhammadiyah (dalam kajian berikutnya adalah NU), tidak berada di tepi, tetapi justru berada di tengah;

bukan menjadi faktor yang menghambat atau menghalangi, tetapi justru menginspirasi dan mewarnai perubahan tersebut. Islamisasi dan modernisasi bukanlah proses yang bertolak belakang, tetapi proses yang saling mengisi.

Perubahan itu tetap berlangsung hingga sekarang. Proses Islamisasi yang berlangsung telah memberikan hasil yang signifikan, baik bagi keislaman maupun bagi keIndonesiaan. Jika menurut BJ Boland, pada 1960 hanya 0-15 persen orang melaksanakan salat dan pada 1967 hanya 14 persen masyarakat Yogya yang membayar zakat, dan di Jawa Tengah hanya 2 persen yang menjalankan ibadah puasa, maka pada 2006-2010 sekitar 90 persen responden mengaku menjalankan salat wajib lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika pada 1950-1958 hanya sekitar 2.500-4.000 orang yang naik haji setiap tahunnya, maka pada 2010 di Jawa Tengah saja, ada 29.435 orang yang naik haji dan di belakangnya ada 80.000 orang yang antri untuk mendapatkan jatah naik haji. Jika di Kotagede, pada 1970 hanya ada dua masjid saja, maka pada 2010 telah ada 51 masjid yang berdiri.

Proses Islamisasi masih berlangsung hingga sekarang, tetapi ke dalam kecenderungan yang lebih variatif. Di Kotagede, masih banyak orang Muhammadiyah yang mengambil jalan moderat, tetapi muncul juga kecenderungan radikalisme dari kader-kadernya. Jika di Kotagede dulu, Islam menjadi agama tunggal yang berkembang, sekarang telah muncul penganut agama lain di sana, seperti Kristen atau Katolik. Penduduk Kotagede tidak semuanya adalah orang Jawa karena pendatang dari luar pulau juga mulai menempati kota tersebut. Hal itu berarti bahwa pluralisme tengah berkembang di sana. Munculnya keberagaman di masyarakat tidak serta-merta menimbulkan konflik sosial, paling tidak, sampai sejauh ini.

Fenomema Muhammadiyah juga sarat dengan nuansa perubahan sosial positif. Sejak berdirinya, Muhammadiyah memberi penekanan pada kemajuan sosial, utamanya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Secara cermat, Nakamura menjelaskan cara orang-orang Muhammadiyah, termasuk kader-kadernya yang di bawah, sangat menekankan pendidikan bagi keluarganya. Dalam beberapa dekade kemudian, Nakamura menyaksikan kemajuan sosial dan ekonomi dari masyarakat Kotagede, sesuatu yang secara konsisten terjadi di banyak daerah lain di Jawa atau di Indonesia.

Namun, satu hal yang dicatat oleh Nakamura: seberapa jauh Muhammadiyah pada khususnya atau Islam pada umumnya telah siap menghadapi perubahan sosial yang baru dan seberapa jauh gerakan Islam di Jawa telah memberikan respons positifnya. Perubahan sosial yang dimaksud, misalnya, adalah ketidakadilan sosial yang terus mengemuka, bertambahnya proporsi penduduk yang berada di usia lanjut, terjadinya polusi di lingkungan karena kepadatan penduduk dan penggunaan zat-zat yang mempolusi lingkungan. Muhammadiyah tidak cukup hanya menggunakan model-model aksi yang konvensional, tetapi perlu melakukan reorientasi aksi. Hal demikian perlu didukung oleh semua kadernya. Persoalan yang dihadapi Muhammadiyah pada khususnya dan Islam di Indonesia pada umumnya menjadi lebih rumit karena masalah yang ada di dalam komunitas mereka sendiri, yaitu tumbuhnya paham keagamaan yang radikal atau eksklusif. Bagaimana Muhammadiyah, yang menurut Nakamura mempunyai watak toleran, moderat dan inklusif, dapat menyikapi perkembangan baru ini secara bijak, tetapi tepat?

Pedoman untuk Penulis

Populasi adalah jurnal penelitian dan analisis kritis masalah-masalah terkait tema besar kependudukan dan kebijakan. Redaksi menerima naskah artikel hasil penelitian, baik keputakaan maupun lapangan, dan resensi buku dalam lingkup tema tersebut. Naskah yang diajukan harus orisinal, belum pernah dipublikasikan atau sedang dipertimbangkan untuk diterbitkan oleh media lain, dan tidak mengandung unsur plagiarisme (dinyatakan dengan pernyataan tertulis).

Pengiriman Naskah

- *Populasi* menggunakan *Open Journal System* (OJS) dan menganjurkan para penulis melakukan register terlebih dahulu kemudian mengunggah naskah secara *online* di <http://jurnal.ugm.ac.id/populasi>. OJS mempermudah dewan redaksi, editor, *peer review*, dan penulis dapat memantau proses naskah, secara *online*.
- Naskah dalam bentuk MS-Word dikirim via *e-mail* ke jurnalpopulasi@ugm.ac.id atau jurnalpopulasi@gmail.com.
- Soft file boleh juga diserahkan langsung ke sekretariat Pengelola Populasi, di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Gedung Masri Singarimbun, Lt. 2. Jl. Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Tlp. 0274-6491153, 547867.

Ketentuan Naskah

- Mohon perhatikan instruksi di bawah ini dengan cermat. Penyunting berhak mengembalikan atau menolak naskah yang tidak sesuai dengan butir-butir instruksi di bawah ini.
- Naskah ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, berformat MS-Word, huruf Times New Roman, 1 spasi, tidak melebihi 7.000 kata.
- Judul dan subjudul: Judul harus spesifik dan efektif sehingga sekali baca dapat ditangkap maksudnya. Judul terdiri sebanyak-banyaknya 14 kata pada naskah berbahasa Indonesia atau 10 kata pada naskah berbahasa Inggris. Subjudul di dalam teks harus singkat dan jelas. Hindari terlalu banyak subjudul dan hindari penggunaan nomor. Naskah berbahasa Indonesia harus mempunyai judul dalam bahasa Inggris.
- Penulis: nama (-nama) penulis ditulis di bawah judul tanpa mencantumkan gelar akademik atau jabatan apa pun. Deskripsi singkat tentang penulis, meliputi institusi asal penulis dan *e-mail* korespondensi ditulis di bawah nama penulis.
- Catatan kaki: Gunakan catatan kaki dari pada catatan akhir.
- Abstrak (*abstract*) dan kata kunci (*keywords*): disusun dalam satu paragraf 100-200 kata, yang menjelaskan secara gamblang, utuh, dan lengkap keseluruhan isi tulisan. Intisari berisi ide-ide pokok tentang latar belakang, masalah dan tujuan, kerangka berpikir, metode, pembahasan, dan kesimpulan, serta ditulis dengan bahasa yang tidak sama dengan bahasa naskah. Abstrak disertai dengan kata kunci yang

mencerminkan konsep-konsep paling penting yang dikandung naskah. Kata kunci terdiri sekurang-kurangnya 2 kata dan sebanyak-banyaknya 4 kata. Naskah berbahasa Indonesia harus mempunyai abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.

- Tabel, grafik, gambar, ditulis dalam ukuran huruf yang sama, atau relatif sama, dengan ukuran huruf pada naskah. Judul tabel atau gambar ditulis dengan lay-out sebagai berikut:
 - **Tabel 1 Kepemilikan Aset Berdasarkan Status Ekonomi**
 - **Gambar 1 Skema Penyaluran Bansos**
- Setiap tabel atau gambar harus menyertakan sumber atau catatan di bawahnya.
- Pendahuluan: menguraikan secara ringkas tentang latar belakang dan formulasi masalah penelitian, tujuan penelitian, serta kajian teoretis yang relevan dan jika memungkinkan, menyebutkan hipotesis.
- Metode: menguraikan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk di dalamnya pemaparan tentang desain penelitian, sasaran penelitian, instrumen dan teknik/prosedur pengumpulan data, serta analisis data.
- Pembahasan: menyajikan secara naratif pokok-pokok hasil penelitian dengan didukung sajian tabel, grafik atau diagram, serta menjawab permasalahan penelitian dengan cara menafsirkan temuan dan mengaitkannya dengan struktur pengetahuan yang telah mapan.
- Kesimpulan: menyajikan ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dan dapat dilaksanakan.
- Daftar Pustaka: memuat semua kepustakaan yang dirujuk dalam naskah dan tidak memuat kepustakaan yang tidak dirujuk. Yang menjadi pertimbangan kepustakaan adalah sebagai berikut. Derajat kemutakhiran kepustakaan yang diacu dengan melihat proporsi terbitan 10 tahun terakhir. Semakin banyak kepustakaan primer diacu, semakin naskah bermutu.
- Kesimpulan: menyajikan ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dan dapat dilaksanakan.
- Resensi buku. Naskah resensi buku harus menyertakan informasi mengenai judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman buku yang dirensi. Isi resensi buku memuat informasi dan pemahaman mengenai apa yang diungkapkan di dalam buku tersebut, serta penilaian dan pertimbangan kepada pembaca akan pentingnya buku tersebut. Naskah resensi buku berkisar antara 1.500-2.000 kata.

Penulisan Referensi

Dalam Naskah

- Karya yang dikutip dalam teks menggunakan format: (Gray, 2008: 501).
- Pengutipan dalam kelompok ditulis secara alfabetis menggunakan titik koma sebagai pemisah: (Brown, 2008; Gray & Gani, 1998; Stuart, 2002).
- Gunakan 'et.al.' atau 'dkk' ketika mengutip satu karya yang ditulis oleh lebih dari dua penulis, tetapi tulis semua pengarang di dalam Daftar Pustaka.
- Untuk membedakan karya yang berbeda oleh penulis yang sama dalam tahun yang sama, gunakan huruf a, b, c, dst., seperti Arifin (2002a, 2002b).

- Tidak ada penulisan menggunakan garis bawah atau *underline* baik di dalam naskah, catatan kaki maupun daftar pustaka.

Dalam Daftar Pustaka

- Penulisan karya dalam daftar pustaka ditulis dalam urutan alfabetis dan kronologis.
- Buku dengan satu penulis: Singarimbun, Masri. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku dengan lebih dari satu penulis: Baumert, Kevin; Ruchi Bhandari and Nancy Kete. 1999. *What Might a Developing Country Climate Commitment Look Like?* Washington, D.C.: World Resources Institute.
- Penulis berbentuk korporasi atau lembaga: Universitas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. 2006. "Penelitian Peningkatan Efektivitas Program Raskin Melalui Pendampingan Lembaga Perguruan Tinggi". (Laporan akhir). Yogyakarta: Bekerja sama dengan Perum Bulog.
- Artikel majalah atau jurnal: Listyaningsih, Umi dan Eddy Kiswanto. 2008. "Bantuan Langsung Tunai: mengatasi Masalah dengan Masalah". *Populasi*, 19 (1), 13-26.
- Artikel dari surat kabar: Darwin, Muhadjir. 2008. "Strategi dan Pencapaian MDGs". *Kedaulatan Rakyat*, 15 Oktober, hlm. 9.
- Karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain): Asmi, Handria. 2010. "Manajemen Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Agam: Studi Penyaluran Bantuan Korban Gempa Bumi Tanggal 30 September 2008". (Tesis). Yogyakarta: Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Makalah seminar: Milla, Mirra Noor. 2008. "Profil Psikologis Teroris di Indonesia: Dasar Bagi Penerapan Metode Counter-Terrorism". *Makalah Seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 10 September*.
- Artikel dari internet: Abimanyu, Anggito. 2006. "Kebijakan Publik Dalam Praktek". <http://www/paue.ugm.ac.id/seminar/update2007/anggito-1.ppt>, diakses 2 Juni 2008, pukul 10.00 WIB.
- Buku terjemahan: Jellinek, Lea. 1994. *The Wheel of Fortune: the History of a Poor in Jakarta*. Diterjemahkan oleh Eddy Zainuri dengan judul *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. Jakarta: LP3ES.
- Pustaka tidak diketahui penulisnya: Anonim. 2007. *Kiat Sukses Modal Kepercayaan*. Yogyakarta: Sokolimo Press.

Kepastian naskah yang dimuat akan diberitahukan melalui *e-mail* korespondensi atau pos. Selagi penulis belum memperoleh kepastian tersebut, tidak boleh mengirimkan naskah untuk diterbitkan di tempat lain.

FORMULIR BERLANGGANAN

Nama (Instansi/Perorangan) :

Alamat :

.....

.....

.....

.

Harap dicatat sebagai pelanggan Jurnal POPULASI, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bersama ini saya kirimkan pembayaran melalui rekening Bank Mandiri No. 137-00-0624454-1, atas nama YP3K-UGM sebesar Rp

untuk edisi, mulai nomor/bulan

dengan harga per eksemplar Rp35.000.

....., 201....

Pelanggan,

.....

